

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG :

**PERUBAHAN**  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

# RKPD

**KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**



Pemerintah  
Kabupaten  
Majalengka





## Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	1
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	1
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023.....	70
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.	1
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	2
3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 .....	2
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	2
3.1.1.2 Inflasi.....	3
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	5
3.1.1.4 Gini Ratio .....	6
3.1.1.5 Kemiskinan.....	7
3.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023.	8
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....	12
3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	12
3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat.....	14
3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka .....	20



	Halaman
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	22
3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	24
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	28
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	2
4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....	2
4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	9
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.....	12
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	19
4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	19
4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	22
4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka.....	27
4.2.4 Isu Strategis.....	31
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	43
4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	52
4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang .....	56
4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang .....	58
4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana .....	60
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	1
5.1 Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2023....	2
5.2 Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	6



	Halaman
BAB VI PENUTUP .....	1



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Perbandingan Pagu Indikatif RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2023..... 1
Tabel 2.2	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2023 Triwulan II..... 3
Tabel 2.3	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Ada dalam RKPD dan APBD pada Setiap OPD Triwulan II Tahun 2023..... 6
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dirinci Menurut Perangkat Daerah..... 8
Tabel 2.5	Capaian Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan ke-2 Tahun 2023..... 11
Tabel 2.6	Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Triwulan Ke-2 Tahun 2023..... 70
Tabel 3.1	Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022..... 4
Tabel 3.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional..... 6
Tabel 3.3	Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka..... 8
Tabel 3.4	Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 11
Tabel 3.5	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 11
Tabel 3.6	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 12
Tabel 3.7	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023..... 14
Tabel 3.8	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023..... 20
Tabel 3.9	Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka..... 21



	Halaman
Tabel 3.10	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023 Kabupaten Majalengka..... 27
Tabel 3.11	Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 32
Tabel 3.12	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 34
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023..... 9
Tabel 4.2	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023..... 12
Tabel 4.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023..... 14
Tabel 4.4	Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 16
Tabel 4.5	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 17
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 19
Tabel 4.7	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023..... 32
Tabel 4.8	Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat..... 42
Tabel 4.9	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2023..... 44
Tabel 4.10	Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2023 dan Sasaran Perubahan RKPD 2023 Kabupaten Majalengka. 45
Tabel 4.11	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023..... 46
Tabel 4.12	Keselarasn Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN..... 51
Tabel 4.13	Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka..... 56
Tabel 4.14	Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten 59



		Halaman
	Majalengka.....	
Tabel 4.15	Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka.....	62
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	7



## Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	3
Gambar 3.2 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	4
Gambar 3.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka..	7
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	2
Gambar 4.2 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.....	43





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan



daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat dari kegiatan/sub kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
4. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;
3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta penyesuaian capaian target indikatornya; dan
4. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan



- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
  17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 Nomor 6).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama pembangunan Kabupaten Majalengka dalam RPJPD Tahun 2005-2025

dan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
4. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (PPASP APBD) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

#### **1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2023, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023**

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Permasalahan Pelaksanaan RKPD tahun 2023 dengan Triwulan II.





### **Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah**

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka Tahun 2023, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2023 serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

### **Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Jawa Barat, dan Majalengka serta prioritas pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan pembangunan nasional. Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan.

### **Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

Memuat program dan kegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2023, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

### **Bab VI Penutup**

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.



## BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Substansi dasar pelaksanaan evaluasi dilakukan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori prioritas pembangunan pemerintah daerah.

### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

#### A. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran dalam RKPD dan APBD

Rekapitulasi pagu indikatif RKPD terhadap APBD Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	APBD parsial 3	% APBD terhadap RKPD
1.	Dinas Pendidikan	1.089.466.233.400	974.016.489.660	89
2.	Dinas Kesehatan	180.583.517.197	243.828.185.033	135
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	172.469.587.926	149.385.182.961	87
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	192.247.539.159	177.461.217.078	92
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	532.217.793.341	247.174.789.437	46
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.328.010.397	38.734.736.162	60
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.377.790.592	5.516.884.849	87
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	26.123.014.301	17.037.126.885	65
9.	Dinas Sosial	19.565.365.335	9.642.493.030	49
10.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.687.545.697	41.276.722.423	99
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	26.932.327.098	22.800.366.173	85



No.	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	APBD parsial 3	% APBD terhadap RKPD
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	59.284.345.373	55.358.570.719	93
13.	Dinas Lingkungan Hidup	22.903.560.356	26.009.796.498	114
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.773.953.766	9.147.555.490	66
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.793.648.422	26.298.104.414	121
16.	Dinas Perhubungan	54.273.099.194	40.905.027.985	75
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.295.440.112	6.605.132.305	54
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.754.758.611	6.503.627.229	96
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	21.719.008.486	23.376.317.915	108
20.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	37.196.487.035	6.790.647.037	18
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.282.364.395	7.542.464.948	49
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.740.391.141	9.691.774.743	111
23.	Sekretariat Daerah	65.223.225.897	65.074.003.798	100
24.	Sekretariat DPRD	60.002.551.213	67.864.790.858	113
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.581.462.580	11.194.471.259	89
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	597.721.699.999	502.430.963.002	84
27.	Badan Pendapatan Daerah	18.034.555.083	17.767.722.612	99
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	254.188.967.060	31.119.703.434	12
29.	Inspektorat	10.859.806.477	12.394.284.603	114
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.679.124.727	8.260.394.744	95
31.	Kecamatan Argapura	2.756.568.126	3.006.712.912	109
32.	Kecamatan Banjaran	2.631.440.234	2.672.881.594	102
33.	Kecamatan Bantarujeg	2.583.372.286	2.544.308.651	98
34.	Kecamatan Cigasong	8.605.872.375	7.522.372.745	87
35.	Kecamatan Cikijing	2.853.157.705	2.599.674.337	91
36.	Kecamatan Cingambul	2.843.112.115	2.782.171.093	98
37.	Kecamatan Dawuan	2.939.928.818	3.027.937.745	103
38.	Kecamatan Jatitujuh	3.034.819.776	2.946.151.313	97
39.	Kecamatan Jatiwangi	3.390.519.978	3.678.387.343	108
40.	Kecamatan Kadipaten	2.678.601.119	2.711.394.640	101
41.	Kecamatan Kasokandel	2.498.374.432	2.303.356.547	92
42.	Kecamatan Kertajati	3.180.831.497	2.938.095.188	92
43.	Kecamatan Lemahsugih	2.400.722.178	2.123.404.080	88
44.	Kecamatan Leuwimunding	2.537.425.638	2.676.508.313	105
45.	Kecamatan Ligung	3.352.465.615	3.387.865.988	101
46.	Kecamatan Maja	2.801.283.635	3.086.828.291	110
47.	Kecamatan Majalengka	21.308.057.407	18.273.818.719	86
48.	Kecamatan Malausma	2.565.475.711	2.732.476.020	107
49.	Kecamatan Palasah	2.672.461.082	2.667.127.441	100



No.	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	APBD parsial 3	% APBD terhadap RKPD
50.	Kecamatan Panyingkiran	2.243.014.168	2.282.336.352	102
51.	Kecamatan Rajagaluh	2.952.228.321	3.272.554.996	111
52.	Kecamatan Sindang	2.516.642.248	2.773.793.272	110
53.	Kecamatan Sindangwangi	2.508.490.392	2.924.885.735	117
54.	Kecamatan Sukahaji	2.583.722.671	2.993.076.194	116
55.	Kecamatan Sumberjaya	2.554.034.068	2.450.050.866	96
56.	Kecamatan Talaga	2.885.166.994	3.018.920.335	105
<b>TOTAL</b>		<b>3.749.184.962.959</b>	<b>2.954.606.637.994</b>	<b>92</b>

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023, TW 2.

Dari Tabel 2.1 di atas diketahui untuk jumlah pagu indikatif yang direncanakan di RKPD oleh tiap PD tidak ada yang sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBD ini dikarenakan total pagu yang direncanakan dalam RKPD hanya bisa direalisasikan dalam APBD sebesar 92 persen.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja untuk pagu Program dan Kegiatan termasuk interval  $91\% \leq 100\%$ , dengan kriteria **Sangat Tinggi**: menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang jumlah Program/Kegiatan di RKPD dibandingkan dengan Program/Kegiatan di APBD, maka jumlah Program/Kegiatan masing-masing PD dan Kecamatan dirinci seperti diuraikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2023 Triwulan II**

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Program	Kegiatan	Sub Keg	Program	Kegiatan	Sub Keg
1.	Dinas Pendidikan	3	12	86	2	11	104
2.	Dinas Kesehatan	5	22	83	5	22	83
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	2	3	3	2	3	4
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	2	3	4	2	3	4
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	19	63	7	19	63
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	16	34	10	16	34
7.	Badan Penanggulangan	2	10	37	2	10	37



No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Program	Kegiatan	Sub Keg	Program	Kegiatan	Sub Keg
	Bencana Daerah						
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	11	38	3	11	38
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	28	6	12	28
10.	Dinas Sosial	6	13	57	6	13	57
11.	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	18	38	10	18	39
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9	22	53	9	22	57
13.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11	24	51	11	25	53
14.	Dinas Lingkungan Hidup	9	15	36	10	16	39
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	36	5	15	36
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	35	5	10	35
17.	Dinas Perhubungan	2	16	47	2	16	47
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	44	5	13	44
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	30	6	11	31
20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	15	38	4	15	38
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	20	38	9	20	38
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	4	14	33	4	14	35
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	15	34	8	15	34
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	37	3	12	37
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	51	3	11	51
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5	19	62	5	19	62
27.	Badan Pendapatan Daerah	2	8	36	2	8	36
28.	Sekretariat Daerah	3	20	65	3	20	65



No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Program	Kegiatan	Sub Keg	Program	Kegiatan	Sub Keg
29.	Sekretariat DPRD	2	15	50	2	15	50
30.	Inspektorat	3	11	39	3	11	39
31.	Kecamatan Argapura	6	14	41	6	14	41
32.	Kecamatan Banjaran	6	14	40	6	14	41
33.	Kecamatan Bantarujeg	6	14	43	6	14	41
34.	Kecamatan Cigasong	6	15	46	6	14	41
35.	Kecamatan Cikijing	6	14	43	6	14	41
36.	Kecamatan Cingambul	6	14	43	6	14	41
37.	Kecamatan Dawuan	6	14	43	6	14	41
38.	Kecamatan Jatitujuh	6	14	43	6	14	41
39.	Kecamatan Jatiwangi	6	15	38	6	14	41
40.	Kecamatan Kadipaten	6	13	39	6	14	41
41.	Kecamatan Kasokandel	6	14	40	6	14	41
42.	Kecamatan Kertajati	6	14	43	6	14	41
43.	Kecamatan Lemahsugih	6	14	43	6	14	41
44.	Kecamatan Leuwimunding	6	14	43	6	14	41
45.	Kecamatan Ligung	6	14	43	6	14	41
46.	Kecamatan Maja	6	14	42	6	14	41
47.	Kecamatan Majalengka	6	16	47	6	14	41
48.	Kecamatan Malausma	6	14	43	6	14	41
49.	Kecamatan Palasah	6	14	43	6	14	41
50.	Kecamatan Panyingkiran	6	14	41	6	14	41
51.	Kecamatan Rajagaluh	6	14	43	6	14	41
52.	Kecamatan Sindang	6	14	43	6	14	41
53.	Kecamatan Sindangwangi	6	14	41	6	14	41
54.	Kecamatan Sukahaji	6	14	44	6	14	41
55.	Kecamatan Sumberjaya	6	14	41	6	14	41
56.	Kecamatan Talaga	6	15	44	6	14	41

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023, TW 2.

Dari tabel 2.2. di atas diketahui bahwa tingkat kesesuaian jumlah program dan kegiatan APBD terhadap RKPD untuk jumlah program mencapai 100%, sedangkan untuk jumlah kegiatan mencapai 99,61%. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja



untuk Pagu Program dan kegiatan termasuk interval 91-100%, dengan kriteria sangat tinggi: menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian sudah memenuhi target dan berada di atas pencapaian kinerja yang diharapkan.

Jika dibandingkan dengan jumlah total kegiatan yang ada dalam APBD sebesar 257 kegiatan, maka prosentase kegiatan yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2023 untuk kegiatannya mencapai 0,39%.

Jika dibandingkan dengan jumlah total sub kegiatan yang ada dalam APBD sebesar 735 sub kegiatan, maka prosentase sub kegiatan yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2023 untuk kegiatannya mencapai 4,76%.

Terdapatnya kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang tidak ada di RKPD disebabkan adanya pemutakhiran nomenklatur dalam SIPD dan penyesuaian terhadap pemanfaatan dana transfer (DAK dan Bankeu).

Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023, diperoleh rekapitulasi kegiatan APBD yang tidak ada di dalam RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Tidak Ada Dalam RKPD dan APBD Pada Setiap OPD Triwulan II Tahun 2023**

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Yang Ada Dalam RKPD Namun Tidak Ada Dalam APBD</b>	<b>Keterangan</b>
Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan
<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Yang Ada Dalam APBD Namun Tidak Ada Dalam RKPD</b>	<b>Keterangan</b>
Dinas Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Sub Kegiatan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sub Kegiatan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sub Kegiatan



	Pembangunan Laboratorium	Sub Kegiatan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Sub Kegiatan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Sub Kegiatan
	Pengadaan Mebel PAUD	Sub Kegiatan
	Pembangunan Laboratorium	Sub Kegiatan
	RSUD Cideres	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sub Kegiatan
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sub Kegiatan
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sub Kegiatan
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kegiatan
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Sub Kegiatan
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sub Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
	Pembinaan Perpustakaan Khusus	Sub Kegiatan





Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023, diperoleh Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2023 dirinci menurut PD dan Kecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dirinci Menurut Perangkat Daerah**

No.	Perangkat Daerah	Anggaran Parsial 3	Realisasi Triwulan II		
			Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)
	<b>PD</b>				
1.	Dinas Pendidikan	974.016.489.660	343.333.072.121	2	36
2.	Dinas Kesehatan	243.828.185.033	73.520.035.447	17	33
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	177.461.217.078	63.195.529.655	30	42
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	149.385.182.961	38.667.756.077	34	26
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	247.174.789.437	28.088.820.868	33	11
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	38.734.736.162	3.329.412.302	20	10
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.516.884.849	2.234.652.738	20	40
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.037.126.885	7.114.763.273	53	42
9.	Dinas Sosial	9.642.493.030	2.959.509.266	1	30
10.	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.276.722.423	2.897.930.592	22	6
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	22.800.366.173	7.813.544.790	27	34
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	55.358.570.719	16.174.731.638	125	57
13.	Dinas Lingkungan Hidup	26.009.796.498	7.270.082.337	49	40
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.147.555.490	5.213.154.699	50	57
15.	Dinas	26.298.104.414	6.924.131.693	78	26



No.	Perangkat Daerah	Anggaran Parsial 3	Realisasi Triwulan II		
			Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
16.	Dinas Perhubungan	40.905.027.985	10.603.969.014	31	26
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.605.132.305	2.899.331.009	28	25
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.503.627.229	2.447.876.380	47	37
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	23.376.317.915	8.311.334.576	38	34
20.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	6.790.647.037	2.202.660.336	38	33
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.542.464.948	3.340.279.242	29	40
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.691.774.743	3.860.121.569	28	37
23.	Sekretariat Daerah	65.074.003.798	22.031.109.986	44	32
24.	Sekretariat DPRD	67.864.790.858	29.687.295.993	33	44
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.194.471.259	4.532.834.590	49	40
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	502.430.963.002	287.591.307.230	28	57
27.	Badan Pendapatan Daerah	17.767.722.612	5.276.803.980	53	30
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.119.703.434	6.727.882.819	36	23
29.	Inspektorat	12.394.284.603	5.363.140.682	45	42
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.260.394.744	4.334.059.745	41	53
	<b>Kecamatan</b>				
31.	Kecamatan Argapura	3.006.712.912	1.331.430.571	34	44
32.	Kecamatan Banjaran	2.672.881.594	1.165.106.556	58	43
33.	Kecamatan Bantarujeg	2.544.308.651	1.128.724.297	36	45
34.	Kecamatan Cigasong	7.522.372.745	2.716.643.482	23	36
35.	Kecamatan Cikijing	2.599.674.337	1.093.873.106	43	42
36.	Kecamatan Cingambul	2.782.171.093	1.381.032.913	15	50
37.	Kecamatan Dawuan	3.027.937.745	1.244.413.494	5	41



No.	Perangkat Daerah	Anggaran Parsial 3	Realisasi Triwulan II		
			Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)
38.	Kecamatan Jatitujuh	2.946.151.313	1.313.986.349	28	45
39.	Kecamatan Jatiwangi	3.678.387.343	1.740.307.007	36	47
40.	Kecamatan Kadipaten	2.711.394.640	1.440.976.992	42	53
41.	Kecamatan Kasokandel	2.303.356.547	1.046.786.604	16	45
42.	Kecamatan Kertajati	2.938.095.188	1.348.817.623	43	46
43.	Kecamatan Lemahsugih	2.123.404.080	1.048.778.986	44	49
44.	Kecamatan Leuwimunding	2.676.508.313	1.062.512.332	16	40
45.	Kecamatan Ligung	3.387.865.988	1.446.497.522	35	43
46.	Kecamatan Maja	3.086.828.291	1.421.098.241	34	46
47.	Kecamatan Majalengka	18.273.818.719	5.989.579.368	57	31
48.	Kecamatan Malausma	2.732.476.020	1.183.918.449	48	44
49.	Kecamatan Palasah	2.667.127.441	1.030.067.149	26	29
50.	Kecamatan Panyingkiran	2.282.336.352	953.331.159	16	35
51.	Kecamatan Rajagaluh	3.272.554.996	1.442.400.245	41	44
52.	Kecamatan Sindang	2.773.793.272	1.124.424.341	56	41
53.	Kecamatan Sindangwangi	2.924.885.735	1.286.141.819	26	44
54.	Kecamatan Sukahaji	2.993.076.194	1.331.888.900	18	44
55.	Kecamatan Sumberjaya	2.450.050.866	1.011.503.016	36	41
56.	Kecamatan Talaga	3.018.920.335	1.248.684.192	40	41
<b>Total</b>		<b>2.954.606.637.994</b>	<b>1.046.480.695.360</b>	<b>36</b>	<b>38</b>

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023, TW 2.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat realisasi keuangan program dan kegiatan mencapai 38%, sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 36% apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja untuk program dan kegiatan termasuk interval <50%, dengan kriteria sangat rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, dan penghitungan interval ini merujuk pada target satu tahunan.



**Tabel 2.5.**  
**Capaian Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan ke-2 Tahun 2023**

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				(%)		
						K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	<b>1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		51.357,00	974.016.489.660	77	103.798.433.768	926	239.534.638.353	1.003,00	343.333.072.121	2	36	Dinas Pendidikan
3	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tercapainya APM PAUD, SD, SMP, dan APK Kesetaraan	50.734,00	495.996.154.700	0	160.000.000	720	71.819.590.630	720	71.979.590.630	1	15	Dinas Pendidikan
4	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		2.855,00	383.801.639.700	0	160.000.000	580	62.740.424.860	580	62.900.424.860	20	16	Dinas Pendidikan
5	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	1.680.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
6	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
7	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	5.670.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
8	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	86	29.038.369.550	0	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	1	Dinas Pendidikan
9	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	17	269.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
10	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	211	168.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
11	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktikum dan peraga siswa yang tersedia	230	15.625.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
12	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	100	1.131.086.950	0	0	25	179.973.440	25	179.973.440	25	16	Dinas Pendidikan
13	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah satuan pendidikan dasar yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	100	116.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
14	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	1.000,00	504.155.000	0	0	500	57.938.000	500	57.938.000	50	11	Dinas Pendidikan
15	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	100	220.562.259.000	0	0	30	62.452.513.420	30	62.452.513.420	30	28	Dinas Pendidikan
16	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
17	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	100	734.809.500	0	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	7	Dinas Pendidikan
18	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	671	107.055.869.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
19	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78	36.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
20	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	43	1.173.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
21	1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75	36.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>7,65</b>	<b>4</b>		
22	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.587,00	60.159.266.750	0	0	115	9.069.050.770	115	9.069.050.770	1	15	Dinas Pendidikan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
23	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	76	9.079.111.250	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
24	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
25	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	16.023,00	162.855.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
26	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	100	33.115.000	0	0	70	23.433.592	70	23.433.592	70	71	Dinas Pendidikan
27	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah iswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100	358.030.000	0	0	25	10.315.000	25	10.315.000	25	3	Dinas Pendidikan
28	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	752	2.077.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
29	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pembinaan	118	332.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
30	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	100	47.951.050.300	0	0	20	9.035.302.178	20	9.035.302.178	20	19	Dinas Pendidikan
31	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	118	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
32	1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>11,5</b>	<b>9</b>		
<b>33</b>	<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>29.816,00</b>	<b>38.563.433.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
34	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	1	1.620.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
35	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	10	643.387.450	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
36	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	35	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
37	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
38	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia	0	12.880.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
39	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	27.182,00	572.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
40	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	1.492,00	4.939.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
41	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	163	127.814.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
42	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	825	17.522.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
43	1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	100	17.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>44</b>	<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>476</b>	<b>13.471.815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>10.115.000</b>	<b>25</b>	<b>10.115.000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
45	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang tersedia	20	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
46	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	70	69.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
47	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan non Formal/Kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	20	14.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
48	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan non Formal/ Kesetaraan	130	312.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
49	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	100	12.845.450.000	0	0	25	10.115.000	25	10.115.000	25	0	Dinas Pendidikan
50	1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	36	45.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
51	1.01.02.2.04.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100	34.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>3,57</b>	<b>0</b>		
<b>52</b>	<b>01.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		<b>1.508.747,00</b>	<b>568.721.321.294</b>	<b>236.164,67</b>	<b>84.098.390.654</b>	<b>14.217,17</b>	<b>109.574.854.441</b>	<b>250.381,84</b>	<b>193.673.245.095</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka</b>
<b>53</b>	<b>01.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Prosentase Jumlah Sarana Prasarana Rumah Ssakit Sesuai Standar (ASPAK)</b>	<b>1.503.800,00</b>	<b>117.879.570.516</b>	<b>234.950,26</b>	<b>7.522.565.874</b>	<b>13.234,32</b>	<b>11.105.316.250</b>	<b>248.184,58</b>	<b>18.627.882.124</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka</b>
<b>54</b>	<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpenuhinya Sarana Prasana Kerja RSUD Cideres</b>	<b>207</b>	<b>60.698.881.707</b>	<b>34,26</b>	<b>7.345.869.874</b>	<b>91,32</b>	<b>8.250.000</b>	<b>125,58</b>	<b>7.354.119.874</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka</b>
55	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah sakit baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk minimal 1: 1000	3	34.529.600.593	1	7.345.869.874	0	0	1	7.345.869.874	50	11	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
56	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	102	21.292.051.988	6,26	0	66,32	0	72,58	0	57	0	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
57	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan vaksin yang disediakan	1	1.215.130.126	1	0	0	0	1	0	100	0	Dinas Kesehatan
58	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1	3.565.756.000	1	0	0	0	1	0	100	0	Dinas Kesehatan
59	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai ( BMHP ) Makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	100	96.343.000	25	0	25	8.250.000	50	8.250.000	50	9	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>71,4</b>	<b>4</b>		
<b>60</b>	<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ kota</b>	<b>1.503.541,00</b>	<b>56.975.458.809</b>	<b>234.903,00</b>	<b>136.296.000</b>	<b>13.127,00</b>	<b>11.074.199.800</b>	<b>248.030,00</b>	<b>11.210.495.800</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
61	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan BUMIL	13.400,00	69.320.000	3.870,00	0	3.870,00	0	7.740,00	0	58	0	Dinas Kesehatan
62	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	17.817,00	236.800.000	4.454,00	65.000.000	4.454,00	0	8.908,00	65.000.000	50	27	Dinas Kesehatan
63	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	10.087,00	0	1.635,00	0	0	0	1.635,00	0	16	0	Dinas Kesehatan
64	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19.268,00	0	6.370,00	0	0	0	6.370,00	0	33	0	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
65	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	18.924,00	0	4.731,00	0	0	0	4.731,00	0	25	0	Dinas Kesehatan
66	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	775.225,00	15.562.500	193.956,00	11.812.500	0	0	193.956,00	11.812.500	25	76	Dinas Kesehatan
67	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	62.653,00	10.400.000	11.101,00	0	0	0	11.101,00	0	18	0	Dinas Kesehatan
68	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	172.043,00	7.525.000	3.502,00	7.525.000	0	0	3.502,00	7.525.000	2	100	Dinas Kesehatan
69	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19.073,00	1.226.404.073	1.987,00	0	1.987,00	0	3.974,00	0	21	0	Dinas Kesehatan
70	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	6.052,00	22.825.000	764	2.700.000	0	0	764	2.700.000	13	12	Dinas Kesehatan
71	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Orang menderita Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	4.255,00	2.615.341.915	404	0	404	0	808	0	19	0	Dinas Kesehatan
72	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	3.825,00	570.000.000	956	0	956	250.000.000	1.912,00	250.000.000	50	44	Dinas Kesehatan
73	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	1.316,00	12.410.278.000	329	0	329	0	658	0	50	0	Dinas Kesehatan
74	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	1.525,00	530.648.000	381	0	381	2.375.000	762	2.375.000	50	0	Dinas Kesehatan
75	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya pelayanan promosi kesehatan	1.276,00	683.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
76	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan nMandiri dan Tridisional lainnya	100	36.475.000	25	0	25	8.125.000	50	8.125.000	50	22	Dinas Kesehatan
77	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terkelolanya surveilans kesehatan	13	39.320.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
78	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terkelolanya kesehatan khusus	1.357,00	29.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
79	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	1.469,00	794.916.800	367	0	367	0	734	0	50	0	Dinas Kesehatan
80	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	16	37.355.349.321	4	0	4	10.771.141.100	8	10.771.141.100	50	29	Dinas Kesehatan
81	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa ( KLB ) ke Laboratorium Rujukan / Nasional	54	14.000.000	25	8.600.000	0	0	25	8.600.000	46	61	Dinas Kesehatan
82	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/ Korta Sehat	2	50.000.000	0	0	1	2.975.000	1	2.975.000	50	6	Dinas Kesehatan
83	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	33	36.198.000	1	0	0	0	1	0	3	0	Dinas Kesehatan
84	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan ( Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal )	1.200,00	27.500.000	30	0	0	0	30	0	2	0	Dinas Kesehatan
85	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan respon wabah	1.436,00	63.500.000	10	33.750.000	349	6.159.900	359	39.909.900	25	63	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
86	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center ( PSC 119 ) tersedia, terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah sakitr dalam satu sistem Penanganan Gawat darurat terpadu ( SPGDT )	1	110.195.000	1	6.908.500	0	33.423.800	1	40.332.300	100	37	Dinas Kesehatan
87	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan di Intervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	371.121,00	19.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>29,85</b>	<b>18</b>		
<b>88</b>	<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Terseleenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>17</b>	<b>101.800.000</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
89	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	13	25.000.000	2	0	4	0	6	0	46	0	Dinas Kesehatan
90	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	76.800.000	1	0	1	0	2	0	50	0	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>48</b>	<b>0</b>		
<b>91</b>	<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya dokumen Peneritan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan fasilitas Kesehatan tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>35</b>	<b>103.430.000</b>	<b>10</b>	<b>40.400.000</b>	<b>11</b>	<b>22.866.450</b>	<b>21</b>	<b>63.266.450</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
92	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator nasional Mutui ( INM ) Pelayanan Kesehatan	33	82.200.000	10	40.400.000	10	21.600.000	20	62.000.000	61	75	Dinas Kesehatan
93	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kesehatan Rujukan	2	21.230.000	0	0	1	1.266.450	1	1.266.450	50	6	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>55,5</b>	<b>41</b>		
<b>94</b>	<b>01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Terpenuhinya Sumber Daya manusia Kesehatan</b>	<b>130</b>	<b>1.875.571.800</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
<b>95</b>	<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kab/ Kota</b>	<b>130</b>	<b>241.644.800</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
96	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang Terdistribusi	100	49.999,800	25	0	0	0	25	0	25	0	Dinas Kesehatan
97	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	30	191.645.000	25	0	0	0	25	0	83	0	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>54</b>	<b>0</b>		
<b>98</b>	<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>	<b>0</b>	<b>1.633.927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
99	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil dari Kegiatan Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia kesehatan	0	1.633.927.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>100</b>	<b>01.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Tersedianya Kesediaan Farmasi ,alat kesehatan dan Makan Minuman</b>	<b>212</b>	<b>419.736.000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
101	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Dokumen Perizin untuk Apotik , Toko Obat, Toko Alat kesehatan , Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT )	200	63.730.000	50	0	50	0	100	0	50	0	Dinas Kesehatan





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
102	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga.	200	63.730.000	50	0	50	0	100	0	50	0	Dinas Kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	0	
103	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
104	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terseleenggaranya Penerbitan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	12	356.006.000	3	0	3	0	6	0	50	0	Dinas Kesehatan
105	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Tindak lanjut Pengawasan, Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	12	356.006.000	3	0	3	0	6	0	50	0	Dinas Kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	0	
106	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
107	01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.081,00	989.104.000	257	0	0	0	257	0	24	0	Dinas Kesehatan
108	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota	12	104.860.000	3	0	0	0	3	0	25	0	Dinas Kesehatan
109	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	104.860.000	3	0	0	0	3	0	25	0	Dinas Kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												25	0	
110	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota	13	0	4	0	0	0	4	0	31	0	Dinas Kesehatan
111	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	13	0	4	0	0	0	4	0	31	0	Dinas Kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												31	0	
112	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) Tingkat Kab/ Kota	1.056,00	884.244.000	250	0	0	0	250	0	24	0	Dinas Kesehatan
113	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM )	1.056,00	884.244.000	250	0	0	0	250	0	24	0	Dinas Kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												24	0	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
114	01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.919,00	262.576.496.157	802	14.575.013.366	749	11.619.975.998	1.551,00	26.194.989.364	17	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup
115	01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		2.065,00	42.239.062.710	339	4.186.119.977	359	3.514.360.150	698	7.700.480.127	34	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
116	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		26	3.899.829.380	1	79.368.000	1	77.780.000	2	157.148.000	8	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
117	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
118	1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	10	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
119	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang direhabilitasi	5	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
120	1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Peningkatan Sumber Mata Air	5	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
121	1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan bangunan ukur	4	299.829.380	1	79.368.000	1	77.780.000	2	157.148.000	50	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>10</b>	<b>10</b>	
122	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.039,00	38.339.233.330	338	4.106.751.977	358	3.436.580.150	696	7.543.332.127	34	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
123	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	74	25.760.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
124	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi (D.I) yang dilaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	388	8.218.420.000	88	2.424.000.000	88	2.424.000.000	176	4.848.000.000	45	59	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
125	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan operasi dan pemeliharaan irigasi.	1.576,00	4.335.463.430	250	1.682.751.977	270	1.012.580.150	520	2.695.332.127	33	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
126	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terkelolanya air irigasi	1	25.349.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>19,5</b>	<b>30</b>	
127	01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100	16.412.328.000	5	5.246.000	11	8.112.000	16	13.358.000	16	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
128	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA SARANA AIR BERSIH	100	16.412.328.000	5	5.246.000	11	8.112.000	16	13.358.000	16	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
129	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlayannya sarana air bersih	100	16.412.328.000	5	5.246.000	11	8.112.000	16	13.358.000	16	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>16</b>	<b>0</b>	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
130	01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1.002,00	7.877.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
131	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.002,00	7.877.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
132	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000,00	2.640.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
133	1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2	5.237.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
134	01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERLAYANINYA AIR LIMBAH	200	1.368.904.000	10	5.246.000	20	8.112.000	30	13.358.000	15	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
135	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA AIR LIMBAH	200	1.368.904.000	10	5.246.000	20	8.112.000	30	13.358.000	15	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
136	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya air limbah	100	228.364.000	5	5.246.000	13	8.112.000	18	13.358.000	18	6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
137	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya air limbah	100	1.140.540.000	5	0	7	0	12	0	12	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												15	3	
138	01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERLAYANINYA SARANA DRAINASE	100	150.000.000	5	0	19	0	24	0	24	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
139	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA SARANA DRAINASE	100	150.000.000	5	0	19	0	24	0	24	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
140	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terlayannya sarana drainase	100	150.000.000	5	0	19	0	24	0	24	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												24	0	
141	01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		100	2.614.600.000	5	10.407.000	23	16.224.000	28	26.631.000	28	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
142	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	TEREHABNYA JALAN LINGKUNGAN	100	2.614.600.000	5	10.407.000	23	16.224.000	28	26.631.000	28	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
143	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terehabnya jalan lingkungan	100	2.614.600.000	5	10.407.000	23	16.224.000	28	26.631.000	28	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												28	1	
144	01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		49	490.600.000	3	76.625.000	4	22.004.920	7	98.629.920	14	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
145	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		49	490.600.000	3	76.625.000	4	22.004.920	7	98.629.920	14	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
146	1.03.08.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	8	654.170.000	0	153.250.000	2	6.986.000	2	160.236.000	25	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
147	1.03.08.2.01.02	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
148	1.03.08.2.01.04	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	70	127.030.000	6	0	6	37.023.840	12	37.023.840	17	29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>14</b>	<b>18</b>	
<b>149</b>	<b>01.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>1.379,00</b>	<b>159.279.230.770</b>	<b>100</b>	<b>3.291.268.500</b>	<b>201</b>	<b>2.610.648.400</b>	<b>301</b>	<b>5.901.916.900</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>
<b>150</b>	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>1.379,00</b>	<b>159.279.230.770</b>	<b>100</b>	<b>3.291.268.500</b>	<b>201</b>	<b>2.610.648.400</b>	<b>301</b>	<b>5.901.916.900</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>
151	1.03.10.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4	400.000.000	0	0	2	219.164.000	2	219.164.000	50	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
152	1.03.10.2.01.04	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	56	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
153	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	155	89.073.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
154	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	125	51.820.170.620	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
155	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	919	10.885.128.150	100	3.291.268.500	200	2.501.066.400	300	5.792.334.900	33	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
156	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	80	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
157	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	70	3.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>11,86</b>	<b>15</b>	
<b>158</b>	<b>01.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>313</b>	<b>436.680.000</b>	<b>30</b>	<b>40.780.400</b>	<b>41</b>	<b>57.130.250</b>	<b>71</b>	<b>97.910.650</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>
<b>159</b>	<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>		<b>150</b>	<b>309.640.000</b>	<b>15</b>	<b>23.530.400</b>	<b>20</b>	<b>23.612.250</b>	<b>35</b>	<b>47.142.650</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>
160	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	109.640.000	15	23.530.400	20	23.612.250	35	47.142.650	70	43	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
161	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											35	22		
162	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		13	65.000.000	0	0	6	11.655.000	6	11.655.000	46	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
163	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	12	15.000.000	0	0	6	11.655.000	6	11.655.000	50	78	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
164	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											25	39		
165	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		50	62.040.000	15	17.250.000	15	21.863.000	30	39.113.000	60	63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
166	1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50	62.040.000	15	17.250.000	15	21.863.000	30	39.113.000	60	63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											60	63		
167	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
168	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0	0		
169	01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		13	500.000.000	3	24.978.200	0	0	3	24.978.200	23	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
170	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		6	387.270.000	2	17.246.000	0	0	2	17.246.000	33	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
171	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	153.712.500	1	12.489.100	0	0	1	12.489.100	100	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
172	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	5	233.557.500	1	4.756.900	0	0	1	4.756.900	20	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											60	5		
173	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		6	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
174	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	6	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0	0		
175	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1	12.730.000	1	7.732.200	0	0	1	7.732.200	100	61	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
176	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	12.730.000	1	7.732.200	0	0	1	7.732.200	100	61	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100	61		
177	01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		2.700,00	38.734.736.162	132	1.055.761.541	414	2.180.977.361	546	3.236.738.902	20	30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp						
															Pertanahan
178	01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		200	0	2	0	16	0	18	0	9	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
179	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	TERPENUHINYA INFORMASI PERUMAHAN	100	0	1	0	7	0	8	0	8	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
180	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terpenuhinya informasi perumahan	100	0	1	0	7	0	8	0	8	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												8	0		
181	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	TERPENUHINYA INFORMASI PERUMAHAN	100	0	1	0	9	0	10	0	10	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
182	1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Terpenuhinya informasi perumahan	100	0	1	0	9	0	10	0	10	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												10	0		
183	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100	467.320.000	1	0	11	0	12	0	12	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
184	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		100	467.320.000	1	0	11	0	12	0	12	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
185	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen perencanaan	100	467.320.000	1	0	11	0	12	0	12	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												12	0		
186	01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	TERLAYANINYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100	2.104.750.000	3	20.814.000	9	54.548.000	12	75.362.000	12	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
187	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100	2.104.750.000	3	20.814.000	9	54.548.000	12	75.362.000	12	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
188	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlayaninya rumah tidak layak huni	100	2.104.750.000	3	20.814.000	9	54.548.000	12	75.362.000	12	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												12	4		
189	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	TERLAYANINYA SARANA PRASARANA UTILITAS	200	579.407.800	2	10.407.000	51	147.448.800	53	157.855.800	26	27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
190	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		200	579.407.800	2	10.407.000	51	147.448.800	53	157.855.800	26	27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
191	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlayannya sarana dan prasarana utilitas	100	163.319.800	1	0	30	131.224.800	31	131.224.800	31	80	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
192	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlayannya sarana dan prasarana utilitas	100	416.088.000	1	10.407.000	21	16.224.000	22	26.631.000	22	6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>26,5</b>	<b>43</b>	
<b>193</b>	<b>01.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		<b>45.140,00</b>	<b>22.554.011.734</b>	<b>247,95</b>	<b>2.990.976.040</b>	<b>9.259,35</b>	<b>6.439.761.741</b>	<b>9.507,30</b>	<b>9.430.737.781</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
194	01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan	247	8.591.996.653	60	1.099.249.000	83	2.550.500.600	143	3.649.749.600	58	42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
195	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani	233	7.322.090.600	57	1.099.249.000	81	2.522.727.700	138	3.621.976.700	59	49	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
196	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4	6.738.595.300	1	935.924.000	1	2.365.907.200	2	3.301.831.200	50	49	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
197	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
198	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditinggalkan Kapasitasnya	227	566.695.500	56	163.325.000	80	156.820.500	136	320.145.500	60	56	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
199	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kementrian dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	16.799.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>27,5</b>	<b>26</b>	
200	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	14	1.269.906.053	3	0	2	27.772.900	5	27.772.900	36	2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
201	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	2	458.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
202	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	343.526.000	1	0	1	2.697.900	2	2.697.900	33	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
203	1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6	468.230.053	2	0	1	25.075.000	3	25.075.000	50	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>27,67</b>	<b>2</b>	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
204	01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase tanggap bencana	44.604,00	1.212.708.000	153	206.856.000	9.114,00	462.612.000	9.267,00	669.468.000	21	55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
205	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200	10.000.000	0	0	14	700.000	14	700.000	7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
206	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200	10.000.000	0	0	14	700.000	14	700.000	7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												7	7	
207	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tertanganinya Penanggulangan Bencana	923	1.152.708.000	153	206.856.000	404	419.112.000	557	625.968.000	60	54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
208	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200	15.000.000	0	0	200	5.400.000	200	5.400.000	100	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	723	1.137.708.000	153	206.856.000	204	413.712.000	357	620.568.000	49	55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												74,5	46	
210	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Kejadian dan Korban dalam Penanggulangan Bencana	43.480,00	25.000.000	0	0	8.695,00	17.800.000	8.695,00	17.800.000	20	71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
211	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	42.652,00	12.500.000	0	0	8.602,00	10.000.000	8.602,00	10.000.000	20	80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
212	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	828	12.500.000	0	0	93	7.800.000	93	7.800.000	11	62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												15,5	71	
213	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertanganinya Penanggulangan Bencana	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
214	1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100	100	
215	01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	60	745.945.738	6	59.460.000	23	289.375.790	29	348.835.790	48	47	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
216	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani dan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran yang Terpelihara	55	672.577.188	5	0	23	289.375.090	28	289.375.090	51	43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
217	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	50	672.577.188	5	0	23	289.375.090	28	289.375.090	56	43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
218	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Saran dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>28</b>	<b>22</b>	
<b>219</b>	<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Kelayakan Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>1</b>	<b>13.907.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>
220	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Kingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	13.907.850	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>221</b>	<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam penanganan dini dalam bahaya kebakaran</b>	<b>4</b>	<b>59.460.700</b>	<b>1</b>	<b>59.460.000</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>59.460.700</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>
222	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	4	59.460.700	1	59.460.000	0	700	1	59.460.700	25	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>25</b>	<b>100</b>	
<b>223</b>	<b>01.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		<b>181.183,00</b>	<b>9.642.493.030</b>	<b>158</b>	<b>1.008.795.202</b>	<b>947</b>	<b>1.950.714.064</b>	<b>1.105,00</b>	<b>2.959.509.266</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>224</b>	<b>01.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>320</b>	<b>1.183.600.000</b>	<b>16</b>	<b>52.000.000</b>	<b>26</b>	<b>78.600.000</b>	<b>42</b>	<b>130.600.000</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>225</b>	<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>320</b>	<b>1.183.600.000</b>	<b>16</b>	<b>52.000.000</b>	<b>26</b>	<b>78.600.000</b>	<b>42</b>	<b>130.600.000</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>Dinas Sosial</b>
226	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja Sosial yang meningkat kemampuannya dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	21.600.000	0	0	2	600.000	2	600.000	2	3	Dinas Sosial
227	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang meningkatkan kemampuannya dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	317.950.000	16	52.000.000	24	78.000.000	40	130.000.000	40	41	Dinas Sosial
228	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	844.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
229	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>10,5</b>	<b>11</b>	
<b>230</b>	<b>01.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Tertanganinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut usia terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis</b>	<b>10.575,00</b>	<b>1.145.164.000</b>	<b>1</b>	<b>4.056.000</b>	<b>1</b>	<b>11.484.000</b>	<b>2</b>	<b>15.540.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>231</b>	<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>10.575,00</b>	<b>1.145.164.000</b>	<b>1</b>	<b>4.056.000</b>	<b>1</b>	<b>11.484.000</b>	<b>2</b>	<b>15.540.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dinas Sosial</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
232	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	995.164.000	1	4.056.000	1	11.484.000	2	15.540.000	2	2	Dinas Sosial
233	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
234	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
235	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0,5</b>	<b>1</b>	
<b>236</b>	<b>01.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Tertanganinya Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>167.164,00</b>	<b>985.784.000</b>	<b>32</b>	<b>154.536.000</b>	<b>155</b>	<b>258.372.000</b>	<b>187</b>	<b>412.908.000</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>237</b>	<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Tingkat Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>300</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>Dinas Sosial</b>
238	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Penelusuran Keluarga Bagi PMKS (Anak terlantar, orang terlantar)	100	15.000.000	0	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	100	Dinas Sosial
239	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
240	1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>33,33</b>	<b>33</b>	
<b>241</b>	<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>166.864,00</b>	<b>935.784.000</b>	<b>32</b>	<b>154.536.000</b>	<b>55</b>	<b>243.372.000</b>	<b>87</b>	<b>397.908.000</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>Dinas Sosial</b>
242	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100	158.184.000	15	24.336.000	30	48.672.000	45	73.008.000	45	46	Dinas Sosial
243	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	777.600.000	17	130.200.000	25	194.700.000	42	324.900.000	42	42	Dinas Sosial
244	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	166.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>29</b>	<b>29</b>	
<b>245</b>	<b>01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Jumlah Korban Bencana yang tertangani</b>	<b>424</b>	<b>1.035.852.000</b>	<b>31</b>	<b>142.056.000</b>	<b>102</b>	<b>265.612.000</b>	<b>133</b>	<b>407.668.000</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>246</b>	<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>320</b>	<b>195.852.000</b>	<b>15</b>	<b>4.056.000</b>	<b>79</b>	<b>64.612.000</b>	<b>94</b>	<b>68.668.000</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>Dinas Sosial</b>
247	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Buffer stok Permakanan bagi korban bencana	100	114.488.000	0	0	49	56.500.000	49	56.500.000	49	49	Dinas Sosial
248	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Buffer stok sandang bagi korban bencana	100	26.364.000	15	4.056.000	30	8.112.000	45	12.168.000	45	46	Dinas Sosial
249	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
250	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>23,5</b>	<b>24</b>	
<b>251</b>	<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>104</b>	<b>840.000.000</b>	<b>16</b>	<b>138.000.000</b>	<b>23</b>	<b>201.000.000</b>	<b>39</b>	<b>339.000.000</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>Dinas Sosial</b>
252	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	adanya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
253	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	840.000.000	16	138.000.000	23	201.000.000	39	339.000.000	39	40	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>19,5</b>	<b>20</b>	
254	01.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Terkelolanya Taman Makam Pahlawan</b>	<b>200</b>	<b>90.132.300</b>	<b>23</b>	<b>12.168.000</b>	<b>55</b>	<b>24.336.000</b>	<b>78</b>	<b>36.504.000</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	Dinas Sosial
255	1.06.07.2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>200</b>	<b>90.132.300</b>	<b>23</b>	<b>12.168.000</b>	<b>55</b>	<b>24.336.000</b>	<b>78</b>	<b>36.504.000</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	Dinas Sosial
256	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Tugu Juang Sindangkasih	100	63.768.300	8	8.112.000	25	16.224.000	33	24.336.000	33	38	Dinas Sosial
257	1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Pengamanan di lingkungan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Tugu Juang Sindangkasih	100	26.364.000	15	4.056.000	30	8.112.000	45	12.168.000	45	46	Dinas Sosial
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>39</b>	<b>42</b>	
<b>258</b>	<b>2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
259	02.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		17.306,00	39.927.856.123	1.166,00	532.172.407	2.603,00	1.817.668.715	3.769,00	2.349.841.122	22	6	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
260	02.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>	<b>635</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
261	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Fasilitasi kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	635	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
262	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	635	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
263	02.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan</b>	<b>16.440,00</b>	<b>23.698.511.359</b>	<b>1.150,00</b>	<b>36.504.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>54.756.000</b>	<b>3.650,00</b>	<b>91.260.000</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
264	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja sementara yang terserap dan terciptanya wirausaha baru	11.400,00	23.397.365.359	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
265	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	11.400,00	23.397.365.359	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
266	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5.000,00	301.146.000	1.150,00	36.504.000	2.500,00	54.756.000	3.650,00	91.260.000	73	30	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
267	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5.000,00	301.146.000	1.150,00	36.504.000	2.500,00	54.756.000	3.650,00	91.260.000	73	30	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>73</b>	<b>30</b>	
268	2.07.04.2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah</b>	<b>Peningkatan keahlian dan keterampilan usaha PMI purna penempatan</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas Ketenagakerjaan,



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
		Kabupaten/Kota												Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
269	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
270	02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya angka perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	31	105.639.300	0	0	20	7.042.800	20	7.042.800	65	7	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
271	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengesahan peraturan dan pendaftaran perjanjian bersama	20	7.847.600	0	0	20	7.042.800	20	7.042.800	100	90	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
272	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	7.847.600	0	0	20	7.042.800	20	7.042.800	100	90	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100	90	
273	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	11	97.791.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
274	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	10	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
275	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	77.791.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
276	02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.438,00	5.869.676.173	37	716.555.225	430	1.625.929.515	467	2.342.484.740	32	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
277	02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	300.000.000	0	0	83	250.000.000	83	250.000.000	83	83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
278	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100	300.000.000	0	0	83	250.000.000	83	250.000.000	83	83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
279	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	300.000.000	0	0	83	250.000.000	83	250.000.000	83	83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												83	83	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
280	02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		102	75.000.000	0	0	55	16.340.000	55	16.340.000	54	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
281	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		2	50.000.000	0	0	10	5.177.500	10	5.177.500	500	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
282	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	50.000.000	0	0	10	5.177.500	10	5.177.500	500	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												500	10	
283	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100	25.000.000	0	0	45	11.162.500	45	11.162.500	45	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
284	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Masyarakat/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	25.000.000	0	0	45	11.162.500	45	11.162.500	45	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												45	45	
285	02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		12	510.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
286	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12	510.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
287	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	510.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
288	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100	50.000.000	0	0	25	12.807.500	25	12.807.500	25	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
289	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100	50.000.000	0	0	25	12.807.500	25	12.807.500	25	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
290	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50.000.000	0	0	25	12.807.500	25	12.807.500	25	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>25</b>	<b>26</b>	
291	02.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		100	75.000.000	0	0	27	20.550.000	27	20.550.000	27	27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
292	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
293	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	75.000.000	0	0	27	20.550.000	27	20.550.000	27	27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
294	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	75.000.000	0	0	27	20.550.000	27	20.550.000	27	27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>27</b>	<b>27</b>	
295	02.09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		570	26.615.363.519	34	5.221.185.086	679,14	9.911.239.902	713,14	15.132.424.988	125	57	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
296	02.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		23	147.500.000	0	0	146	11.250.000	146	11.250.000	635	8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
297	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		1	5.000.000	0	0	67	3.350.000	67	3.350.000	6.700,00	67	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
298	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya data stok ketersediaan dan pasokan pangan (1 dokumen); Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (1 dokumen)	1	5.000.000	0	0	67	3.350.000	67	3.350.000	6.700,00	67	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>6.700,00</b>	<b>67</b>	
299	2.09.03.2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>		21	42.500.000	0	0	79	7.900.000	79	7.900.000	376	19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
300	2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dalam rangka pengendalian cadangan pangan masyarakat (26 Kecamatan); Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota (1 laporan)	1	10.000.000	0	0	79	7.900.000	79	7.900.000	7.900,00	79	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
301	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terjaminnya ketersediaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten (12 bulan); Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (10 ton)	20	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>3.950,00</b>	<b>40</b>	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
302	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
303	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya target konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan (100 persen); Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (1 laporan)	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
304	02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		101	38.000.000	5	175.000	0	0	5	175.000	5	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
305	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
306	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya data laporan kerentanan dan ketahanan (1 dokumen); Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (1 dokumen)	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
307	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	30.500.000	5	175.000	0	0	5	175.000	5	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
308	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Demapan) (4 desa); Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Demapan) (4 desa) yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	30.500.000	5	175.000	0	0	5	175.000	5	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												5	1	
309	02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100	7.226.493.759	3	10.492.000	13	28.834.400	16	39.326.400	16	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
310	02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	TERLAYANINYA GANTI RUGI TANAH	100	7.226.493.759	3	10.492.000	13	28.834.400	16	39.326.400	16	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
311	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	7.226.493.759	3	10.492.000	13	28.834.400	16	39.326.400	16	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
312	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya ganti rugi tanah	100	7.226.493.759	3	10.492.000	13	28.834.400	16	39.326.400	16	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												16	1	
313	02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		32.758,00	18.131.856.498	7.320,00	2.550.227.596	8.957,00	4.719.854.741	16.277,00	7.270.082.337	50	40	Dinas Lingkungan Hidup
314	02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	1	75.000.000	0	0	1	74.814.000	1	74.814.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
315	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	75.000.000	0	0	1	74.814.000	1	74.814.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
316	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	75.000.000	0	0	1	74.814.000	1	74.814.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100	100	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
317	02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	4	1.738.300.000	0	9.860.000	0	15.300.000	0	25.160.000	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
318	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	1.738.300.000	0	9.860.000	0	15.300.000	0	25.160.000	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
319	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	238.300.000	0	9.860.000	0	15.300.000	0	25.160.000	0	11	Dinas Lingkungan Hidup
320	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	6	
321	02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	8	1.416.496.438	2	244.439.300	2	521.076.516	4	765.515.816	50	54	Dinas Lingkungan Hidup
322	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Majalengka	8	1.416.496.438	2	244.439.300	2	521.076.516	4	765.515.816	50	54	Dinas Lingkungan Hidup
323	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	1.416.496.438	2	244.439.300	2	521.076.516	4	765.515.816	50	54	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	54	
324	02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		1	275.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
325	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		1	275.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
326	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	275.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
327	02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
328	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
329	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
330	02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	1	99.567.000	1	99.567.000	0	0	1	99.567.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
331	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1	99.567.000	1	99.567.000	0	0	1	99.567.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
332	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	99.567.000	1	99.567.000	0	0	1	99.567.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>100</b>	<b>100</b>	
333	02.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
334	2.11.10.2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
335	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
336	02.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase sampah yang dikelola</b>	<b>29.226,00</b>	<b>5.510.957.000</b>	<b>7.283,00</b>	<b>811.114.000</b>	<b>7.283,00</b>	<b>1.578.855.300</b>	<b>14.566,00</b>	<b>2.389.969.300</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
337	2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah</b>	<b>29.226,00</b>	<b>5.510.957.000</b>	<b>7.283,00</b>	<b>811.114.000</b>	<b>7.283,00</b>	<b>1.578.855.300</b>	<b>14.566,00</b>	<b>2.389.969.300</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
338	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2	1.051.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
339	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	29.200,00	4.368.957.000	7.280,00	765.514.000	7.280,00	1.578.855.300	14.560,00	2.344.369.300	50	54	Dinas Lingkungan Hidup
340	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	24	90.100.000	3	45.600.000	3	0	6	45.600.000	25	51	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>25</b>	<b>35</b>	
341	02.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>240.538,00</b>	<b>9.147.555.490</b>	<b>60.053,00</b>	<b>968.761.791</b>	<b>60.312,00</b>	<b>4.244.392.908</b>	<b>120.365,00</b>	<b>5.213.154.699</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
342	02.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>240.004,00</b>	<b>15.200.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
343	2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>240.002,00</b>	<b>15.200.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
344	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
345	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	240.000,00	7.300.000	60.000,00	0	60.000,00	0	120.000,00	0	50	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>25</b>	<b>0</b>	
346	2.12.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
347	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
348	02.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>6</b>	<b>14.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
349	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		6	14.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
350	2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	5	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
351	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
352	02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		5	26.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
353	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		1	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
354	2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
355	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
356	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
357	02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		2	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
358	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		2	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
359	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
360	02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.425,00	26.298.104.414	6	1.701.008.756	1.106,00	5.223.122.937	1.112,00	6.924.131.693	78	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
361	02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	12.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
362	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	0	12.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
363	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah sarana dan prasarana desa	0	12.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
364	02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Pelaksana MoU yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga	8	3.149.999.900	0	0	3	1.940.866.200	3	1.940.866.200	38	62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp						
															Desa
365	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Meningkatnya Partisipasi Swadaya Masyarakat	8	3.149.999.900	0	0	3	1.940.866.200	3	1.940.866.200	38	62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
366	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8	3.149.999.900	0	0	3	1.940.866.200	3	1.940.866.200	38	62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38</b>	<b>62</b>		
367	02.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Menyusun Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>884</b>	<b>4.146.210.400</b>	<b>0</b>	<b>966.188.648</b>	<b>724</b>	<b>1.239.893.936</b>	<b>724</b>	<b>2.206.082.584</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
368	2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan Desa dan APBDes</b>	<b>884</b>	<b>4.146.210.400</b>	<b>0</b>	<b>966.188.648</b>	<b>724</b>	<b>1.239.893.936</b>	<b>724</b>	<b>2.206.082.584</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
369	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330	48.600.400	0	0	330	31.600.400	330	31.600.400	100	65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
370	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	330	3.184.040.000	0	966.188.648	330	979.184.056	330	1.945.372.704	100	61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
371	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	160	195.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
372	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	64	717.670.000	0	0	64	229.109.480	64	229.109.480	100	32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>75</b>	<b>40</b>		
373	02.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa</b>	<b>369</b>	<b>850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>500.000.000</b>	<b>330</b>	<b>500.000.000</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
374	2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>369</b>	<b>850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>500.000.000</b>	<b>330</b>	<b>500.000.000</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
375	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
376	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	343	600.000.000	0	0	330	500.000.000	330	500.000.000	96	83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>48</b>	<b>42</b>		
377	02.14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>1.900,00</b>	<b>16.930.690.000</b>	<b>1</b>	<b>182.750.000</b>	<b>436</b>	<b>5.288.310.050</b>	<b>437</b>	<b>5.471.060.050</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	



No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
378	02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		300	542.400.000	0	0	85	168.400.000	85	168.400.000	28	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
379	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		300	542.400.000	0	0	85	168.400.000	85	168.400.000	28	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
380	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100	64.200.000	0	0	21	13.500.000	21	13.500.000	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
381	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	322.200.000	0	0	31	102.900.000	31	102.900.000	31	32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
382	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	156.000.000	0	0	33	52.000.000	33	52.000.000	33	33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>28,33</b>	<b>29</b>	
383	02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1.400,00	9.671.290.000	1	182.750.000	311	2.580.990.050	312	2.763.740.050	22	29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
384	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		500	1.378.300.000	0	0	153	467.085.000	153	467.085.000	31	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
385	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	120.000.000	0	0	16	20.195.000	16	20.195.000	16	17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
386	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	150.000.000	0	0	79	119.875.000	79	119.875.000	79	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
387	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	338.000.000	0	0	22	76.700.000	22	76.700.000	22	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
388	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100	690.300.000	0	0	36	250.315.000	36	250.315.000	36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
389	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>30,6</b>	<b>31</b>	
<b>390</b>	<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>200</b>	<b>1.162.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>232.400.000</b>	<b>40</b>	<b>232.400.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>
391	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	476.000.000	0	0	20	95.200.000	20	95.200.000	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
392	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	686.000.000	0	0	20	137.200.000	20	137.200.000	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>393</b>	<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>400</b>	<b>4.248.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>608.230.050</b>	<b>25</b>	<b>608.230.050</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>
394	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	85.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
395	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	2.496.139.000	0	0	25	608.230.050	25	608.230.050	25	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
396	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	1.622.826.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
397	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	umlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	44.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>6,25</b>	<b>6</b>	
<b>398</b>	<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>300</b>	<b>2.882.425.000</b>	<b>1</b>	<b>182.750.000</b>	<b>93</b>	<b>1.273.275.000</b>	<b>94</b>	<b>1.456.025.000</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
399	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	1.617.925.000	1	182.750.000	78	1.080.900.000	79	1.263.650.000	79	78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
400	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
401	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100	1.255.500.000	0	0	15	192.375.000	15	192.375.000	15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>31,33</b>	<b>31</b>		
<b>402</b>	<b>02.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>200</b>	<b>6.717.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2.538.920.000</b>	<b>40</b>	<b>2.538.920.000</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>
<b>403</b>	<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>200</b>	<b>6.717.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2.538.920.000</b>	<b>40</b>	<b>2.538.920.000</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>
404	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	360.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
405	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	6.357.000.000	0	0	40	2.538.920.000	40	2.538.920.000	40	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>20</b>	<b>20</b>		
<b>406</b>	<b>02.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		<b>1.073,00</b>	<b>40.623.697.812</b>	<b>140,02</b>	<b>3.985.245.973</b>	<b>189,78</b>	<b>6.575.476.888</b>	<b>329,8</b>	<b>10.560.722.861</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
<b>407</b>	<b>02.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>808</b>	<b>26.100.218.704</b>	<b>93,92</b>	<b>1.689.091.699</b>	<b>132,55</b>	<b>2.506.824.813</b>	<b>226,47</b>	<b>4.195.916.512</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
<b>408</b>	<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terbangun / Terpasang</b>	<b>304</b>	<b>23.500.741.995</b>	<b>50</b>	<b>1.386.399.699</b>	<b>104,87</b>	<b>1.729.012.621</b>	<b>154,87</b>	<b>3.115.412.320</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
409	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya Alat Penerangan Jalan (APJ) / Penerangan Jalan Umum (PJU)	100	20.140.250.000	0	0	0,54	109.263.000	0,54	109.263.000	1	1	Dinas Perhubungan
410	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya Perlengkapan Jalan	4	150.000.000	0	0	0,33	49.984.000	0,33	49.984.000	8	33	Dinas Perhubungan
411	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Jaringan Listrik PJU	100	3.038.966.995	45	1.378.287.699	49	1.475.007.968	94	2.853.295.667	94	94	Dinas Perhubungan
412	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terpeliharanya Perengkapan Jalan	100	171.525.000	5	8.112.000	55	94.757.653	60	102.869.653	60	60	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>40,75</b>	<b>47</b>		
<b>413</b>	<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Berfungsi</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
414	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
415	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Diterbitkan	100	168.111.000	10	16.224.000	19	32.448.000	29	48.672.000	29	29	Dinas Perhubungan
416	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan terhadap Juru Parkir dan terpenuhinya standar pelayanan minimum pada lokasi parkir	100	168.111.000	10	16.224.000	19	32.448.000	29	48.672.000	29	29	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>29</b>	<b>29</b>	
417	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji	101	739.548.000	33,06	128.392.000	8,22	125.523.192	41,28	253.915.192	41	34	Dinas Perhubungan
418	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji elektronik tersedianya bukti prauji cek fisik kendaraan	100	300.000.000	33	100.000.000	8	24.975.000	41	124.975.000	41	42	Dinas Perhubungan
419	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kalibrasi Alat Uji, terpeliharanya alat uji, terpeliharanya SIM PKB	1	439.548.000	0,06	28.392.000	0,22	100.548.192	0,28	128.940.192	28	29	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>34,5</b>	<b>36</b>	
420	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	2	1.396.229.000	0,86	158.076.000	0,46	619.841.000	1,32	777.917.000	66	56	Dinas Perhubungan
421	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka	1	41.995.000	0,77	32.340.000	0	0	0,77	32.340.000	77	77	Dinas Perhubungan
422	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan lalu lintas	1	1.354.234.000	0,09	125.736.000	0,46	619.841.000	0,55	745.577.000	55	55	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>66</b>	<b>66</b>	
423	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
424	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Penilaian Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
425	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	44.588.709	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
426	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi berkemampuan yang bersertifikat dan Pelajar SLTA sebagai pelopor berlalulintas	100	44.588.709	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
427	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	100	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
428	2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	100	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
429	02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		701	6.591.482.305	43	1.011.126.505	171	637.059.466	214	1.648.185.971	31	25	Dinas Komunikasi dan Informatika
430	02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota "	20	296.820.000	1	20.280.000	11	134.500.665	12	154.780.665	60	52	Dinas Komunikasi dan Informatika
431	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	20	296.820.000	1	20.280.000	11	134.500.665	12	154.780.665	60	52	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
432	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	105.456.000	0	16.224.000	4	32.448.000	4	48.672.000	67	46	Dinas Komunikasi dan Informatika
433	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	26.364.000	1	4.056.000	0	8.112.000	1	12.168.000	25	46	Dinas Komunikasi dan Informatika
434	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	65.000.000	0	0	4	64.801.165	4	64.801.165	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
435	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Layanan Hubungan Media	6	100.000.000	0	0	3	29.139.500	3	29.139.500	50	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>60,5</b>	<b>55</b>		
<b>436</b>	<b>02.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>46</b>	<b>454.912.000</b>	<b>5</b>	<b>84.448.000</b>	<b>14</b>	<b>126.396.000</b>	<b>19</b>	<b>210.844.000</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
437	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik	36	145.456.000	2	56.224.000	10	32.448.000	12	88.672.000	33	61	Dinas Komunikasi dan Informatika
438	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36	145.456.000	2	56.224.000	10	32.448.000	12	88.672.000	33	61	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>33</b>	<b>61</b>		
439	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet dari Diskominfo	10	309.456.000	3	28.224.000	4	93.948.000	7	122.172.000	70	39	Dinas Komunikasi dan Informatika
440	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	237.456.000	1	16.224.000	0	8.194.800	1	98.172.000	50	41	Dinas Komunikasi dan Informatika
441	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	48.000.000	1	8.000.000	2	8.000.000	3	16.000.000	75	33	Dinas Komunikasi dan Informatika
442	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4	24.000.000	1	4.000.000	2	4.000.000	3	8.000.000	75	33	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>66,67</b>	<b>36</b>		
443	02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		146	184.382.800	0	0	6	69.360.650	6	69.360.650	4	38	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
444	02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	25	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
445	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi	25	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
446	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	25	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
447	02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
448	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian	90	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
449	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		K	Rp
						K	Rp	K	Rp							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0	0	
450	02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5	15.675.000	0	0	5	15.675.000	5	15.675.000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
451	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5	15.675.000	0	0	5	15.675.000	5	15.675.000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
452	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	15.675.000	0	0	5	15.675.000	5	15.675.000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100	100	
453	02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rata-rata peningkatan omset usaha mikro keluarga miskin	1	53.707.900	0	0	1	53.685.650	1	53.685.650	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
454	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi pemberdayaan usaha mikro	1	53.707.900	0	0	1	53.685.650	1	53.685.650	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
455	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	53.707.900	0	0	1	53.685.650	1	53.685.650	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100	100	
456	02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha	25	24.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
457	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi pengembangan usaha mikro	25	24.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
458	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25	24.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0	0	
459	02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		511	6.503.627.229	56	978.711.451	183	1.456.996.929	239	2.435.708.380	47	37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
460	02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	166	548.360.000	40	60.535.800	41	118.496.000	81	179.031.800	49	33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
461	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu	166	548.360.000	40	60.535.800	41	118.496.000	81	179.031.800	49	33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
462	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65	52.728.000	15	8.112.000	15	16.224.000	30	24.336.000	46	46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
463	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan konsultasi dan Pengaduan yang terlayani	100	492.732.000	25	52.423.800	25	99.372.000	50	151.795.800	50	31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
464	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1	2.900.000	0	0	1	2.900.000	1	2.900.000	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>65,33</b>	<b>59</b>	
465	02.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang patuh terhadap kewajiban LKPM</b>	<b>232</b>	<b>354.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>47.885.000</b>	<b>111</b>	<b>47.885.000</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
466	2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>232</b>	<b>354.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>47.885.000</b>	<b>111</b>	<b>47.885.000</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
467	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	231	236.350.000	0	0	110	28.980.000	110	28.980.000	48	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
468	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	118.350.000	0	0	1	18.905.000	1	18.905.000	100	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>74</b>	<b>14</b>	
469	02.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		<b>938</b>	<b>23.376.317.915</b>	<b>146</b>	<b>3.289.092.210</b>	<b>206</b>	<b>4.790.622.515</b>	<b>352</b>	<b>8.079.714.725</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
470	02.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kemandirian dan kepeloporan, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>71</b>	<b>604.999.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>35.190.200</b>	<b>65</b>	<b>35.190.200</b>	<b>92</b>	<b>6</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
471	2.19.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor, dan Pembinaan Wira Usaha Muda Pemula</b>	<b>65</b>	<b>104.999.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>35.190.200</b>	<b>65</b>	<b>35.190.200</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
472	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	35.000.000	0	0	5	33.190.200	5	33.190.200	100	95	Dinas Pemuda dan Olah Raga
473	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60	69.999.800	0	0	60	2.000.000	60	2.000.000	100	3	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>100</b>	<b>49</b>	
474	2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan</b>	<b>6</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
475	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
476	02.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga, Peningkatan Infrastruktur Olahraga, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga</b>	<b>322</b>	<b>17.261.483.400</b>	<b>68</b>	<b>2.609.000.000</b>	<b>103</b>	<b>3.251.210.315</b>	<b>171</b>	<b>5.860.210.315</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
477	2.19.03.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terfasilitasnya pekan Olahraga Pelajar dan Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga</b>	<b>47</b>	<b>8.183.348.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.427.240</b>	<b>0</b>	<b>49.427.240</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
478	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya pembinaan olahraga Sepak Takraw Usia Dini	12	991.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
479	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	342.148.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
480	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	34	6.850.000.000	0	0	0	49.427.240	0	49.427.240	0	1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>481</b>	<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan</b>	<b>201</b>	<b>2.597.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>1.516.533.075</b>	<b>101</b>	<b>1.516.533.075</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
482	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	1.385.975.000	0	0	1	936.976.261	1	936.976.261	100	68	Dinas Pemuda dan Olah Raga
483	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200	1.211.460.000	0	0	100	579.556.814	100	579.556.814	50	48	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>75</b>	<b>58</b>	
<b>484</b>	<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Seleksi Atlet dan Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi</b>	<b>23</b>	<b>1.596.950.000</b>	<b>21</b>	<b>84.000.000</b>	<b>1</b>	<b>174.000.000</b>	<b>22</b>	<b>258.000.000</b>	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
485	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	1.030.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
486	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	22	566.000.000	21	84.000.000	1	174.000.000	22	258.000.000	100	46	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>50</b>	<b>23</b>	
<b>487</b>	<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Terbinanya Organisasi Olahraga</b>	<b>48</b>	<b>4.335.000.000</b>	<b>47</b>	<b>2.525.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>48</b>	<b>4.025.000.000</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
488	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	1.800.000.000	0	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	33	83	Dinas Pemuda dan Olah Raga
489	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Atlet yang mendapat penghargaan	45	2.535.000.000	47	2.525.000.000	0	0	47	2.525.000.000	104	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>68,5</b>	<b>92</b>	
<b>490</b>	<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Terlaksananya pemasalan Olahraga Tradisional dan rekreasi</b>	<b>3</b>	<b>548.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.250.000</b>	<b>0</b>	<b>11.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
491	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	59.250.000	0	0	0	11.250.000	0	11.250.000	0	19	Dinas Pemuda dan Olah Raga
492	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	489.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>493</b>	<b>02.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Tingkat Partisipasi Kepramukaan</b>	<b>2</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
<b>494</b>	<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>2</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
495	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	350.000.000	0	0	1	350.000.000	1	350.000.000	100	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
496	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										50	50			
497	02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		12	48.000.000	2	8.000.000	6	12.000.000	8	20.000.000	67	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
498	02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	12	48.000.000	2	8.000.000	6	12.000.000	8	20.000.000	67	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
499	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		12	48.000.000	2	8.000.000	6	12.000.000	8	20.000.000	67	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
500	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8	24.000.000	1	4.000.000	3	6.000.000	4	10.000.000	50	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
501	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	4	24.000.000	1	4.000.000	3	6.000.000	4	10.000.000	100	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										75	42			
502	02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		108	68.999.900	1	4.000.000	6	4.000.000	7	8.000.000	6	12	Dinas Komunikasi dan Informatika
503	02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara Elektronik	108	68.999.900	1	4.000.000	6	4.000.000	7	8.000.000	6	12	Dinas Komunikasi dan Informatika
504	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Keamanan Informasi Publik yang Terkoneksi	108	24.000.000	1	4.000.000	6	4.000.000	7	8.000.000	6	33	Dinas Komunikasi dan Informatika
505	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	108	24.000.000	1	4.000.000	6	4.000.000	7	8.000.000	6	33	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										6	33			
506	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	0	44.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
507	02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		108	1.092.614.000	1	28.058.000	52	695.194.000	53	723.252.000	49	66	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
508	02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	107	1.085.614.000	1	28.058.000	52	695.194.000	53	723.252.000	50	67	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
509	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pelestarian kesenian dan perlindungan kebudayaan	6	230.364.000	1	28.058.000	1	4.054.000	2	32.112.000	33	14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
510	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Kebudayaan	6	230.364.000	1	28.058.000	1	4.054.000	2	32.112.000	33	14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										33	14			
511	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian dan perlindungan kebudayaan	1	675.250.000	0	0	1	646.140.000	1	646.140.000	100	96	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
512	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelestarian Kesenian dan Pelindungan Kebudayaan	1	675.250.000	0	0	1	646.140.000	1	646.140.000	100	96	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										100	96			
513	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	100	180.000.000	0	0	50	45.000.000	50	45.000.000	50	25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
514	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina	100	180.000.000	0	0	50	45.000.000	50	45.000.000	50	25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										50	25			
515	02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Desa Kelurahan yang dikelola	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
516	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
517	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi sejarah yang dapat diakses	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
518	02.23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		500	1.075.063.000	23	12.168.000	31	24.336.000	54	36.504.000	11	3	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
519	02.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		500	1.075.063.000	23	12.168.000	31	24.336.000	54	36.504.000	11	3	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
520	2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		300	1.032.038.000	23	12.168.000	31	24.336.000	54	36.504.000	18	4	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
521	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :Information Technology ServiceManagement)	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
522	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
523	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	100	82.038.000	23	12.168.000	31	24.336.000	54	36.504.000	54	44	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
524	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
525	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>10,8</b>	<b>9</b>	
526	2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		200	43.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
527	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100	43.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
528	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
529	02.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		2.601,00	5.715.584.037	70	706.554.403	1.055,00	1.459.601.933	1.125,00	2.166.156.336	43	38	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
530	02.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>		300	110.207.000	10	8.112.000	94	28.656.500	104	36.768.500	35	33	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
531	2.24.02.2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>		100	31.385.000	0	0	50	12.432.500	50	12.432.500	50	40	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
532	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100	31.385.000	0	0	50	12.432.500	50	12.432.500	50	40	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>50</b>	<b>40</b>	
533	2.24.02.2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
534	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
535	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100	78.822.000	10	8.112.000	44	16.224.000	54	24.336.000	54	31	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
536	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	100	78.822.000	10	8.112.000	44	16.224.000	54	24.336.000	54	31	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												54	31	
537	02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		200	36.592.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
538	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
539	2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
540	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		100	36.592.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
541	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	36.592.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
542	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
543	03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		14	303.472.400	0	27.720.000	63,16	107.432.150	63,16	135.152.150	451	45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
544	03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		4	217.192.400	0	25.720.000	53,16	105.432.150	53,16	131.152.150	1.329,00	60	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
545	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		4	217.192.400	0	25.720.000	53,16	105.432.150	53,16	131.152.150	1.329,00	60	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
546	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya target produksi benih ikan (100 persen); Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota (1 unit)	1	198.312.400	0	25.720.000	53,16	105.432.150	53,16	131.152.150	5.316,00	66	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
547	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya sarana budidaya ikan secara intensif (1 paket); Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1 unit)	3	18.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												2.658,00	33	
548	03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		10	86.280.000	0	2.000.000	10	2.000.000	10	4.000.000	100	5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
549	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		5	66.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
550	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Temu teknis, fasilitasi pengolahan dan pemasaran serta kegiatan festival/pameran (2 kali); Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (5 unit usaha)	5	66.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
551	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		5	20.000.000	0	2.000.000	10	2.000.000	10	4.000.000	200	20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
552	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya target volume penjualan ikan di depo ikan air tawar melalui fasilitasi sarana prasarana (20 ton); Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (5 pelaku usaha)	5	20.000.000	0	2.000.000	10	2.000.000	10	4.000.000	200	20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												200	20	
553	03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		560	6.499.850.948	9	930.076.589	149	1.694.316.653	158	2.624.393.242	28	40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
554	03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Desa Wisata Berkembang	100	101.000.000	0	0	42	49.803.500	42	49.803.500	42	49	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
555	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
556	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis	4	30.000.000	0	0	2	29.803.500	2	29.803.500	50	99	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
557	3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen Penetapan Kawasan Strategis	4	30.000.000	0	0	2	29.803.500	2	29.803.500	50	99	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	99	
558	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
559	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang representatif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
560	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang distandarisasi	95	21.000.000	0	0	40	20.000.000	40	20.000.000	42	95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
561	3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan SDM Pariwisata	95	21.000.000	0	0	40	20.000.000	40	20.000.000	42	95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												42	95	
562	03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Jumlah Daya Tarik yang dipromosikan	20	130.092.000	1	8.112.000	2	28.242.000	3	36.354.000	15	28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
563	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Pemasaran Pariwisata	20	130.092.000	1	8.112.000	2	28.242.000	3	36.354.000	15	28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
564	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	5	100.092.000	1	8.112.000	2	28.242.000	3	36.354.000	60	36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
565	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	3	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
566	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												20	12	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
567	03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
568	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
569	3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
570	03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Desa Tematik Kreatif	7	54.500.000	0	0	4	29.994.000	4	29.994.000	57	55	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
571	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Even Ekonomi Kreatif	5	36.000.000	0	0	3	17.994.000	3	17.994.000	60	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
572	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Ekonomi Kreatif	5	36.000.000	0	0	3	17.994.000	3	17.994.000	60	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												60	50	
573	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Sertifikasi Pelaku Ekraf	2	18.500.000	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	50	65	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
574	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif	2	18.500.000	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	50	65	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	65	
575	03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		6.424,00	28.097.845.800	0	166.140.000	119,64	741.014.500	119,64	907.154.500	2	3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
576	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1.255,00	4.773.875.400	0	153.972.000	54,81	327.381.000	54,81	481.353.000	4	10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
577	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
578	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terfasilitasinya sarana budidaya hortikultura di lahan pekarangan bagi rumah tangga miskin (100 RTS); Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1 laporan)	1	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
579	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		3	3.841.247.400	0	64.740.000	24,35	99.330.000	24,35	164.070.000	812	4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
580	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Optimalnya produksi benih padi di UPT BBTPH (12 bulan); Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (1 VUB)	1	407.900.000	0	64.740.000	24,35	99.330.000	24,35	164.070.000	2.435,00	40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
581	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terfasilitasinya sarana produksi pertanian (50 Ha); Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (1 dokumen)	1	48.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
582	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana budidaya komoditas perkebunan (259,5); Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman (1 dokumen)	1	3.384.597.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												811,67	13	
583	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	748.628.000	0	89.232.000	30,46	228.051.000	30,46	317.283.000	3.046,00	42	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
584	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bertambahnya jumlah ternak melalui kelahiran sapi hasil inseminasi buatan (20 ekor); Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil (1 laporan)	1	748.628.000	0	0	30,46	228.051.000	30,46	317.283.000	3.046,00	42	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>3.046,00</b>	<b>42</b>		
<b>585</b>	<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.250,00</b>	<b>115.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
586	3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Bertambahnya jumlah kelahiran sapi potong, sapi perah dan domba (1200 ekor); Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (1200 ekor)	1.200,00	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
587	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (0 ton), Terfasilitasinya sarana dan prasarana produksi peternakan bagi Rumah Tangga Miskin (40 RTS)	50	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>588</b>	<b>03.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>113</b>	<b>21.919.220.400</b>	<b>0</b>	<b>12.168.000</b>	<b>27,69</b>	<b>24.336.000</b>	<b>27,69</b>	<b>36.504.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
<b>589</b>	<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>1</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
590	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Tersedia dan berfungsinya prasarana pertanian (10 unit); Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (1 dokumen)	1	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>591</b>	<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>112</b>	<b>21.896.220.400</b>	<b>0</b>	<b>12.168.000</b>	<b>27,69</b>	<b>24.336.000</b>	<b>27,69</b>	<b>36.504.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
592	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedia dan berfungsinya Jaringan Irigasi Usaha Tani (15 unit); Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (15 unit)	28	5.004.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
593	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedia dan berfungsinya jalan usaha tani (75 unit); Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (75 unit)	77	16.204.137.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
594	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terpenuhinya kebutuhan sarana/operasional UPT PTR dan RPH (12 bulan); Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (1 unit)	1	87.892.000	0	12.168.000	27,69	24.336.000	27,69	36.504.000	2.769,00	42	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
595	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (6 unit); Tingkat pencapaian target pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (100 persen)	6	600.191.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>692,25</b>	<b>11</b>		
<b>596</b>	<b>03.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		<b>4</b>	<b>301.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,51</b>	<b>1.537.500</b>	<b>0,51</b>	<b>1.537.500</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
597	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
598	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (26 kecamatan); Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (1 laporan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
599	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
600	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terperiksanya hewan kurban sebelum dan sesudah pemotongan (26 kecamatan); Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (1 laporan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
601	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	301.150.000	0	0	0,51	1.537.500	0,51	1.537.500	26	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
602	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (2 laporan)	2	301.150.000	0	0	0,51	1.537.500	0,51	1.537.500	26	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												26	1	
603	03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		5.000,00	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
604	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		5.000,00	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
605	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (5000 Ha)	5.000,00	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
606	03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		52	1.058.600.000	0	0	36,63	387.760.000	36,63	387.760.000	70	37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
607	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		52	1.058.600.000	0	0	36,63	387.760.000	36,63	387.760.000	70	37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
608	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (26 unit)	26	1.058.600.000	0	0	36,63	387.760.000	36,63	387.760.000	141	37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
609	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penyuluhan (26 BPP); Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (26 unit)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												70,5	19	
610	03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		5.493,00	9.507.682.743	74,25	1.291.615.206	1.494,25	2.324.212.827	1.568,50	3.615.828.033	29	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
611	03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	5	640.992.500	1	81.120.000	1	163.140.000	2	244.260.000	40	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
612	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarana dan prasarana Pasar yang representatif	5	640.992.500	1	81.120.000	1	163.140.000	2	244.260.000	40	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
613	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
614	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	640.992.500	1	81.120.000	1	163.140.000	2	244.260.000	50	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												25	19	
615	03.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat</b>	98	187.756.000	24	20.280.000	25	63.732.058	49	84.012.058	50	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
616	3.30.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Melaksanakan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten</b>	98	187.756.000	24	20.280.000	25	63.732.058	49	84.012.058	50	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
617	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	96	132.756.000	24	20.280.000	24	38.766.000	48	59.046.000	50	44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
618	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	55.000.000	0	0	1	24.966.058	1	24.966.058	50	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	45	
619	03.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Meningkatnya nilai Ekspor</b>	30	525.228.000	10	35.497.832	10	218.410.000	20	253.907.832	67	48	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
620	3.30.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor dan Unggulan</b>	30	525.228.000	10	35.497.832	10	218.410.000	20	253.907.832	67	48	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
621	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30	525.228.000	10	35.497.832	10	218.410.000	20	253.907.832	67	48	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												67	48	
622	03.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Tingkat alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>	5.175,00	245.924.000	10	4.056.000	1.410,00	35.074.811	1.420,00	39.130.811	27	16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
623	3.30.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Pemeliharaan Alat Standar Kemetrologian dan Meningkatnya Tertib Ukur Takat Timbangan dan Kelengkapannya</b>	5.175,00	245.924.000	10	4.056.000	1.410,00	35.074.811	1.420,00	39.130.811	27	16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
624	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, Takar, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.125,00	123.840.000	0	0	1.400,00	12.473.961	1.400,00	12.473.961	27	10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
625	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal yang dibina	50	122.084.000	10	4.056.000	10	22.600.850	20	26.656.850	40	22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												33,5	16	
626	03.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk</b>	1	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	22.308.000	0,5	34.476.000	50	44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
627	3.30.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan</b>	1	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	22.308.000	0,5	34.476.000	50	44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
628	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan	1	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	22.308.000	0,5	34.476.000	50	44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50	44	
629	03.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		3	184.092.000	0,25	12.168.000	0,25	18.252.000	0,5	30.420.000	17	17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
630	03.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten</b>	2	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	18.252.000	0,5	30.420.000	25	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
631	3.31.02.2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		2	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	18.252.000	0,5	30.420.000	25	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
632	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	79.092.000	0,25	12.168.000	0,25	18.252.000	0,5	30.420.000	50	38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
633	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>25</b>	<b>19</b>		
634	03.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Tersedianya informai indutri secara lengkap dan terkini</b>	<b>1</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>
635	3.31.04.2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Sarana Informasi Industri</b>	<b>1</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>
636	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>637</b>	<b>4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
638	04.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>1.828,00</b>	<b>64.663.003.798</b>	<b>227</b>	<b>6.632.322.470</b>	<b>588</b>	<b>14.271.638.829</b>	<b>815</b>	<b>20.903.961.299</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
639	04.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)</b>	<b>43</b>	<b>12.942.385.584</b>	<b>4</b>	<b>202.145.875</b>	<b>17</b>	<b>2.178.838.971</b>	<b>21</b>	<b>2.380.984.846</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
640	4.01.02.2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good governance )</b>	<b>10</b>	<b>732.876.800</b>	<b>3</b>	<b>136.670.875</b>	<b>3</b>	<b>68.651.800</b>	<b>6</b>	<b>205.322.675</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
641	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	4	173.652.000	0	0	2	33.648.400	2	33.648.400	50	19	Sekretariat Daerah
642	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2	124.224.900	1	6.205.000	0	17.882.000	1	24.087.000	50	19	Sekretariat Daerah
643	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	4	434.999.900	2	130.465.875	1	17.121.400	3	147.587.275	75	34	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>58,33</b>	<b>24</b>		
644	4.01.02.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Tingkat fasilitasi kebijakan kesejahteraan sosial</b>	<b>12</b>	<b>11.234.178.684</b>	<b>1</b>	<b>65.475.000</b>	<b>5</b>	<b>2.062.231.595</b>	<b>6</b>	<b>2.127.706.595</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
645	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	4	9.186.324.284	1	65.475.000	2	1.340.261.825	3	1.405.736.825	75	15	Sekretariat Daerah
646	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	jumlah dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial	4	1.007.854.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
647	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	4	1.039.999.900	0	0	3	721.969.770	3	721.969.770	75	69	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>50</b>	<b>28</b>		
648	4.01.02.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>tingkat pemenuhan kebutuhan regulasi dan permasalahan hukum dan ham</b>	<b>18</b>	<b>819.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>28.170.000</b>	<b>7</b>	<b>28.170.000</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
649	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun	4	255.000.000	0	0	2	16.170.000	2	16.170.000	50	6	Sekretariat Daerah
650	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	10	292.720.000	0	0	5	12.000.000	5	12.000.000	50	4	Sekretariat Daerah
651	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum didokumentasi	4	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>33,33</b>	<b>3</b>		
652	4.01.02.2.04	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>tingkat fasilitasi kerjasama daerah</b>	<b>3</b>	<b>155.610.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19.785.576</b>	<b>2</b>	<b>19.785.576</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
653	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	2	129.850.200	0	0	1	18.135.576	1	18.135.576	50	14	Sekretariat Daerah
654	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1	25.759.900	0	0	1	1.650.000	1	1.650.000	100	6	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>75</b>	<b>10</b>		
655	04.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD</b>	<b>138</b>	<b>4.254.041.747</b>	<b>2</b>	<b>109.067.700</b>	<b>26</b>	<b>842.635.875</b>	<b>28</b>	<b>951.703.575</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
<b>656</b>	<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Tingkat pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	<b>5</b>	<b>511.372.700</b>	<b>1</b>	<b>22.581.900</b>	<b>1</b>	<b>78.432.050</b>	<b>2</b>	<b>101.013.950</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
657	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2	279.372.900	0	749.400	1	11.961.750	1	12.711.150	50	5	Sekretariat Daerah
658	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	1	156.999.800	0	1.249.500	0	64.563.050	0	65.812.550	0	42	Sekretariat Daerah
659	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2	75.000.000	1	20.583.000	0	1.907.250	1	22.490.250	50	30	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>33,33</b>	<b>26</b>	
<b>660</b>	<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Tingkat pelaksanaan administrasi pembangunan</b>	<b>4</b>	<b>401.299.800</b>	<b>1</b>	<b>86.485.800</b>	<b>2</b>	<b>106.271.050</b>	<b>3</b>	<b>192.756.850</b>	<b>75</b>	<b>48</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
661	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan	2	223.500.000	0	849.600	2	102.379.600	2	103.229.200	100	46	Sekretariat Daerah
662	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1	94.999.800	1	84.790.500	0	1.498.500	1	86.289.000	100	91	Sekretariat Daerah
663	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1	82.800.000	0	845.700	0	2.392.950	0	3.238.650	0	4	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>66,67</b>	<b>47</b>	
<b>664</b>	<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa dalam pembangunan</b>	<b>128</b>	<b>1.468.871.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>438.297.587</b>	<b>23</b>	<b>438.297.587</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
665	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	4	586.396.900	0	0	2	48.157.087	2	48.157.087	50	8	Sekretariat Daerah
666	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2	525.900.000	0	0	1	62.681.500	1	62.681.500	50	12	Sekretariat Daerah
667	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	122	356.575.000	0	0	20	327.459.000	20	327.459.000	16	92	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38,67</b>	<b>37</b>	
<b>668</b>	<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>tingkat pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	<b>1</b>	<b>1.872.497.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.635.188</b>	<b>0</b>	<b>219.635.188</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
669	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian pangan.	1	1.872.497.347	0	0	0	219.635.188	0	219.635.188	0	12	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>12</b>	
<b>670</b>	<b>04.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>896</b>	<b>67.864.790.858</b>	<b>92</b>	<b>13.558.819.808</b>	<b>202</b>	<b>16.128.476.185</b>	<b>294</b>	<b>29.687.295.993</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
<b>671</b>	<b>04.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>153</b>	<b>20.418.408.095</b>	<b>19</b>	<b>4.119.973.283</b>	<b>20</b>	<b>3.166.482.684</b>	<b>39</b>	<b>7.286.455.967</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
<b>672</b>	<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>23</b>	<b>3.906.651.000</b>	<b>5,5</b>	<b>198.058.462</b>	<b>6,5</b>	<b>928.296.428</b>	<b>12</b>	<b>1.126.354.890</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
673	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan Daerah	5	850.000.000	1,25	37.720.000	1,25	477.488.778	2,5	515.208.778	50	61	Sekretariat DPRD
674	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah	9	1.706.651.000	2,25	60.394.462	2,25	214.733.650	4,5	275.128.112	50	16	Sekretariat DPRD
675	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	4	850.000.000	0	0	1	36.170.000	1	36.170.000	25	4	Sekretariat DPRD
676	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan dan/atau Naskah Akademik	5	500.000.000	2	99.944.000	2	199.904.000	4	299.848.000	80	60	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>51,25</b>	<b>35</b>	
<b>677</b>	<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>5</b>	<b>1.780.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
678	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
679	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
680	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
681	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
682	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>683</b>	<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>62</b>	<b>4.723.148.597</b>	<b>9,5</b>	<b>747.965.000</b>	<b>9,5</b>	<b>1.032.198.314</b>	<b>19</b>	<b>1.780.163.314</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
684	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.900.000.000	1,5	658.311.660	1,5	543.710.772	3	1.202.022.432	50	41	Sekretariat DPRD
685	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyeberluasan produk Hukum Daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	12	601.864.000	0	0	3	45.378.000	3	45.378.000	25	8	Sekretariat DPRD
686	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	24	192.000.000	6	6.000.000	0	0	6	6.000.000	25	3	Sekretariat DPRD
687	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	182.000.000	1,75	28.000.000	1,75	56.000.000	3,5	84.000.000	50	46	Sekretariat DPRD
688	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan hubungan Masyarakat	12	149.984.597	0	0	3	59.349.744	3	59.349.744	25	40	Sekretariat DPRD
689	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	697.300.000	0,25	55.653.340	0,25	327.759.798	0,5	383.413.138	50	55	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>37,5</b>	<b>32</b>	
<b>690</b>	<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>27</b>	<b>3.236.758.500</b>	<b>1</b>	<b>1.009.420.110</b>	<b>1</b>	<b>37.296.000</b>	<b>2</b>	<b>1.046.716.110</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
691	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD Pelaksanaan kunjungan kerja dalam DPRD	24	50.758.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
692	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	3.186.000.000	1	1.009.420.110	1	37.296.000	2	1.046.716.110	67	33	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>33,5</b>	<b>17</b>	
<b>693</b>	<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>24</b>	<b>71.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
694	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Pelaksanaan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	24	71.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>695</b>	<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>12</b>	<b>6.699.999.998</b>	<b>3</b>	<b>2.164.529.711</b>	<b>3</b>	<b>1.168.691.942</b>	<b>6</b>	<b>3.333.221.653</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
696	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	6.699.999.998	3	2.164.529.711	3	1.168.691.942	6	3.333.221.653	50	50	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>697</b>	<b>5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>698</b>	<b>05.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>		<b>1.587,00</b>	<b>10.718.376.659</b>	<b>225</b>	<b>1.605.136.037</b>	<b>593</b>	<b>2.796.201.153</b>	<b>818</b>	<b>4.401.337.190</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>699</b>	<b>05.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strartegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Terhadap RPJPD,RPJMD dan RPKD</b>	<b>1.101,00</b>	<b>998.789.800</b>	<b>170</b>	<b>134.725.000</b>	<b>495</b>	<b>385.666.300</b>	<b>665</b>	<b>520.391.300</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>700</b>	<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strartegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Terhadap RPJPD,RPJMD dan RPKD</b>	<b>601</b>	<b>672.490.000</b>	<b>130</b>	<b>95.725.000</b>	<b>330</b>	<b>300.235.000</b>	<b>460</b>	<b>395.960.000</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
701	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	215.240.000	0	16.500.000	0	93.990.000	0	110.490.000	0	51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
702	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	27.775.000	0	0	50	11.670.000	50	11.670.000	50	42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
703	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100	57.800.000	60	38.250.000	40	19.550.000	100	57.800.000	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
704	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	umlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	15.025.000	0	0	100	15.025.000	100	15.025.000	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
705	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	82.950.000	15	12.850.000	65	66.850.000	80	79.700.000	80	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
706	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100	54.075.000	50	26.125.000	50	27.650.000	100	53.775.000	100	99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
707	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	100	219.625.000	5	2.000.000	25	65.500.000	30	67.500.000	30	31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>65,71</b>	<b>74</b>	
<b>708</b>	<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>300</b>	<b>96.725.000</b>	<b>5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>110</b>	<b>23.062.500</b>	<b>115</b>	<b>25.062.500</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
709	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100	44.437.500	5	2.000.000	10	6.000.000	15	8.000.000	15	18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
710	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	35.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
711	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100	17.062.500	0	0	100	17.062.500	100	17.062.500	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38,33</b>	<b>39</b>	
<b>712</b>	<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan</b>	<b>200</b>	<b>229.574.800</b>	<b>35</b>	<b>37.000.000</b>	<b>55</b>	<b>62.368.800</b>	<b>90</b>	<b>99.368.800</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
713	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100	89.750.000	0	0	5	2.430.000	5	2.430.000	5	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
714	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	139.824.800	35	37.000.000	50	59.938.800	85	96.938.800	85	69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>45</b>	<b>36</b>	
<b>715</b>	<b>05.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strartegis (Renstra) Perangkat daerah Terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah daerah (RPJMD)</b>	<b>251</b>	<b>1.066.222.400</b>	<b>31</b>	<b>123.351.700</b>	<b>53</b>	<b>205.468.100</b>	<b>84</b>	<b>328.819.800</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
716	5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah Terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah daerah (RPJMD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>128</b>	<b>354.323.900</b>	<b>16</b>	<b>99.029.700</b>	<b>37</b>	<b>52.767.100</b>	<b>53</b>	<b>151.796.800</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
717	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	93.342.000	2	74.267.000	0	0	2	74.267.000	50	80	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
718	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	17.700.000	10	3.650.000	30	5.275.000	40	8.925.000	40	50	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
719	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	umlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	82.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
720	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	39.786.900	1	8.462.700	1	10.712.100	2	19.174.800	50	48	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
721	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	28.500.000	1	3.575.000	1	2.975.000	2	6.550.000	50	23	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
722	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	umlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	26.850.000	1	5.375.000	1	5.650.000	2	11.025.000	50	41	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
723	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	21.355.000	0	0	2	12.730.000	2	12.730.000	50	60	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
724	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	44.625.000	1	3.700.000	2	15.425.000	3	19.125.000	75	43	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>45,63</b>	<b>43</b>	
725	5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>16</b>	<b>353.999.500</b>	<b>3</b>	<b>12.197.500</b>	<b>5</b>	<b>89.627.000</b>	<b>8</b>	<b>101.824.500</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
726	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	123.234.500	0	0	1	51.832.000	1	51.832.000	50	42	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
727	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	33.800.000	0	0	1	5.140.000	1	5.140.000	25	15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
728	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	90.990.000	1	2.000.000	1	11.950.000	2	13.950.000	100	15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
729	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	57.300.000	1	8.035.000	1	16.335.000	2	24.370.000	67	43	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
730	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	28.500.000	0	0	1	2.460.000	1	2.460.000	33	9	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
731	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	20.175.000	1	2.162.500	0	1.910.000	1	4.072.500	50	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>54,17</b>	<b>24</b>	
<b>732</b>	<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang infrastruktur</b>	<b>107</b>	<b>357.899.000</b>	<b>12</b>	<b>12.124.500</b>	<b>11</b>	<b>63.074.000</b>	<b>23</b>	<b>75.198.500</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
733	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	192.592.600	1	7.750.000	0	46.930.000	1	54.680.000	50	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
734	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	28.381.500	0	850.000	1	6.895.000	1	7.745.000	50	27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
735	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	116.725.000	1	2.850.000	0	7.800.000	1	10.650.000	33	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
736	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100	20.199.900	10	674.500	10	1.449.000	20	2.123.500	20	11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38,25</b>	<b>19</b>	
<b>737</b>	<b>05.02</b>	<b>KEUANGAN</b>		<b>14.568,00</b>	<b>522.309.685.614</b>	<b>610,72</b>	<b>139.023.969.347</b>	<b>7.143,72</b>	<b>153.845.043.682</b>	<b>7.754,44</b>	<b>292.869.013.029</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah</b>
<b>738</b>	<b>05.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>37</b>	<b>480.560.272.749</b>	<b>9</b>	<b>135.598.897.949</b>	<b>5</b>	<b>148.329.196.481</b>	<b>14</b>	<b>283.928.094.430</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
<b>739</b>	<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>16</b>	<b>2.302.424.600</b>	<b>3</b>	<b>226.660.086</b>	<b>0</b>	<b>98.693.075</b>	<b>3</b>	<b>325.353.161</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
740	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	171.599.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
741	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	171.599.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
742	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	244.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
743	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	168.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
744	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	81.050.000	1	77.300.000	0	3.750.000	1	81.050.000	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
745	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	81.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
746	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	337.350.000	1	67.403.196	0	0	1	67.403.196	50	20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
747	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	578.575.000	1	81.956.890	0	94.943.075	1	176.899.965	50	31	Badan Keuangan dan Aset Daerah
748	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	226.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
749	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	242.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>20</b>	<b>15</b>	
<b>750</b>	<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>10</b>	<b>656.555.600</b>	<b>4</b>	<b>33.314.400</b>	<b>3</b>	<b>260.062.100</b>	<b>7</b>	<b>293.376.500</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
751	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2	66.809.000	1	4.056.000	1	8.112.000	2	12.168.000	100	18	Badan Keuangan dan Aset Daerah
752	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2	70.250.000	1	17.090.400	0	16.557.600	1	33.648.000	50	48	Badan Keuangan dan Aset Daerah
753	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	199.507.600	1	8.112.000	1	34.529.000	2	42.641.000	50	21	Badan Keuangan dan Aset Daerah
754	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	319.989.000	1	4.056.000	1	200.863.500	2	204.919.500	100	64	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>75</b>	<b>38</b>	
<b>755</b>	<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>8</b>	<b>510.194.000</b>	<b>1</b>	<b>4.056.000</b>	<b>1</b>	<b>63.162.000</b>	<b>2</b>	<b>67.218.000</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
756	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	133.454.000	1	4.056.000	0	8.112.000	1	12.168.000	33	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah
757	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	125.600.000	0	0	1	55.050.000	1	55.050.000	100	44	Badan Keuangan dan Aset Daerah
758	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	175.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
759	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	16.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
760	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	58.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>26,6</b>	<b>11</b>	
<b>761</b>	<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>3</b>	<b>477.091.098.549</b>	<b>1</b>	<b>135.334.867.463</b>	<b>1</b>	<b>147.907.279.306</b>	<b>2</b>	<b>283.242.146.769</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
762	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	443.520.555.140	1	135.260.803.194	0	146.657.279.306	1	281.918.082.500	100	64	Badan Keuangan dan Aset Daerah
763	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	11.820.000.000	0	74.064.269	1	1.250.000.000	1	1.324.064.269	100	11	Badan Keuangan dan Aset Daerah
764	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	21.750.543.409	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>66,67</b>	<b>25</b>	
<b>765</b>	<b>05.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>21</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>1</b>	<b>57.307.200</b>	<b>2</b>	<b>145.323.700</b>	<b>3</b>	<b>202.630.900</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
<b>766</b>	<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Presentase Aset yang Diamankan secara Fisik dan Legal</b>	<b>21</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>1</b>	<b>57.307.200</b>	<b>2</b>	<b>145.323.700</b>	<b>3</b>	<b>202.630.900</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>
767	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
768	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	370.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
769	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	600.000.000	1	57.307.200	1	80.186.200	2	137.493.400	67	23	Badan Keuangan dan Aset Daerah
770	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
771	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	1.030.000.000	0	0	0	4.287.500	0	4.287.500	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
772	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	72.000.000	0	0	1	60.850.000	1	60.850.000	50	85	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>19,5</b>	<b>18</b>	
<b>773</b>	<b>05.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Capaian Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>14.093,00</b>	<b>5.912.251.800</b>	<b>579,08</b>	<b>1.212.383.569</b>	<b>7.002,60</b>	<b>1.188.554.575</b>	<b>7.581,68</b>	<b>2.400.938.144</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
<b>774</b>	<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Capaian Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>14.093,00</b>	<b>5.912.251.800</b>	<b>579,08</b>	<b>1.212.383.569</b>	<b>7.002,60</b>	<b>1.188.554.575</b>	<b>7.581,68</b>	<b>2.400.938.144</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
775	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	61.299.900	0,05	4.056.000	0,34	20.857.000	0,39	24.913.000	39	41	Badan Pendapatan Daerah
776	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	193.999.000	0,03	9.461.400	0,1	20.280.000	0,13	29.741.400	13	15	Badan Pendapatan Daerah
777	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	646.137.100	0,88	302.189.500	0,92	297.442.840	1,8	599.632.340	90	93	Badan Pendapatan Daerah
778	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	477.549.900	0,02	4.056.000	0,03	8.112.000	0,05	12.168.000	3	3	Badan Pendapatan Daerah
779	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	227.000.000	0,03	8.112.000	0,31	70.831.035	0,34	78.943.035	34	35	Badan Pendapatan Daerah
780	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	527.678.000	0,54	295.058.160	0,31	161.724.000	0,85	456.782.160	85	87	Badan Pendapatan Daerah
781	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	813.570.000	4,22	60.840.000	0,72	97.344.000	4,94	158.184.000	8	19	Badan Pendapatan Daerah
782	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	657.170.700	1,87	443.503.950	0,12	25.344.000	1,99	468.847.950	66	71	Badan Pendapatan Daerah
783	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.000,00	570.000.000	571,11	58.742.559	1.898,86	154.621.500	2.469,97	213.364.059	35	37	Badan Pendapatan Daerah
784	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7.000,00	100.000.000	0	0	5.096,96	72.813.750	5.096,96	72.813.750	73	73	Badan Pendapatan Daerah
785	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9	606.592.500	0,33	26.364.000	1,13	75.903.000	1,46	102.267.000	16	17	Badan Pendapatan Daerah
786	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	356.960.000	0	0	0,09	30.762.000	0,09	30.762.000	9	9	Badan Pendapatan Daerah
787	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	674.294.700	0	0	2,71	152.519.450	2,71	152.519.450	23	23	Badan Pendapatan Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38</b>	<b>40</b>	
<b>788</b>	<b>05.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		<b>1.302,00</b>	<b>27.509.196.534</b>	<b>361</b>	<b>2.560.127.139</b>	<b>142</b>	<b>4.167.755.680</b>	<b>503</b>	<b>6.727.882.819</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
<b>789</b>	<b>05.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>1.188,00</b>	<b>3.006.026.600</b>	<b>330</b>	<b>81.751.000</b>	<b>117</b>	<b>410.249.000</b>	<b>447</b>	<b>492.000.000</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
<b>790</b>	<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Rasio Pegawai Fungsional</b>	<b>18</b>	<b>1.490.408.500</b>	<b>1</b>	<b>81.751.000</b>	<b>2</b>	<b>216.877.000</b>	<b>3</b>	<b>298.628.000</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
791	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	749.121.000	0	37.135.000	1	118.625.000	1	155.760.000	50	21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
792	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	118.676.000	0	0	1	19.160.000	1	19.160.000	100	16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
793	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	9	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
794	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	355.725.100	1	44.616.000	0	79.092.000	1	123.708.000	50	35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
795	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	58.926.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
796	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2	165.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											33,33	12		
797	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisinya jabatan struktural	8	785.187.500	1	0	2	96.118.000	3	96.118.000	38	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
798	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	144.792.500	1	0	1	18.150.000	2	18.150.000	50	13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
799	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	304.395.000	0	0	1	77.968.000	1	77.968.000	33	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
800	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	336.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											27,67	13		
801	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah /Dasar	1.150,00	316.216.300	328	0	112	91.170.000	440	91.170.000	38	29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
802	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase pengembangan karier pejabat fungsional	500	187.400.000	0	0	10	57.850.000	10	57.850.000	2	31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
803	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	650	128.816.300	328	0	102	33.320.000	430	33.320.000	66	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											34	29		
804	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ersentase Pelanggaran Disiplin PNS Yang Tertangan	12	414.214.300	0	0	1	6.084.000	1	6.084.000	8	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
805	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	125.444.900	0	0	1	6.084.000	1	6.084.000	100	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
806	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10	198.742.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
807	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	90.026.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>33,33</b>	<b>2</b>		
<b>808</b>	<b>05.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		<b>77</b>	<b>1.910.506.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
<b>809</b>	<b>05.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase pegawai bersertifikat kompetensi</b>	<b>77</b>	<b>1.910.506.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
<b>810</b>	<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase pegawai bersertifikat kompetensi</b>	<b>75</b>	<b>402.952.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
811	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang telah diklat teknis	75	402.952.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>812</b>	<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase pegawai bersertifikat kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1.507.554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
813	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	2	1.507.554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>814</b>	<b>05.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>300</b>	<b>571.094.400</b>	<b>31</b>	<b>10.275.000</b>	<b>65</b>	<b>121.222.400</b>	<b>96</b>	<b>131.497.400</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>815</b>	<b>05.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Analisis dan kajian yang dimanfaatkan</b>	<b>300</b>	<b>571.094.400</b>	<b>31</b>	<b>10.275.000</b>	<b>65</b>	<b>121.222.400</b>	<b>96</b>	<b>131.497.400</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>816</b>	<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Analisis dan kajian yang dimanfaatkan</b>	<b>100</b>	<b>239.831.800</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50</b>	<b>111.551.000</b>	<b>51</b>	<b>113.551.000</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
817	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	100	239.831.800	1	2.000.000	50	111.551.000	51	113.551.000	51	47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>51</b>	<b>47</b>		
<b>818</b>	<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>0</b>	<b>94.999.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>819</b>	<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase kajian yang dimanfaatkan</b>	<b>100</b>	<b>60.862.800</b>	<b>25</b>	<b>4.325.000</b>	<b>5</b>	<b>731.400</b>	<b>30</b>	<b>5.056.400</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian</b>



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp						
															dan Pengembangan
820	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100	60.862.800	25	4.325.000	5	731.400	30	5.056.400	30	8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>30</b>	<b>8</b>		
821	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Hasil Penelitian dan Inovasi yang dimanfaatkan	100	175.400.000	5	3.950.000	10	8.940.000	15	12.890.000	15	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
822	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100	175.400.000	5	3.950.000	10	8.940.000	15	12.890.000	15	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>15</b>	<b>7</b>		
823	<b>6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
824	06.01	INSPEKTORAT DAERAH		655	12.394.284.603	117	1.843.167.136	180	3.293.213.246	297	5.136.380.382	45	41	Inspektorat	
825	06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan nilai SAKIP BB	234	1.303.165.000	92	181.730.000	52	445.785.000	144	627.515.000	62	48	Inspektorat	
826	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP, LHR, LHE dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan	212	1.115.400.000	92	181.730.000	49	436.507.500	141	618.237.500	67	55	Inspektorat	
827	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	61	155.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat	
828	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10	80.470.000	3	9.180.000	3	23.970.000	6	33.150.000	60	41	Inspektorat	
829	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	27	168.780.000	16	68.850.000	8	35.217.500	24	104.067.500	89	62	Inspektorat	
830	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan Desa	112	423.960.000	72	79.220.000	38	247.440.000	110	326.660.000	98	77	Inspektorat	
831	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	286.845.000	1	24.480.000	0	129.880.000	1	154.360.000	50	54	Inspektorat	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>59,4</b>	<b>47</b>		
832	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan hasil pengawasan Audit Kinerja dan Keuangan	22	187.765.000	0	0	3	9.277.500	3	9.277.500	14	5	Inspektorat	
833	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	50.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat	
834	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	137.040.000	0	0	3	9.277.500	3	9.277.500	15	7	Inspektorat	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>7,5</b>	<b>4</b>		
835	06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	76	996.615.300	2	150.997.500	3	97.770.000	5	248.767.500	7	25	Inspektorat	
836	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya kegiatan gelar pengawasan dan kegiatan Diklat/Bimtek	12	689.357.000	1	23.100.000	2	88.695.000	3	111.795.000	25	16	Inspektorat	
837	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	150.262.500	0	0	1	26.250.000	1	26.250.000	17	17	Inspektorat	
838	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	6	539.094.500	1	23.100.000	1	62.445.000	2	85.545.000	33	16	Inspektorat	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>25</b>	<b>17</b>		
839	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil Asistensi, pendampingan dan tindak lanjut hasil Pendampingan Asistensi	64	307.258.300	1	127.897.500	1	9.075.000	2	136.972.500	3	45	Inspektorat	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
840	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat
841	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	180.194.800	1	127.897.500	1	9.075.000	2	136.972.500	33	76	Inspektorat
842	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	29	109.463.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>11</b>	<b>25</b>	
<b>843</b>	<b>7. UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>844</b>	<b>07.01</b>	<b>KECAMATAN</b>		<b>14.195,00</b>	<b>93.566.190.710</b>	<b>2.238,00</b>	<b>12.849.799.022</b>	<b>2.851,75</b>	<b>24.974.126.166</b>	<b>5.089,75</b>	<b>37.823.925.188</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
845	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	1.484,00	967.085.100	88	119.053.895	238	197.758.100	326	316.811.995	35	39	Semua Kecamatan
846	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalannya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	435	495.832.700	51	64.863.895	132	99.736.300	183	164.600.195	38	35	Semua Kecamatan
847	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan PKK tingkat kecamatan	435	495.832.700	51	64.863.895	132	99.736.300	183	164.600.195	38	35	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>38</b>	<b>35</b>	
848	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	686	326.006.200	27	30.810.000	64	62.223.100	91	93.033.100	21	22	Semua Kecamatan
849	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya Data Masyarakat Miskin Termutakhir	172	111.699.500	8	15.735.000	6	14.817.600	14	30.552.600	16	21	Semua Kecamatan
850	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Movev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	141	114.677.500	4	7.230.000	7	23.355.000	11	30.585.000	25	27	Semua Kecamatan
851	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	373	88.829.200	15	7.845.000	51	24.050.500	66	31.895.500	26	24	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>22,33</b>	<b>24</b>	
852	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak	363	145.246.200	10	23.380.000	42	35.798.700	52	59.178.700	39	36	Semua Kecamatan
853	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Movev PBB	363	142.246.200	10	23.380.000	42	35.798.700	52	59.178.700	41	38	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>41</b>	<b>38</b>	
854	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	971	7.030.758.300	115	51.050.000	124,35	589.293.300	239,35	640.343.300	21	22	Semua Kecamatan
855	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat partisipasi UMKM dalam pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan	664	358.048.300	15	15.840.000	72,35	70.143.300	87,35	85.983.300	20	23	Semua Kecamatan
856	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	260	183.987.400	1	3.550.000	36,35	47.520.000	37,35	51.070.000	21	22	Semua Kecamatan
857	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase UKM Yang Terbina	404	174.060.900	14	12.290.000	36	22.623.300	50	34.913.300	20	20	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>20,5</b>	<b>21</b>	
858	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		307	6.672.710.000	100	35.210.000	52	519.150.000	152	554.360.000	13	3	Semua Kecamatan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
859	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang kelurahan	200	57.710.000	100	35.210.000	0	0	100	35.210.000	50	41	Semua Kecamatan
860	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana kelurahan	4	5.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Semua Kecamatan
861	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dibayarnya honor Ketua RT, RW dan Linmas, sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	103	1.515.000.000	0	0	52	519.150.000	52	519.150.000	58	41	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>36</b>	<b>27</b>	
<b>862</b>	<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
<b>863</b>	<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan</b>	<b>598</b>	<b>216.560.400</b>	<b>211</b>	<b>21.625.000</b>	<b>22</b>	<b>26.915.000</b>	<b>233</b>	<b>48.540.000</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
<b>864</b>	<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan</b>	<b>597</b>	<b>206.560.400</b>	<b>211</b>	<b>21.625.000</b>	<b>22</b>	<b>26.915.000</b>	<b>233</b>	<b>48.540.000</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
865	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Forum Forkopimcam	459	121.709.400	208	14.475.000	21	24.290.000	229	38.765.000	27	29	Semua Kecamatan
866	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Julah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	138	67.851.000	3	7.150.000	1	2.625.000	4	9.775.000	9	10	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>18</b>	<b>20</b>	
<b>867</b>	<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
868	7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Semua Kecamatan
869	7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>870</b>	<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>2.362,00</b>	<b>1.636.562.700</b>	<b>28</b>	<b>17.070.000</b>	<b>138</b>	<b>99.499.500</b>	<b>166</b>	<b>116.569.500</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
<b>871</b>	<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan</b>	<b>2.362,00</b>	<b>1.636.562.700</b>	<b>28</b>	<b>17.070.000</b>	<b>138</b>	<b>99.499.500</b>	<b>166</b>	<b>116.569.500</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
872	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Fasilitas PHBN, Hari Jadi Majalengka dan Kepramukaan	1.390,00	905.387.100	0	0	121	67.992.000	121	67.992.000	15	7	Semua Kecamatan
873	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ dan PHBI	972	731.175.600	28	17.070.000	17	31.507.500	45	48.577.500	11	7	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>13</b>	<b>7</b>	
<b>874</b>	<b>07.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1.142,00</b>	<b>4.073.696.600</b>	<b>370</b>	<b>301.228.441</b>	<b>444</b>	<b>3.427.217.535</b>	<b>814</b>	<b>3.728.445.976</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>Semua Kecamatan</b>
<b>875</b>	<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>1.142,00</b>	<b>4.073.696.600</b>	<b>370</b>	<b>301.228.441</b>	<b>444</b>	<b>3.427.217.535</b>	<b>814</b>	<b>3.728.445.976</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>Semua Kecamatan</b>





No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
876	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	241	90.583.300	0	0	112	23.905.000	112	23.905.000	29	29	Semua Kecamatan
877	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Keala Desa Deifnit Yang Terpilih	255	3.463.718.500	27	17.130.000	227	3.349.297.535	254	3.366.427.535	99	96	Semua Kecamatan
878	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	324	285.419.800	225	250.538.441	79	8.835.000	304	259.373.441	107	89	Semua Kecamatan
879	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan Yang Mendapat Pembinaan	185	91.907.500	17	13.560.000	6	9.900.000	23	23.460.000	17	19	Semua Kecamatan
880	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitas Lomba Desa	137	142.067.500	101	20.000.000	20	35.280.000	121	55.280.000	30	29	Semua Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>56,4</b>	<b>52</b>	
<b>881</b>	<b>8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
<b>882</b>	<b>08.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		<b>2.555,00</b>	<b>8.260.394.744</b>	<b>390</b>	<b>649.806.905</b>	<b>657</b>	<b>3.734.577.840</b>	<b>1.047,00</b>	<b>4.384.384.745</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
<b>883</b>	<b>08.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>350</b>	<b>1.114.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>141.707.000</b>	<b>13</b>	<b>141.707.000</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
<b>884</b>	<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>350</b>	<b>1.114.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>141.707.000</b>	<b>13</b>	<b>141.707.000</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
885	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	1.104.395.000	0	0	13	141.707.000	13	141.707.000	4	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
886	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	10.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>2</b>	<b>7</b>	
<b>887</b>	<b>08.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.536.813.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>2.473.432.640</b>	<b>98</b>	<b>2.473.432.640</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
<b>888</b>	<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</b>	<b>100</b>	<b>2.536.813.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>2.473.432.640</b>	<b>98</b>	<b>2.473.432.640</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
889	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	100	2.536.813.000	0	0	98	2.473.432.640	98	2.473.432.640	98	98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>98</b>	<b>98</b>	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
890	08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	29.000.000	0	0	36	10.498.050	36	10.498.050	36	36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
891	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	100	29.000.000	0	0	36	10.498.050	36	10.498.050	36	36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
892	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	100	29.000.000	0	0	36	10.498.050	36	10.498.050	36	36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												36	36	
893	08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	50	83.925.000	0	0	20	67.125.000	20	67.125.000	40	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
894	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	50	83.925.000	0	0	20	67.125.000	20	67.125.000	40	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
895	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	50	83.925.000	0	0	20	67.125.000	20	67.125.000	40	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												40	80	
896	08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	120	300.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
897	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	120	300.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
898	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	70	277.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
899	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	50	23.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0	0	
900	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	32.678,00	1.329.860.220.091	4.100,10	243.765.105.291	9.882,08	369.805.229.953	13.982,19	613.570.335.244	41	40	Semua OPD dan Kecamatan
901	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	5.391,00	2.448.424.709	1.033,24	314.942.768	1.298,04	490.855.049	2.331,28	805.797.817	53	38	Semua OPD dan Kecamatan
902	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	837	659.296.034	162,2	136.216.820	282,93	203.781.580	445,13	339.998.400	56	53	Semua OPD dan Kecamatan



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
903	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	783	282.252.900	230	26.542.593	215,55	46.856.000	445,55	73.398.593	44	32	Semua OPD dan Kecamatan
904	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD	730	203.186.000	41	2.600.000	116,87	9.615.000	157,87	12.215.000	20	6	Semua OPD dan Kecamatan
905	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	683	222.870.800	366	92.540.055	117,75	45.868.600	483,75	138.408.655	83	74	Semua OPD dan Kecamatan
906	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	613	222.427.700	39	0	13,12	5.183.775	52,12	5.183.775	12	3	Semua OPD dan Kecamatan
907	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.127,00	409.584.500	132,25	20.264.300	338,84	67.110.885	471,09	87.375.185	66	26	Semua OPD dan Kecamatan
908	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	624	451.306.775	62,79	36.779.000	212,98	112.439.209	275,77	149.218.209	179	47	Semua OPD dan Kecamatan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>65,71</b>	<b>34</b>	
<b>909</b>	<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD penunjang Tupoksi</b>	<b>5.859,00</b>	<b>963.904.113.479</b>	<b>1.352,07</b>	<b>187.375.649.631</b>	<b>1.689,78</b>	<b>295.776.444.945</b>	<b>3.041,85</b>	<b>483.152.094.576</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>Semua OPD dan Kecamatan</b>
910	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	3.879,00	963.187.638.879	1.032,82	187.266.139.631	921,54	295.661.061.986	1.954,36	482.927.201.617	55	41	Semua OPD dan Kecamatan
911	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.421,00	414.695.000	303	84.090.000	408	66.938.350	711	151.028.350	41	23	OPD
912	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	13.599.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
913	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	236	162.907.500	10	22.085.000	100,12	27.504.700	110,12	49.589.700	175	29	Semua OPD dan Kecamatan
914	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
915	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	322	123.392.200	6,25	3.335.000	260,12	20.939.909	266,37	24.274.909	243	23	OPD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>85,67</b>	<b>19</b>	
<b>916</b>	<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>44.547.800</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5.904.300</b>	<b>3</b>	<b>5.904.300</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>OPD</b>
917	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil , Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Daerah pada SKPD	4	30.000.000	1	0	1	4.056.300	2	4.056.300	50	14	Dinas Kesehatan
918	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	2	14.547.800	0	0	1	1.848.000	1	1.848.000	50	13	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>50</b>	<b>14</b>	
<b>919</b>	<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD penunjang Tupoksi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.764.853.033</b>	<b>136</b>	<b>253.135.592</b>	<b>338,3</b>	<b>510.586.880</b>	<b>474,3</b>	<b>763.722.472</b>	<b>310</b>	<b>37</b>	<b>Semua OPD dan Kecamatan</b>
920	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Fasilitas peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
921	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	782	502.785.000	110	56.970.000	313,3	270.693.450	423,3	327.663.450	337	41	Semua OPD dan Kecamatan
922	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan pendataan pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	147.000.000	1	4.752.000	0	30.984.550	1	35.736.550	50	24	Sekretariat Daerah
923	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	116	1.068.268.033	25	191.413.592	25	208.908.880	50	400.322.472	43	37	Sekretariat DPRD



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						<b>107,5</b>	<b>26</b>			
<b>924</b>	<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>11.382,00</b>	<b>23.083.257.266</b>	<b>708,22</b>	<b>2.550.308.229</b>	<b>4.157,77</b>	<b>5.575.082.252</b>	<b>4.865,99</b>	<b>8.125.390.481</b>	<b>97</b>	<b>38</b>	<b>Semua OPD dan Kecamatan</b>
925	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	821	886.595.900	81,25	76.853.270	287,43	206.496.314	368,68	283.349.584	68	37	Semua OPD dan Kecamatan
926	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	1.298,00	6.412.458.880	161,05	712.577.255	313,26	1.693.482.943	474,31	2.406.060.198	96	44	Semua OPD dan Kecamatan
927	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	798	1.028.290.476	91,25	148.922.210	275,09	201.107.708	366,34	350.029.918	57	38	Semua OPD dan Kecamatan
928	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1.110,00	4.412.380.606	113,93	562.198.530	346,64	1.080.115.941	460,57	1.642.314.471	117	38	Semua OPD dan Kecamatan
929	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1.142,00	1.909.210.122	73,29	204.020.470	433,29	443.760.055	506,58	647.780.525	196	41	Semua OPD dan Kecamatan
930	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.409,00	1.291.223.151	64,25	130.010.350	1.921,89	242.811.810	1.986,14	372.822.160	88	29	Semua OPD dan Kecamatan
931	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	599.998.220	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
932	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	1.654.825.000	4	349.823.900	2	311.873.500	6	661.697.400	47	19	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
933	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.698,00	4.873.559.911	119,2	365.902.244	496,17	1.380.859.981	615,37	1.746.762.225	133	31	Semua OPD dan Kecamatan
934	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	84	14.715.000	0	0	82	14.574.000	82	14.574.000	98	99	Inspektorat
				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						<b>90</b>	<b>38</b>			
<b>935</b>	<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>992</b>	<b>3.639.674.442</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>2.754.860.400</b>	<b>449</b>	<b>2.754.860.400</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>Semua OPD dan Kecamatan</b>
936	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	430.000.000	0	0	1	413.000.000	1	413.000.000	100	96	Sekretariat Daerah
937	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	234	231.600.000	0	0	109	134.491.500	109	134.491.500	22	22	OPD
938	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	345	2.153.259.597	0	0	189	1.988.400.000	189	1.988.400.000	6	6	OPD
939	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	122	84.000.000	1	0	0	0	1	0	17	0	OPD
940	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	390	605.814.845	0	0	149	218.968.900	149	218.968.900	17	11	OPD
				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						<b>32,4</b>	<b>27</b>			
<b>941</b>	<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>2.688,00</b>	<b>25.158.026.237</b>	<b>510,28</b>	<b>3.981.431.242</b>	<b>728,9</b>	<b>5.826.327.793</b>	<b>1.239,18</b>	<b>9.807.759.035</b>	<b>102</b>	<b>41</b>	<b>Semua OPD dan Kecamatan</b>
942	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129	72.450.000	14	3.301.000	20	17.247.000	34	20.548.000	68	40	OPD
943	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	1.188,00	11.043.765.587	221,91	1.900.242.318	292,58	2.072.227.063	514,49	3.972.469.381	106	37	Semua OPD dan Kecamatan
944	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	309.000.000	3	48.247.930	10	99.561.881	13	147.809.811	44	60	Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup
945	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1.344,00	13.732.810.650	271,37	2.029.639.994	406,32	3.637.291.849	677,69	5.666.931.843	105	43	Semua OPD dan Kecamatan
				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						<b>80,75</b>	<b>45</b>			



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp					
946	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	3.360,00	8.371.209.563	142,1	648.249.991	643,86	1.585.691.136	785,96	2.233.941.127	23	29	Semua OPD dan Kecamatan
947	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	153	18.500.000	0,1	40.611.093	16,16	88.149.790	16,26	128.760.883	2	0	OPD
948	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	637	1.842.788.057	33	204.505.785	88,33	434.655.688	121,33	639.161.473	18	21	OPD
949	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	30	288.750.000	5	46.654.300	10	62.818.110	15	109.472.410	50	38	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
950	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeulur	41	56.000.000	3	2.000.000	4	4.000.000	7	6.000.000	14	22	Kecamatan
951	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	900	776.480.000	69	63.431.340	178	186.051.290	247	249.482.630	23	22	Semua OPD dan Kecamatan
952	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	795	4.002.369.355	7	195.273.885	218,71	504.558.155	225,71	699.832.040	26	22	Semua OPD dan Kecamatan
953	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	377	326.500.000	20	34.063.138	64,52	123.178.148	84,52	157.241.286	37	32	OPD
954	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	427	848.622.151	5	61.710.450	64,14	182.279.955	69,14	243.990.405	23	17	OPD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>24,13</b>	<b>22</b>	
955	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	200	254.929.012.397	31,19	39.746.588.540	40,44	44.750.139.477	71,63	84.496.728.017	6	5	OPD dan Kecamatan
956	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	200	254.929.012.397	31,19	39.746.588.540	40,44	44.750.139.477	71,63	84.496.728.017	36	33	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>36</b>	<b>33</b>	
957	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		400	3.453.519.677	43	287.036.315	138	527.749.439	181	814.785.754	9	5	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Malausma, Kecamatan Palasah
958	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah laporan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100	2.008.519.677	3	59.091.515	20	60.180.919	23	119.272.434	23	6	Sekretariat Daerah
959	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah laporan pakaian dinas dan atribut	100	395.000.000	0	0	60	223.151.320	60	223.151.320	60	56	Sekretariat Daerah
960	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah laporan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	100	200.000.000	17	32.944.800	35	49.417.200	52	82.362.000	52	41	Sekretariat Daerah
961	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah laporan penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100	850.000.000	23	195.000.000	23	195.000.000	46	390.000.000	46	46	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>45,25</b>	<b>37</b>	
962	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat kenyamanan dan keamanan Rumah tangga Pimpinan	200	2.173.050.668	56	353.289.727	56	542.906.815	112	896.196.542	56	41	Sekretariat Daerah
963	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah laporan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	100	1.363.050.668	28	226.294.814	28	314.936.714	56	541.231.528	56	40	Sekretariat Daerah
964	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah laporan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	100	810.000.000	28	126.994.913	28	227.970.101	56	354.965.014	56	44	Sekretariat Daerah



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>56</b>	<b>42</b>			
965	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Tingkat optimalisasi Fungsi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan	400	1.270.724.800	44	30.015.000	136	291.547.800	180	321.562.800	45	25	Sekretariat Daerah
966	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah laporan pengelolaan kelembagaan analisis jabatan	100	315.375.000	0	0	60	164.127.500	60	164.127.500	60	52	Sekretariat Daerah
967	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	100	287.500.000	26	4.750.000	26	40.000.000	52	44.750.000	52	16	Sekretariat Daerah
968	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah laporan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	100	653.849.800	18	25.265.000	25	73.420.300	43	98.685.300	43	15	Sekretariat Daerah
969	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah	100	14.000.000	0	0	25	14.000.000	25	14.000.000	25	100	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>45</b>	<b>46</b>			
970	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya pola komunikasi pimpinan yang baik	300	1.734.730.170	17	87.871.000	105	551.652.463	122	639.523.463	41	37	Sekretariat Daerah
971	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah laporan fasilitasi keprotokolan	100	544.505.200	15	81.171.000	35	148.550.144	50	229.721.144	50	42	Sekretariat Daerah
972	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah laporan komunikasi pimpinan	100	863.374.970	1	2.450.000	45	342.479.469	46	344.929.469	46	40	Sekretariat Daerah
973	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	100	326.850.000	1	4.250.000	25	60.622.850	26	64.872.850	26	20	Sekretariat Daerah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>40,67</b>	<b>34</b>			
974	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		300	37.349.668.600	25	8.136.587.256	50	10.518.247.175	75	18.654.834.431	12	25	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
975	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	100	36.339.668.600	25	8.136.587.256	25	10.056.747.175	50	18.193.334.431	50	50	Sekretariat DPRD
976	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	100	860.000.000	0	0	25	461.500.000	25	461.500.000	25	54	Sekretariat DPRD
977	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>25</b>	<b>35</b>			
978	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		200	535.407.250	0	0	50	97.234.029	50	97.234.029	6	5	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Majalengka
979	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Fraksi DPRD	100	149.907.250	0	0	25	33.755.229	25	33.755.229	25	23	Sekretariat DPRD
980	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100	385.500.000	0	0	25	63.478.800	25	63.478.800	25	16	Sekretariat DPRD
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>25</b>	<b>20</b>			
<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program</b>				<b>2.148.236,00</b>	<b>2.954.606.637.994</b>	<b>311.058,86</b>	<b>410.594.622.633</b>	<b>117.203,21</b>	<b>648.102.406.818</b>	<b>428.262,07</b>	<b>1.046.480.059.360</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	

Sumber : Laporan Monev RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023, TW 2.

## 2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6.**  
**Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Triwulan Ke-2 Tahun 2023**

NO.	Perangkat Daerah	Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan yang bersifat kontraktual, dalam proses pengadaan</li><li>2. Terdapat kesalahan rekening / nomenklatur kegiatan sehingga harus menunggu Perubahan APBD</li><li>3. Terdapat kegiatan APBD yang menunggu petunjuk teknisnya</li></ol>
2.	Dinas Kesehatan	Kurangnya Motivasi serta jadwal yang bersamaan sehingga kegiatan yang sudah direncanakan akhirnya dibatalkan
3.	RSUD Cideres	Adanya peraturan baru dimana proses pengadaannya harus melalui pengadaan elektronik (e-dasung) bagi yang di luar e-catalog sehingga masih tahap transial harus menunggu reuiu Inspektorat
4.	RSUD Majalengka	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lemahnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan</li><li>2. SDM dokter spesialis masih kurang</li><li>3. Kurangnya dana untuk pengembangan</li></ol>
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Keadaan cuaca extrem dan kondisi alam yang semakin tidak bersahabat dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber dana yang bersumber dari DAK baru terealisasi di triwulan III dimana pelaksanaan pekerjaan baru dilaksanakan di triwulan III dimana penyerapan dananya belum semuanya teralisasi</li><li>2. Pengadaan tanah yang masih belum selesai.</li></ol>
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya kemampuan anggaran untuk penanggulangan bencana</li><li>2. Terbatasnya kompetensi SDM</li><li>3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana</li></ol>
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Adanya realokasi anggaran sehingga kegiatan di Satpol PP dan Damkar urang maksimal
9.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggaran yang minim dan terkena refocusing selama tahun anggaran 2023
10.	Dinas Sosial	Kurangnya kerjasama dalam mencapai kinerja yang maksimal
11.	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai untuk pencapaian target kinerja
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Kurang responsifnya antara bidang dengan pep dan keuangan sehingga ada keterlambatan
13.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. tingginya angka konsumsi beras per kapita</li><li>2. tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian</li><li>3. rendahnya pola keragaman konsumsi pangan masyarakat</li></ol>



NO.	Perangkat Daerah	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. keterbatasan prasarana dan sarana</li><li>5. besarnya fluktuasi harga produk</li><li>6. akses layanan usaha terutama permodalan</li><li>7. panjangnya mata rantai tata niaga</li><li>8. pengaruh perubahan iklim</li><li>9. rendahnya kualitas SDM dan SDA.</li></ol>
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Kurangnya Sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran
15.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Belum optimal dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li><li>2. belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan adat</li><li>3. belum optimalnya hasil TTG oleh masyarakat, yang dapat mengungkit perekonomian masyarakat desa</li><li>4. belum optimalnya upaya pengembangan usaha-usaha ekonomi desa</li><li>5. belum optimalnya peran pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat</li></ol>
17.	Dinas Perhubungan	Merealisasikan anggaran tidak sesuai target disebabkan kurang efektifnya penyelesaian pekerjaan fisik dalam penjadwalan
18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dana anggaran untuk peningkatan kinerja perangkat daerah yang tersedia untuk pencapaian IKU belum optimal
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Komunikasi dan Koordinasi internal yang belum optimal
20.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Adanya peraturan baru tentang pengadaan barang dan jasa serta kegiatan yang pendanaannya bersumber dari provinsi
21.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya penataan objek wisata dengan komponen pendukung lainnya</li><li>2. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata</li><li>3. Kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah.</li><li>4. Masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya</li><li>5. Kurang terpromosikannya budaya lokal</li><li>6. Belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif</li></ol>
22.	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	Kurangnya SDM bidang kearsipan dan perpustakaan sehingga dalam pengelolaannya belum maksimal
23.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Kinerja dari tim pelaksana yang belum maksimal yang menyebabkan kinerja tidak tercapai
24.	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	Adanya realokasi anggaran sehingga memerlukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan
25.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber daya aparatur yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi BKAD</li><li>2. Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun</li></ol>
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Sumber daya masih belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
27.	Badan Pendapatan Daerah	Belum optimal penyerapan anggaran sehingga diperlukan strategi baru dalam upaya percepatan penyerapan anggaran





NO.	Perangkat Daerah	Permasalahan
28.	Sekretariat Daerah	1. Adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan perubahan anggaran kegiatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 2. Penggunaan teknologi dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal
29.	Sekretariat DPRD	Komunikasi dan Koordinasi internal yang belum optimal
30.	Inspektorat	1. Adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan perubahan anggaran kegiatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 2. Penggunaan teknologi dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal
31.	Kecamatan	1. Koordinasi antar stakeholders belum dapat dilakukan secara maksimal 2. Sarana prasarana penunjang kegiatan kurang mendukung 3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan kegiatan.

Sumber : Laporan Monev RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023, TW 2.

Berdasarkan identifikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel di atas, terdapat permasalahan pembangunan Kabupaten Majalengka sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, yaitu:

1. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.
2. Kapasitas SDM yang tersedia belum mampu mendukung sepenuhnya kegiatan yang direncanakan.
3. Terjadi kesalahan rekening/nomenklatur kegiatan sehingga harus menunggu Perubahan APBD.
4. Terdapat kegiatan yang menunggu petunjuk teknisnya dalam rangka realisasi.



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak *an sich* yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek-aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan.

Pada bab ini memuat substansi yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan bab-bab berikutnya dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta pencapaian berbagai indikator kinerja capaian tahun 2023 yang harus terpenuhi.

### **3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Majalengka Tahun 2022, dan Triwulan 2 Tahun 2023**

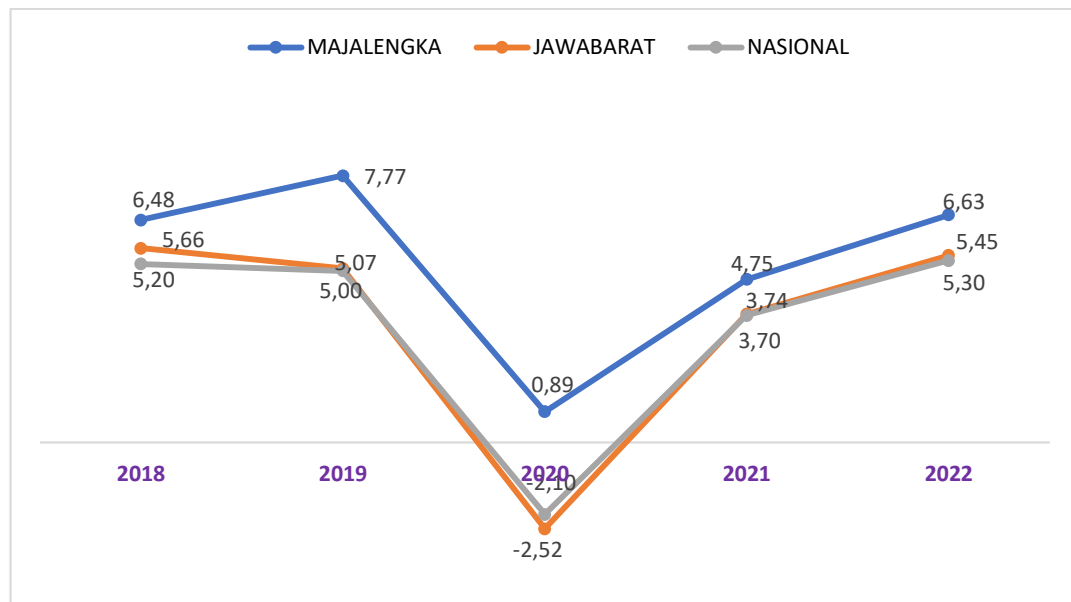
Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022, awal tahun 2023 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

##### **3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,75%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2022 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Karawang (6,31%) dan urutan ketiga adalah Kota Cimahi (5,92%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 15,01%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 13,34%), lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 13,28%), serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 11,45%), sementara pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,78%, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,72% dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,61% juga memiliki peran dominan.

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### 3.1.1.2 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selama ini nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran Inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun

2023 direncanakan akan melaksanakan survey Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Sehingga setelah pelaksanaan kedua survey tersebut, direncanakan pada tahun 2024 BPS Kabupaten Majalengka baru akan menghitung dan mengeluarkan nilai Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024.

**Tabel 3.1**

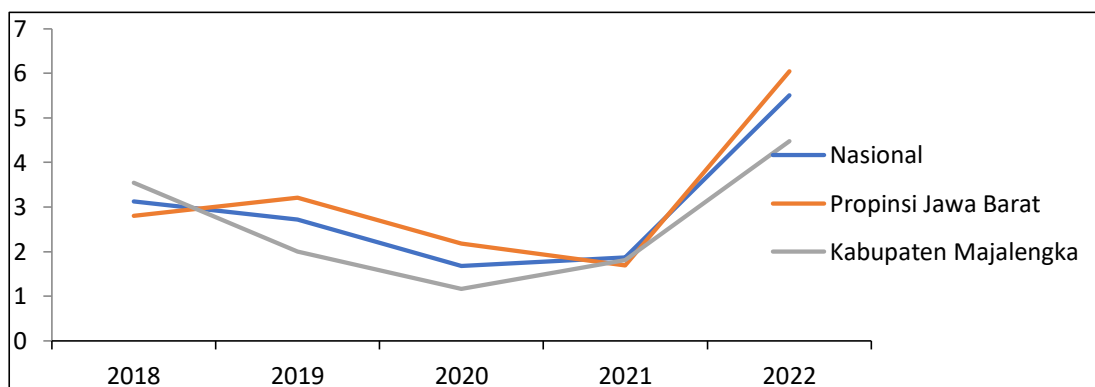
**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

No.	Wilayah	Inflasi Tahunan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51
2	Jawa Barat	2.8	3.21	2.18	1.69	6.04
3	Kota Cirebon	3.54	2	1.16	1.81	4.48

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2023.

**Gambar 3.2**

**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis KPW BI Cirebon, pada awal tahun 2023, daerah Ciayumajakuning yang didalamnya termasuk Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm), atau inflasi tahun kalender sebesar 2,23% (ytd) sehingga inflasi secara tahunan tercatat sebesar 4,57% (yoy).

Adapun penyebab inflasi diwilayah tersebut disebabkan oleh peningkatan harga pakan yang menyebabkan kenaikan pada harga telur dan daging ayam ras. Selanjutnya, penyebab peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh kondisi pasokan.

Beberapa bahan pokok yang mengalami inflasi tertinggi pada awal tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Telur Ayam Ras (0,10);
2. Daging Ayam Ras (0,06);
3. Bawang Merah (0,03);
4. Ban Luar Motor (0,01);
5. Cabai Merah (0,01).

### 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 66,21%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar 4,16% menurun sebesar 1,55% dari tahun 2021 sebesar 5,71%.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional**

No.	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Majalengka	4,95	4,37	5,48	5,71	4,16
2.	Jawa Barat	8,17	7,99	7,69	9,82	8,31
3.	Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

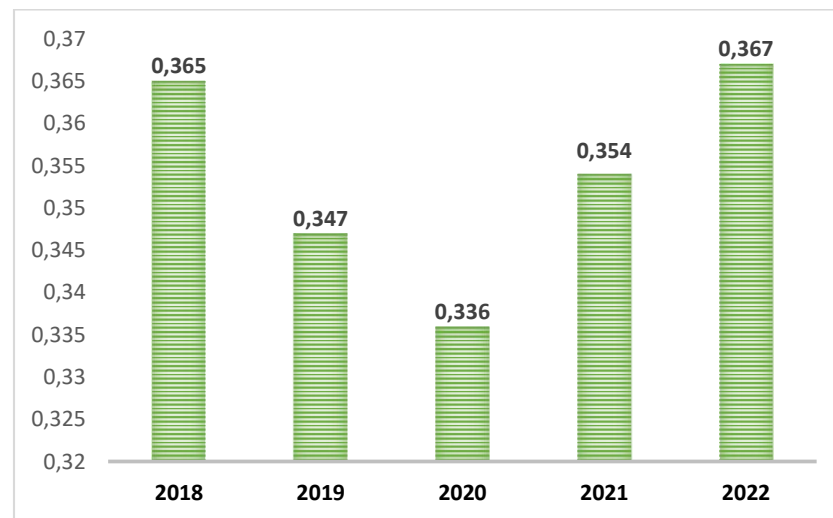
#### 3.1.1.4 Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio  $< 0,3$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$  Gini Ratio  $\leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio  $> 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 masih tergolong sedang (0,367). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat (0,417) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

**Gambar 3.3**  
**Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

#### 3.1.1.5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selama kurun waktu 2018-2022, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43 dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 11,94%. Angka ini



masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat (8,06%) dan Nasional (9,57%).

**Tabel 3.3**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	129.290	121.060	138.200	151.100	147.120
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

### 3.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023

#### A. Tantangan Ekonomi Global

Dalam laporan *Global Economic Prospects* edisi Juni 2023, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibanding proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%.

#### B. Tantang Ekonomi Nasional

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang *pruden* namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia,

penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2023 lebih rendah dari realisasi pada 2022 sebesar 5,3%.

### C. Tantang Ekonomi Kabupaten Majalengka

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 meliputi:

1. Penormalan perekonomian;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
4. Persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
  - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah beroperasinya Tol Cisumdawu dan meningkatnya kembali aktifitas Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
2. Tantangan pada sektor industri:
  - a. Mendorong perwujudan industri dan kawasan industri;
  - b. Kemitraan industri besar dan IKM.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
  - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM;
  - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Majalengka melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas;
  - c. Memanfaatkan ruang publik yang telah dibangun yang telah dilengkapi dengan tempat usaha.

4. Tantangan pada sektor pariwisata:
  - a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun;
  - b. Promosi destinasi pariwisata baru;
  - c. Pengembangan Desa wisata;
  - d. Percepatan Sertifikasi CHSE.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
  - a. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok;
  - b. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
6. Tantangan pada sektor pangan:
  - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
  - b. Perlindungan harga di tingkat produsen;
  - c. Ketahanan pangan menghadapi dampak Badai La Nina.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
  - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka;
  - b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.

Secara umum sektor perdagangan pada tahun 2023 telah membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2023 diharapkan dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability* (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*ecommerce*).

Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 akan sama atau lebih besar dari 6 persen. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi seperti di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Target Indikator Ekonomi Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

No.	Indikator	Realisasi 2022	Target	
			Murni Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
1.	Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah)	24.227	23.325	24.400
2.	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	6,63	4,17	6,66
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,16	4,88	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,94	10,37	10,37
5.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	28,289	28.100	28.350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023. Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

No.	Sektor	Realisasi	Proyeksi
		2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,68	0,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,07)	(2,08)
3.	Industri Pengolahan/Manufacturing (Residual)	13,34	8,79
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,45	(4,67)
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,01	21,54
6.	Konstruksi	0,58	7,39
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,94	8,31
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,78	3,46
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,72	4,18
10.	Informasi dan Komunikasi	5,44	5,86
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	5,20
12.	Real Estat	6,19	19,20

No.	Sektor	Realisasi	Proyeksi
		2022	2023
13.	Jasa Perusahaan	9,61	11,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,07)	14,54
15.	Jasa Pendidikan	5,20	12,62
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	2,45
17.	Jasa lainnya	13,28	11,54
<b>PDRB</b>		<b>6,63</b>	<b>6,69</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Indikator Makro Pembangunan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi	
			Murni Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,56	68,85	68,85
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,63	4,17	6,66
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,16	4,88	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,94	10,37	10,37
5.	Indek Gini (Poin)	0,357	0,330	0,330
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,25	1,20	1,20
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	28,289	28.100	28.350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Proses pembangunan yang terjadi di daerah sangat diupayakan untuk bersinergi dengan pembangunan nasional supaya terjadi sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Ada 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan; 5) Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia diimplementasikan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan Infrastruktur, lebih fokus bagi terciptanya usaha melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan regulasi, menitikberatkan pada upaya menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi merupakan langkah-langkah konkrit dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi, sebagai upaya pemerintah pusat dengan *highlight*-nya melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, diselaraskan dalam Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tema Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arah kebijakan adalah :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai dengan peningkatan *Decent Job*.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan iklim).
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

**Tabel 3.7**  
**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,31-73,49
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-5,5
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,5-8,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,375-0,378
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02

Sumber: RKP Tahun 2023.

### 3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Selain dukungan kebijakan ekonomi secara nasional dari Pemerintah Pusat, kontribusi dari kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dalam menghadapi pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat melakukan upaya Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak pandemi baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) *Rescue* atau penyelamatan; 2) *Recovery* atau pemulihan; dan 3) Penormalan. Tahapan *rescue* atau penyelamatan difokuskan pada penyelamatan tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menyelamatkan terutama UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, tahapan *recovery* atau pemulihan difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, relaksasi pembiayaan usaha, mempermudah dan mempromosikan investasi serta mendorong sektor-sektor ekonomi untuk berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan tahapan penormalan berfokus pada kelanjutan program pemulihan ekonomi dari seluruh sektor ekonomi secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui KPBU, obligasi daerah, pinjaman daerah dan sumber pendanaan lainnya.

Sektor-sektor perekonomian yang menjadi prioritas untuk ditangani antara lain:

#### 1. *Pemulihan Industri*

Industri merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat sekaligus memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB dan pertumbuhan industri nasional. Selain itu, Jawa Barat dikenal sebagai “rumah” bagi industri-industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri di Provinsi Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan yang berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran akibat dari penutupan aktivitas industri (karyawan yang di PHK dan dirumahkan). Strategi pemulihan ekonomi pada sektor perindustrian meliputi: 1) Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 2) Mengakselerasi



perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru; dan 4) Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana dan prasarana logistik.

## 2. Pemulihan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan *social distancing/physical distancing* saat pandemi COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh, yang antara lain adalah perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 adalah dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang berbasis *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan) dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan) atau dikenal dengan CHSE. Usaha pariwisata yang mengalami kesulitan permodalan akibat dampak pandemi COVID-19 akan diberikan bantuan permodalan melalui mitra pemerintah daerah. Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi Jawa Barat dengan arah kebijakan melaksanakan program terkait pariwisata yang dapat menyerap tenaga kerja, membangun dan membangkitkan kembali usaha pariwisata terdampak pandemi COVID-19. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; Peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan pariwisata.

## 3. Pemulihan Investasi

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa

Barat merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara tepat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 antara lain dengan: 1) Realisasi “investasi baru” di Provinsi Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); dan 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### 4. Reformasi Sistem Pangan Berkelanjutan

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan dan pertanian relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pangan berkelanjutan yang terdiri dari aspek:

##### a) Ketersediaan Pangan

Dilakukan dengan cara memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri melalui klaster pertanian, mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor), dan penyediaan cadangan pangan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program di atas adalah (1) memastikan *intake* air di daerah persawahan, salah satunya melalui pemantapan jaringan irigasi di sentra produksi; (2) menyediakan benih/bibit unggul; (3) pengawasan peredaran dalam pendistribusian pupuk; (4) melakukan percepatan musim tanam; (5) implementasi *smart agriculture* dalam proses produksi, dengan menerapkan digitalisasi pertanian, penggunaan *transplanter indo*

*combine harvester*, mesin pemilah bibit unggul, alat pengering, instalasi pengolah limbah, modifikasi alsintan sesuai kebutuhan, penggunaan *smart fishing*, *smart feeder*; (5) peningkatan kompetensi penyuluh, *skill up* petani, pembentukan petani milenial; (6) Pengembangan *urban farming*; dan (7) *contract farming*, fasilitasi dalam kemudahan akses modal dengan perbankan serta pemberian stimulus bagi petani dan nelayan dalam bentuk pembiayaan dasar.

b) Akses Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, menyederhanakan sistem logistik dan distribusi, meningkatkan akses petani terhadap pasar, menyediakan infrastruktur seperti akses jalan dan gudang penyimpanan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program pembangunan tersebut adalah pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP), pembangunan simpul pangan termasuk mendukung program pembangunan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pemantapan akses jalan ke sentra produksi.

c) Pemanfaatan Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi makanan Bergizi Beragam Sehat dan Aman (B2SA), pemanfaatan bahan pangan lokal, pelatihan pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan skala rumah tangga dan juga pemberian suplemen gizi bagi remaja putri.

#### d) Peningkatan Sistem Informasi Pangan

Dilakukan dengan cara membangun sistem satu data yang dapat menghimpun data pangan di Provinsi Jawa Barat. Aktivitas ini dilakukan melalui pembentukan unit sebagai pusat pemelihara keberlanjutan dan integritas data serta keberlangsungan sistem, agar bisa dengan mudah digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai landasan untuk mengaplikasikan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengedepankan pelaksanaan KUKM dengan ditopang oleh berbagai urusan yang sifatnya penunjang seperti urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal serta urusan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian. Adapun fokus fokus pembangunan tersebut diarahkan pada: (a) Peningkatan kemandirian Jawa Barat dalam sektor pertanian, kelautan dan perikanan, untuk pencapaian kedaulatan pangan; (b) Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian; (c) Peningkatan iklim kualitas usaha yang mendorong terciptanya investasi yang berdampak positif pada perekonomian. Adapun langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diupayakan untuk ditempuh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi diantaranya melalui petani juara, nelayan juara, industri juara, pasar juara, logistik juara, dan UMKM juara.

Kebijakan untuk mendukung perekonomian Jawa Barat terdapat pula di prioritas lainnya, yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Konsep yang dikembangkan pada prioritas ini yaitu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional (khususnya diluar wilayah aglomerasi ekonomi) sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata.

Pelaksanaannya diaktualisasikan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata. Langkah-langkahnya diimplementasikan melalui perwujudan pariwisata juara dan ekonomi kreatif juara.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, terdapat prioritas Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah). Aplikasi dari kebijakan ini berupa pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rutilahu, beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu, dan buruh juara.

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2022-2023**

NO.	INDIKATOR	REALISASI		TARGET 2023
		2021	2022	
1.	PDRB Per Kapita (ADHB) (juta rupiah)	45,30	46,34	49,04
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)	3,74	5,45	4,35
3.	Inflasi (persen)	1,69	6,04	3,00
4.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	45,30	49,04	49,29
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,82	8,31	9,69
6.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,97	7,98	7,54
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	545,29	576,89	683,11

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

### 3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan diwarnai juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*),

bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang. Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka**

No.	Indikator	Target	
		Murni 2023	Perubahan 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,85	68,85
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,17	6,66
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,88	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,37	10,37
5.	Indek Gini (Poin)	0,330	0,330
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,12	1,12
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHK Juta Rupiah)	18,100	18,250

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Sampai dengan akhir Bulan Juni 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengambil langkah strategis antara lain dengan melakukan pergeseran anggaran belanja tahun 2023, terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Pergeseran-pergeseran tersebut dilakukan karena :

1. Pergeseran anggaran untuk pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Perangkat Daerah.



3. Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan DAK dan DBH-CHT di Perangkat Daerah.
4. Penyesuaian-penyesuaian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Hibah, dan Belanja Modal, serta Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan kondisi tersebut kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2023 terdiri dari kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

### **3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Dana Transfer yang tidak terikat.

Berdasarkan hasil di atas dan hasil analisis terhadap potensi pendapatan maka target pendapatan daerah tahun 2023 mengalami penyesuaian dan perubahan pada struktur pendapatan daerah maka target Pendapatan Daerah pada perubahan tahun 2023 dituangkan



dalam tabel 3.10. Pada tabel tersebut terlihat terjadi pergeseran sebanyak 3 (tiga) kali, dari sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan dari Pajak Daerah sebesar Rp.20.020.322.737 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah turun sebesar Rp.13.842.853.665. Dana transfer mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.350.653.895.418.



**Tabel 3.10**  
**Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023**  
**Kabupaten Majalengka**

Uraian	Target					Perubahan RKPD 2023
	RKPD 2023	APBD 2023	Pergeseran 1 APBD 2023	Pergeseran 2 APBD 2023	Pergeseran 3 APBD 2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.582.082.123.787,00</b>	<b>3.381.454.310.280</b>	<b>3.017.751.959.595</b>	<b>3.017.751.959.595</b>	<b>3.026.333.611.064</b>	<b>3.006.026.110.795</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>581.356.240.179,00</b>	<b>582.764.657.817</b>	<b>582.764.657.817</b>	<b>582.764.657.817</b>	<b>582.764.657.817</b>	<b>549.408.702.281</b>
Pajak Daerah	192.515.320.500,00	192.515.320.500	192.515.320.500	192.515.320.500	192.515.320.500	172.494.997.763
Retribusi Daerah	22.404.947.668,00	18.049.318.726	18.049.318.726	18.049.318.726	18.049.318.726	18.049.318.726
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.894.582.362,00	9.303.000.000	9.303.000.000	9.303.000.000	9.303.000.000	9.810.220.866
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	358.541.389.649,00	362.897.018.591	362.897.018.591	362.897.018.591	362.897.018.591	349.054.164.926
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.000.725.883.608,00</b>	<b>2.798.089.461.463</b>	<b>2.434.387.110.778</b>	<b>2.434.387.110.778</b>	<b>2.442.968.762.247</b>	<b>2.456.017.217.514</b>
Transfer Pemerintah Pusat	2.307.484.466.281,00	2.086.282.684.405	2.086.282.684.405	2.086.282.684.405	2.094.864.335.874	2.094.864.335.874
Transfer Antar Daerah	693.241.417.327,00	711.806.777.058	348.104.426.373	348.104.426.373	348.104.426.373	361.152.881.640
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>600.191.000</b>	<b>600.191.000</b>	<b>600.191.000</b>	<b>600.191.000</b>	<b>600.191.000</b>
Pendapatan Hibah		600.191.000	600.191.000	600.191.000	600.191.000	600.191.000

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

### 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan tahun 2023

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SPM, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarnya yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional;
2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;

4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
8. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
9. Pemenuhan anggaran untuk dukungan kelancaran proses dan pelaksanaan Pemilukada;
10. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.079.512.414.310. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.11.



Apabila melihat tabel 3.11 bahwa pada perubahan tahun 2023 target belanja daerah diasumsikan mengalami penurunan yaitu pada Belanja Operasi menurun sebesar Rp.40.561.863.928, diantaranya pada Belanja Pegawai menurun sebesar Rp.82.619.478.911 dikarenakan adanya penyesuaian gaji dan tunjanganannya sehubungan dengan adanya pegawai yang pensiun serta adanya penurunan akres gaji. Belanja Barang dan Jasa juga meningkat sebesar Rp.39.857.454.274 dikarenakan adanya kegiatan *mandatory* yang harus diselesaikan dan dituntaskan pada akhir tahun 2023. Pada Belanja Modal mengalami penurunan Rp.259.469.295.657, dikarenakan menurunnya pendapatan transfer dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diasumsikan menurun sebesar 9 % dibandingkan dengan APBD tahun 2023.





**Tabel 3.11**  
**Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

URAIAN	PROYEKSI / TARGET					
	RKPD 2023	APBD 2023	Pergeseran 1 APBD 2023	Pergeseran 2 APBD 2023	Pergeseran 3 APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
<b>BELANJA</b>	<b>3.555.270.205.280</b>	<b>3.392.723.563.895</b>	<b>3.029.021.213.210</b>	<b>3.029.021.213.210</b>	<b>3.039.732.328.457</b>	<b>3.079.512.414.310</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.129.605.510.232</b>	<b>2.257.903.404.891</b>	<b>2.187.945.296.653</b>	<b>2.171.169.535.348</b>	<b>2.179.243.105.895</b>	<b>2.217.341.550.963</b>
Belanja Pegawai	1.276.602.409.551	1.363.629.664.776	1.341.745.830.276	1.300.009.639.887	1.304.503.765.396	1.281.010.185.865
Belanja Barang dan Jasa	811.008.994.181	833.459.187.115	772.515.132.668	807.933.171.752	811.824.616.790	873.316.641.389
Belanja Hibah	32.805.106.500	51.652.553.000	64.522.333.709	53.764.723.709	53.452.723.709	53.552.723.709
Belanja Bantuan Sosial	9.189.000.000	9.162.000.000	9.162.000.000	9.462.000.000	9.462.000.000	9.462.000.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>735.105.518.875</b>	<b>645.543.560.455</b>	<b>364.979.318.008</b>	<b>381.755.079.313</b>	<b>384.392.624.013</b>	<b>386.074.264.798</b>
Belanja Tanah	-	185.651.997	7.685.651.288	6.086.097.759	6.086.097.759	8.724.447.714
Belanja Peralatan dan Mesin	129.785.588.012	152.532.071.848	120.068.986.437	121.650.527.047	124.061.471.747	125.696.860.151
Belanja Gedung dan Bangunan	153.723.258.559	133.041.289.574	63.065.933.574	80.215.453.826	80.145.453.826	76.778.606.252
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	483.484.883.666	347.211.998.392	162.086.198.065	162.276.198.065	162.572.798.065	163.499.548.065
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.880.629.843	12.188.938.392	11.688.938.638	11.143.192.610	11.143.192.610	11.193.192.610
Belanja Aset Lainnya	735.105.518.875	383.610.006	383.610.006	383.610.006	383.610.006	181.610.006
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>11.820.000.000</b>	<b>11.820.000.000</b>	<b>11.820.000.000</b>	<b>11.820.000.000</b>
Belanja Tak Terduga	35.000.000.000	25.000.000.000	11.820.000.000	11.820.000.000	11.820.000.000	11.820.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>531.827.383.222</b>	<b>464.276.598.549</b>	<b>464.276.598.549</b>	<b>464.276.598.549</b>	<b>464.276.598.549</b>	<b>464.276.598.549</b>
Belanja Bagi Hasil	17.123.336.689	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409
Belanja Bantuan Keuangan	514.704.046.533	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan perubahan tahun 2023 meliputi:

1. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 memanfaatkan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
2. Pengeluaran pembiayaan menanggihkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah sampai dengan kondisi fiskal kembali membaik.
3. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan dalam rangka memenuhi Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 .

Apabila melihat SILPA hasil perhitungan BPK (*audited*) terlihat naik namun sebenarnya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari beberapa sumber dana terikat dan tidak terikat. Lebih jelasnya pada Tabel 3.12 disajikan proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023.



**Tabel 3.12**  
**Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

URAIAN	REALISASI					
	RKPD 2023	APBD 2023	Pergeseran 1 APBD 2023	Pergeseran 2 APBD 2023	Pergeseran 3 APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>25.898.717.393</b>	<b>66.033.732.245</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.769.253.615	23.769.253.615	23.769.253.615	23.769.253.615	25.898.717.393	66.033.732.245
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>23.769.253.615</b>	<b>25.898.717.393</b>	<b>66.033.732.245</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	17.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>4.269.253.615,00</b>	<b>11.269.253.615</b>	<b>11.269.253.615</b>	<b>11.269.253.615</b>	<b>13.398.717.393</b>	<b>36.033.732.245</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

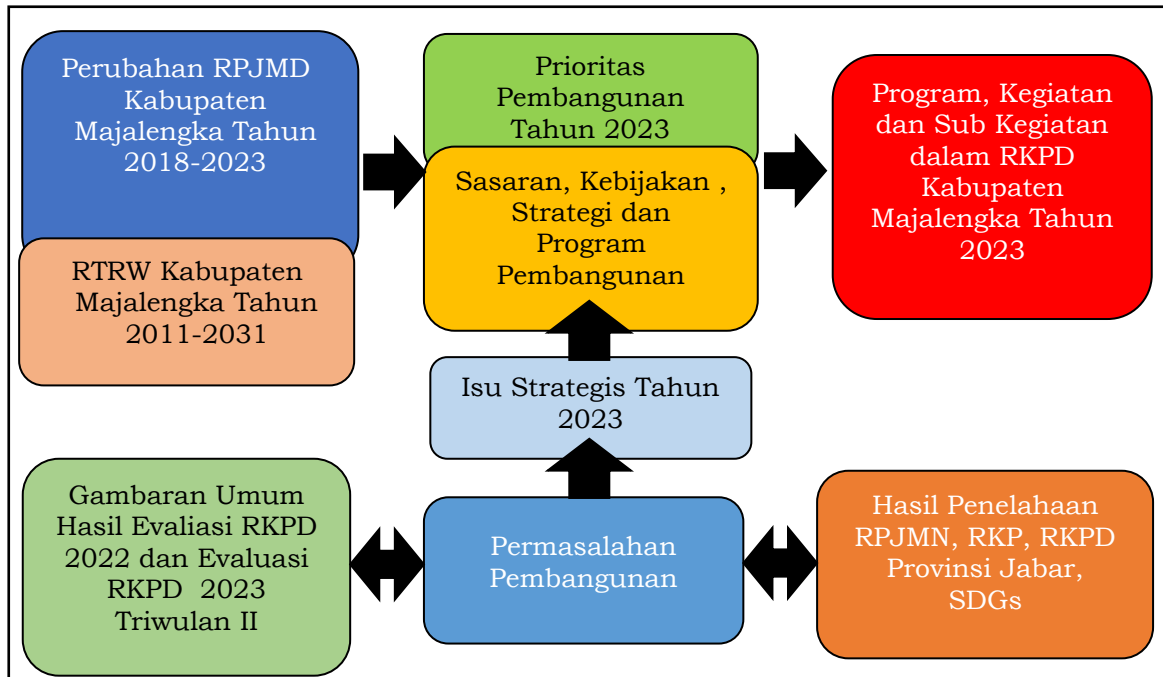
## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menggunakan *pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 16 (enam) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 17 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada perubahan RKPD tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan II; (4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*; dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. *Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.* Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**



Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kab. Majalengka, 2023.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama, Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat, Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam

7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampilkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
  - a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
  - b. Memajukan kebudayaan;
  - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
  - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah

- Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
  - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi Kelembagaan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Berkualitas;
  - b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
  - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.



Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Satu sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkungannya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya kunjungan wisata; dan Meningkatnya investasi sektor industri;
2. Sasaran Nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”, didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor; Meningkatnya kunjungan wisata; Meningkatnya investasi sektor industri;
3. Sasaran Nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor dan Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa;
4. Sasaran Nasional 4: “Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Sasaran Nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”, memiliki keterkaitan dengan sasaran

- pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
6. Sasaran Nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Mutu pendidikan;
  7. Sasaran Nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: “Menurunkan prevalensi stunting;
  8. Sasaran Nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Pengurangan Tingkat Kemiskinan;
  9. Sasaran Nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”, didukung oleh 3 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka: Meningkatnya kunjungan wisata; Meningkatnya Investasi Sektor Industri dan Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa;
  10. Sasaran Nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Meningkatnya Mutu pendidikan;
  11. Sasaran Nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yakni Meningkatnya Mutu pendidikan;
  12. Sasaran Nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka, yakni Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
  13. Sasaran Nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”, didukung oleh sasaran Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;



14. Sasaran Nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
15. Sasaran Nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka, yakni Meningkatkan Mutu Pendidikan;
16. Sasaran Nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
17. Sasaran Nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
18. Sasaran Nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan”, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
19. Sasaran Nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”, belum didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka secara langsung;
20. Sasaran Nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
21. Sasaran Nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
22. Sasaran Nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan

Kabupaten Majalengka, yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat;

23. Sasaran Nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
24. Sasaran Nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”, memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: “Terwujudnya akuntabilitas kinerja; Terwujudnya akuntabilitas keuangan; Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN; Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,31-73,49
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-5,5
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,5-8,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,375-0,378
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02

Sumber: RKP Tahun 2023.

#### **4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

*Jabar Juara Lahir Batin:* pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

*Inovasi:* Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

*Kolaborasi:* Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

**Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi**, yaitu: Misi Pertama, Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; Misi Kedua, Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; Misi Ketiga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; Misi Keempat, Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah. **Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023** sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat



- dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial.
  4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
  5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
  6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
  7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola

pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Makro Pembangunan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No.	Indikator Pembangunan	Target 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,69
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,54
4.	Rasio Gini (nilai)	0,396
5.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,35
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,12
7.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	49,29

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

#### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

Penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD, dan sehubungan dengan adanya beberapa Regulasi Nasional terkait perencanaan dan penganggaran serta terjadinya Bencana Nasional Covid-19, maka Kabupaten Majalengka melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.



Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Tema Pembangunan Nasional tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah :

**“Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Percepatan Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat”**

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi Bupati Majalengka periode tahun 2018-2023 untuk mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA (RAHARJA) dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 4.3.





**Tabel 4.3.**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023**

Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
<b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>														
<b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>														
1.1.	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1.1.1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5	1	2	5	5	5
<b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>														
2.1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	2.1.1.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,331	0,340	0,339	0,337	0,330	0,328
		2.1.2.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2	Angka Kemiskinan	Persen	12,6	10,79	10,06	11,89	11,2	10,8	10,37	8,48
		2.1.3.	Menurunkan prevalensi stunting	3	Angka Stunting	Persen	-	-	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,5
2.2.	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	2.2.1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	N/A	20	20	10	10	10	10	10
<b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>														
3.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1	Nlai SAKIP	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		3.1.2.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



		3.1.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	B	B	B	B	B	
		3.1.4.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	88,25	88,25	56,00	59	60	60,5	61	61,00
				2	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	0	0	30	30	30	35	35	35

**Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani**

4.1.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	4.1.1.	Meningkatnya Mutu pendidikan	1	Indeks Pengetahuan	Poin	56,83	56,89	57,55	57,90	58,2	58,8	59,44	59,44
		4.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	Poin	75,98	76,43	76,88	76,75	77,04	77,26	77,54	77,54
		4.1.3.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik	Persen	05,16	80,37	68,47	71	73	75	77	81,65
		4.1.4.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani	Persen	n/a	99,67	100,8	101				
				1	Pola Pangan Harapan	Skor					95	95,5	96,1	96,1
		4.1.5.	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	200.000	589.843	701.335	500.000	525.000	850.000	1.000.000	3.126.103
		4.1.6.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Baru	1	Jumlah industri baru	Unit	0	0	56	40	40	40	40	200
		4.1.7.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1	Jumlah desa tematik	Desa	0	0	33	26	26	26	26	130

**Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**

5.1.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	5.1.1.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	N/A	109	52	51	52	41	25	221
------	---	--------	---	---	---	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tabel 4.4

## Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi	
			Murni Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,56	68,85	68,85
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,63	4,17	6,66
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,16	4,88	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,94	10,37	10,37
5.	Indek Gini (Poin)	0,357	0,330	0,330
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,25	1,20	1,20
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	28,289	28.100	28.350

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 4.5.



Tabel 4.5

## Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET TAHUN 2023		OPD Penanggung jawab
				2021	2022	MURNI	PERUBAHAN	
1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	2	5	5	5	Setda, Bagian Sosmas
2.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	Poin	0,354	0,334	0,330	0,330	PUTR, Dinkes, DPKPP, Dishub, Kominfo, Disdagin, LH
3.	Pengurangan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	12,33	10,80	10,37	10,37	Dinsos, Dinkes, KKUKM, PUTR, Disdagin, DP3AKB, DKP3, Disdik, Kecamatan
4.	Menurunkan prevalensi stunting	Angka Stunting	Persen	3,52	4	3,5	3,5	Dinkes, Dinsos, Disdik
5.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	4,6	10	10	10	Satpol PP
6.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nlai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	Bappedalitbang, Inspektorat, Kominfo
7.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Poin	B	B	B	B	Kominfo, Disdukcapil, DPMPSTSP, RSUD Majalengka, RSUD Cideres
9.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	57,48	60,5	61	61	BKPSDM
10.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	30	35	35	35	BKPSDM



11.	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pengetahuan	Poin	58,34	58,88	59,44	59,44	Disdik
12.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	77,63	77,26	77,54	77,54	Dinkes
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	69,62	71,31	77	77	DPKPP. LH
14.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan	Skor	93,8	95,5	96,1	96,1	DKP3
15.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	472.906	850.000	1.000.000	1.000.000	Disparbud
16.	Meningkatnya Investasi sektor Industri	Jumlah Industri Baru	unit	104	40	40	40	Dinas PMPTSP, Disdagin
17.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	Desa	17	26	26	26	DKP3, Parbud
18.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	134	41	25	25	Kecamatan, DPMD

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

**Tabel 4.6**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten**  
**Majalengka Tahun 2023**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2023	
		Murni	Perubahan
<b>I.</b>	<b>Aspek kesejahteraan masyarakat</b>		
<b>A.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>		
1.1	Pertumbuhan PDRB/ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	4,17	6,66
1.2	PDRB per kapita ADHB	28,100	28,350
1.3	Indeks Gini	0,33	0,33
<b>B.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>		
1.5	Tingkat kemiskinan	10,37	10,37
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,85	68,85
1.7	Harapan Lama Sekolah	13,17	13,17
1.8	Rata lama sekolah	7,39	7,39
1.9	Usia harapan hidup	70,60	70,60
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,02	0,02
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,55%	71,55%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	4,88	4,10
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
1.15	Opini BPK	WTP	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	86,50	86,50
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	62	62
<b>II.</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>		
<b>A.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		
2.1	PDRB ADHB [Milliar Rp]	34.779,40	34.779,40
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Milliar Rp]	24.990,50	24.990,50
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.475,00	10.000,00

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

## 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian

pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional Tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan **Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023** yaitu : "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan yang termuat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023 adalah:

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
- Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan;
- Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job;
- Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- Percepatan Infrastruktur Dasar: Air Bersih dan Sanitasi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

#### A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023

1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkokuh Karakter Bangsa;



15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal; serta
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

#### **4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat. Strategi dan arah kebijakan

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilakukan melalui 28 strategi dan 54 arah kebijakan yang tersebar ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Reformasi Sistem Kesehatan Daerah*

Terjadinya pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Jawa Barat terutama bagi upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Sistem kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat seyogyanya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

- a. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas (efektif, aman dan berfokus pada pasien);
- b. Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan (biaya, waktu tunggu dan jarak ke fasilitas layanan kesehatan); dan
- c. Menjamin keterjangkauan biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan (kontrol biaya).

### 2. *Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi*

Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan

menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

### 3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan.

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan
- b. Akses Pangan
- c. Pemanfaatan Pangan

### 4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya:

- a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama

- (KUBE), akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan; dan
- b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

##### 5. *Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan*

Pandemi COVID-19 merupakan suatu bencana kesehatan yang dapat dikategorikan pada kejadian luar biasa dan mengubah hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat, berbagai pola hidup masyarakat dipaksa untuk berubah dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang menekankan protokol kesehatan yang ketat saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merupakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjawab tantangan.

##### 6. *Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana*

Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19 memiliki potensi risiko yang cukup besar jika tidak dilakukan pengendalian secara cepat dan komprehensif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Konsep penanganan pandemi COVID-19 ini pada dasarnya sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Sejak 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi perhatian kesehatan masyarakat internasional. Pada 4 Maret 2020, kasus COVID-19 telah dilaporkan

di 116 negara dengan 1,2 juta orang terinfeksi virus COVID-19. Pada Februari 2020, jumlah kasus di China menurun, sedangkan jumlah kasus di berbagai negara lain terus meningkat. Kondisi ini membuat seluruh masyarakat di tanah air waspada. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Himbuan menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus dianjurkan.

#### *7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah*

Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

#### *8. Gerakan Membangun Desa*

Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### *9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara*

Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

#### *10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai

daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

#### *11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata*

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan social distancing/physical distancing saat pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh. Kelompok usaha tersebut antara lain perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata.

#### **4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka**

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain.

##### A. Permasalahan Kesehatan

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah;
2. Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda.

##### B. Permasalahan Pendidikan

1. Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS);

2. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.

#### C. Permasalahan sosial dan keagamaan

1. Diperlukan bimbingan sosial dan pengetahuan serta pelatihan bagi penyandang disabilitas seperti pembuatan kaki palsu;
2. Bantuan alat-alat kesehatan bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda dan alat bantu jalan lainnya;
3. Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah;
4. Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound system, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya.

#### D. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan

1. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa;
2. Peningkatan penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, peningkatan bantuan modal usaha bagi para pemuda dan masyarakat secara umum, pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan, fasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat, pengadaan bantuan sarana usaha untuk masyarakat, pelatihan dan pemodalan UMKM;
3. Pembinaan wirausaha kecil/home industry dengan memberikan bantuan modal usaha kecil bagi masyarakat khususnya pemuda dan ibu rumah tangga melalui kemudahan akses kredit dari bank Jabar Banten dalam rangka penciptaan lapangan kerja dengan pemberian program pelatihan kewirausahaan;



4. Penguatan dukungan di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah melalui pelatihan dan bantuan modal;
5. Penyelenggaraan pelatihan di kalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Supaya kunjungan wisatawan bisa meningkat maka sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios dll;
7. Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha;
8. Pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya agar tetap lestari dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai budaya dan kearifan lokal Majalengka;
9. Penguatan ketahanan pangan di daerah yang memerlukan pembuatan embung desa;
10. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
11. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat;
12. Pengadaan bantuan untuk home industry berupa pelatihan, modal dan pemasaran;
13. Penguatan bantuan modal usaha desa dan koperasi, peningkatan UMKM, pelatihan petani rumahan, pelatihan



ekonomi kreatif, pelatihan pertanian dan peternakan, pelatihan bank sampah, peningkatan sarana dan prasarana untuk sengar seni dalam rangka peningkatan wisata daerah, pembentukan kelompok masyarakat di desa desa, bantuan sosial bagi pelaku usaha yang terdampak PPKM, pengadaan lapangan pekerjaan yang bersifat home industry, pemberdayaan bagi kelompok tani.

#### E. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian;
3. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor kepala desa;
4. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama;
5. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman;
6. Normalisasi dan pemeliharaan drainase;
7. Penataan Kawasan Kumuh;
8. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
9. Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal diwilayah tersebut;
10. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni;
11. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok;
12. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS Pengadaan armada pengangkut sampah.

#### 4.2.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 5 (lima) isu strategis, yaitu : 1) Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial; 3) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 4) Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 5) Reformasi Birokrasi. Kelima isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.7.



**Tabel 4.7**  
**Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Majalengka 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2023
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.	Lokal: Daya beli dan Pengangguran Pemerataan	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat	Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. Pendidikan gratis belum maksimal. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun). Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal Penyebaran sekolah yang belum merata. Distribusi guru proporsional belum maksimal. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan. Masih kurangnya infrastruktur penunjang Pendidikan. Masih rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat. Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi. Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Masih sering terjadi pembebanan biaya	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Majalengka 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2023
			tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat). Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan. Olahraga di Majalengka yang memenuhi standar nasional.	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan Decent Job.	Nasional: Daya Beli  Lokal: Daya Beli Pengangguran Pemerataan	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya	Persentase penduduk miskin masih belum mencapai target. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Lapangan kerja terbatas. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong “pekerja rentan/vulnerable employment” masih cukup tinggi Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.	Nasional: Defisit Fiskal dan Investasi Rantai nilai Daya Beli  Lokal: Bencana Pemulihan Ekonomi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Majalengka belum optimal. Masih terdapat rumah yang tidak layak huni Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum Akses dan standardisasi terhadap layanan air minum belum merata. Masih besarnya persentase lahan budidaya yang	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Majalengka 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2023
			<p>belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air. Rendahnya kinerja jaringan jalan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas. Masih terdapat kondisi Jalan dalam keadaan rusak</p> <p>Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Kabupaten belum optimal.</p> <p>Penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat.</p> <p>Jaringan irigasi masih banyak terdapat kerusakan.</p> <p>Cakupan pelayanan air limbah domestik belum optimal.</p> <p>Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah.</p> <p>Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar.</p> <p>Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal</p> <p>Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal.</p> <p>Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.</p>	
Mendorong pemulihan dunia usaha. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau).	Nasional: Investasi  Lokal: Pemulihan Ekonomi	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi masih rendah. Pendapatan per kapita belum sesuai target. Skor Pola Pangan Harapan belum sesuai target. Kontribusi lapangan usaha Pariwisata terhadap PDRB masih rendah. Pertumbuhan sektor industri masih bisa ditingkatkan lagi.	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Majalengka 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2023
			<p>Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha.</p> <p>Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi.</p> <p>Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan.</p> <p>Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.</p> <p>Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai</p> <p>Belum optimalnya akses (konektivitas), amenities dan atraksi pada destinasi wisata.</p> <p>Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata.</p> <p>Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata.</p> <p>Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian.</p> <p>Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.</p> <p>Pemasaran hasil perikanan belum terintegrasi.</p> <p>Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.</p> <p>Belum optimalnya rantai pasok pemasaran.</p> <p>Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.</p>	
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	Global: Investasi	Reformasi Birokrasi	<p>Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi.</p> <p>Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada</p> <p>Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</p> <p>Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa.</p>	Reformasi Birokrasi



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Majalengka 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2023
			<p>BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa. Belum optimalnya Pemanfaatan CSR Penerapan e-Government belum sepenuhnya dilaksanakan. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness). Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Majalengka Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah. Mengurangi potensi konflik antar umat beragama. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</p>	

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.2, maka 5 (lima) Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 relevan dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat**

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-



masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

## **2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya**

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,43 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 12,33 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

## **3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini

lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

#### **4. Kemandirian Desa**

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon).

Rebana merupakan akronim dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Segitiga Emas Rebana adalah buah pemikiran Gubernur Jawa Barat yang melihat potensi di wilayah Timur Jawa Barat. Industri-industri yang sekarang berada di jalur aliran sungai Citarum, rencananya akan dihimbau untuk pindah ke bagian timur Jawa Barat, sekaligus untuk pemerataan pembangunan. Wilayah yang dianggap strategis adalah Subang, Majalengka dan Cirebon. Di Kabupaten Subang terdapat pelabuhan Internasional Patimban yang menjadi proyek nasional, di Kabupaten Majalengka ada Bandara Internasional Kertajati dan Aerocity yang menjadi proyek pemerintah provinsi, dan di Cirebon yang akan didorong untuk menjadi kota Metropolitan. Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif.

## **5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan

target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

## **6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat**

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi.

Untuk pelayanan tingkat sekunder, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan Majalengka serta sekarang Rumah Sakit Umum Daerah Talaga sedang dipercepat agar dapat beroperasi.

## **7. Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan

peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis**  
**Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional**  
**dan Provinsi Jawa Barat**

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023</b>
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan	1. Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. 2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 3. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 4. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 5. Reformasi Sistem Perlindungan sosial 6. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 7. Reformasi Sistem kesiapsiagaan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. 2. Kemiskinan dan Permasalahan sosial. 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Kemandirian Desa 5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat 7. Reformasi Birokrasi.	1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi 5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri 6. Mewujudkan Kemandirian Desa

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
publik	Penaggulanagan Resiko Bencana 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 9. Gerakan Membangun Desa 10. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 11. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

#### 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2023, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

#### Gambar 4.2

#### Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023



**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**



**Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat**



**Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Percepatan Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat**

**Tabel 4.9**  
**Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional**  
**dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2023**

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Kabupaten Majalengka</b>
<b>PN-1</b> Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<b>Prioritas 4</b> Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri
<b>PN-2</b> Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<b>Prioritas 3</b> Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor
	<b>Prioritas 6</b> Mewujudkan Kemandirian Desa
	<b>Prioritas 2:</b> Penanggulangan Kemiskinan
<b>PN-5</b> Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<b>Prioritas 3</b> Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor
<b>PN-6</b> Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
<b>PN-7</b> Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<b>Prioritas 5</b> Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan , kesehatan dan Reformasi Birokrasi
<b>PN-3</b> Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	
<b>PN-4</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<b>Prioritas 1:</b> Peningkatan nilai-nilai agama dalam prilaku kehidupan masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.10**  
**Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2023 dan Sasaran RKPD 2023 Kabupaten Majalengka**

No	Sasaran RKP Tahun 2023	No	Sasaran RKPD Tahun 2023
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S18	Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan		
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4	Menurunkan prevalensi stunting
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya Investasi Sektor Industri
		S17	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S10	Meningkatnya Mutu Pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan		
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S23	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline		
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja
		S7	Terwujudnya akuntabilitas keuangan
		S9	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
S25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	S8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.



Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	N/A
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan ( (%)	Jumlah industri baru
Kontribusi PDB industri pengolahan ((%)	Jumlah industri baru
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar)	Jumlah kunjungan wisatawan
Kontribusi PDB pariwisata (%)	Jumlah kunjungan wisatawan
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	N/A
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	N/A
Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	N/A
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	N/A
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Konservasi Kawasan Kelautan (juta ha)	N/A
Produksi ikan (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Produksi garam (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)	N/A
Pertumbuhan wirausaha (%)	Jumlah industry baru
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Jumlah industry baru
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Jumlah industry baru
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Jumlah industry baru
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Jumlah kunjungan wisatawan
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Opini BPK RI
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	N/A
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Jumlah Industri Baru
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	N/A
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	N/A
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	N/A
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	N/A
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	N/A
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	N/A
Perkembangan status pembangunan desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat status



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
	perkembangannya
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Opini BPK RI
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Opini BPK RI
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Nlai SAKIP
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	N/A
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	Indeks Kesehatan
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Angka Stunting
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Indeks Kesehatan
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)	Indeks Pengetahuan
Membaca (nilai) Sains Nilai	Indeks Pengetahuan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Indeks Pengetahuan
Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pengetahuan
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Angka Kemiskinan
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Indeks Pengetahuan
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Angka Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Angka Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Angka Kemiskinan



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	N/A
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Indeks Kesehatan
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Angka Stunting
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Indeks Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	Indeks Kesehatan
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Indeks Kesehatan
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Angka Kemiskinan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Angka Kemiskinan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Indeks Pengetahuan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Indeks Pengetahuan
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Indeks Pengetahuan
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Indeks Pengetahuan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Indeks Pengetahuan
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Angka Kemiskinan
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Angka Kemiskinan
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pengetahuan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	Jumlah industri baru



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
(inovasi)	
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Jumlah industri baru
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	N/A
Budaya dan Prestasi Olahraga:	Indeks Pengetahuan
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	N/A
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Pengetahuan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	Indeks Pengetahuan
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	Indeks Gini
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Indeks Gini
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	Indeks Gini
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Indeks Gini
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Indeks Gini
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Indeks Gini
Rasio Elektrifikasi (%)	Indeks Gini
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks Gini
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Gini
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	N/A
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Gini
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	N/A
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	N/A
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif,	Indeks Gini



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
unit)	
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Indeks Gini
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Indeks Gini
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Indeks Gini
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Indeks Gini
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Indeks Gini
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Indeks Gini
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Indeks Gini
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Indeks Gini
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A
Persentase penurunan emisi GRK (%)	N/A
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	N/A
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	N/A
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Profesionalitas ASN
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.12**  
**Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan**  
**Program Prioritas Nasional dalam RPJMN**

No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Kab.Majalengka	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kab.Majalengka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab.Majalengka	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
3.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Kab.Majalengka	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			2. Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Desa Digital (P3PD)	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum

No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

### 4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran:

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
3. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang; dan
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:



1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk

mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B
  - Ekonomi : Pasar induk regional
  - Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
  - Pendidikan : Perguruan tinggi
2. Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara-Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan.
  3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka

serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga.

4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang.
5. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:
  - Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
  - Melayani satu atau lebih desa;
  - Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan

#### 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka, meliputi pemantapan peran dan fungsi PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari:

**Tabel 4.13**  
**Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka**

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Majalengka	Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Kertajati	Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.
	3. Talaga	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional
	4. Rajagaluh	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.



STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	5. Jatiwangi	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Cigasong	sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Panyingkiran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.
	3. Cikijing	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	4. Jatitujuh	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.
	5. Kasokandel	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.
	6. Ligung	Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	7. Sumberjaya	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	8. Leuwimunding	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	9. Palasah	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	10. Argapura	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	11. Sukahaji	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	12. Sindangwangi	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	13. Bantarujeg	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
	14. Lemahsugih	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	15. Banjaran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	16. Maja	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	17. Sindang	sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	18. Cingambul	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	19. Malausma	<i>desa.</i> Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jatitujuh (Pilangsari)</li> <li>2. Ligung (Kedungsari, Gandawesi)</li> <li>3. Sumberjaya (Cidenok)</li> <li>4. Palasah (Najasuka)</li> <li>5. Jatiwangi (Sukaraja Wetan)</li> <li>6. Kasokandel (Panjiwetan)</li> <li>7. Panyingkiran (Cijurey)</li> <li>8. Cigasong (Tajur, Karayunan)</li> <li>9. Sukahaji (Jayi, Ciomas)</li> <li>10. Banjaran (Parimulya)</li> <li>11. Leuwimunding (Parakan)</li> <li>12. Rajagaluh (Teja)</li> <li>13. Sindangwangi (Padaherang)</li> <li>14. Argapura (Mekarwangi)</li> <li>15. Maja (Sindangmulya)</li> <li>16. Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey)</li> <li>17. Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih)</li> <li>18. Malausma (Girimukti, Cimuncang)</li> <li>19. Cingambul (Wangkelang, Sedareja)</li> <li>20. Cikijing (Cisoka)</li> <li>21. Sindang (Banyureja)</li> </ol>	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan “home industri” yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

### 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi:

#### 1. KAWASAN LINDUNG

- 1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai;
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung;

- 4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016);
- 7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.

## 2. KAWASAN BUDIDAYA

- 1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 2) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll);
- 4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan;
- 5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka;
- 6) Masterplan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.14**  
**Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka**

NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
<b>A</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b>20.559,49</b>	<b>15,30</b>
<b>1</b>	<b>Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>	<b>8.140,51</b>	<b>6,06</b>
	Hutan Lindung	5.358,40	3,99
	Resapan Air	2.782,11	2,07
<b>2</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>4.468,29</b>	<b>3,33</b>
	Sempadan Sungai	4.444,09	3,31
	Sekitar Danau atau Waduk	24,20	0,02
<b>3</b>	<b>Kawasan Konservasi</b>	<b>6.037,01</b>	<b>4,49</b>
	Taman Nasional Gunung Ceremai	6.037,01	4,49
<b>4</b>	<b>Kawasan Lindung Geologi</b>	<b>1.913,68</b>	<b>1,42</b>
	Sempadan Mata Air	1.913,68	1,42
<b>5</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>	<b>44.301,26</b>	<b>32,98</b>
	Rawan Bencana Gempa Bumi	25.004,96	18,61
	Rawan Bencana Gerakan Tanah	6.667,04	4,96
	Rawan Bencana Gunung Api I	2.974,33	2,21
	Rawan Bencana Gunung Api II	2.951,72	2,20
	Rawan Bencana Gunung Api III	177,70	0,13
	Rawan Bencana Banjir	6.525,51	4,86
<b>B</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>113.781,33</b>	<b>84,70</b>
<b>1</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi</b>	<b>15.581,86</b>	<b>11,60</b>
	Hutan Produksi Tetap	14.142,51	10,53
	Hutan Produksi Terbatas	1.439,35	1,07
<b>2</b>	<b>Kawasan Hutan Rakyat</b>	<b>6.513,48</b>	<b>4,85</b>
<b>3</b>	<b>Kawasan Pertanian</b>	<b>38.589,59</b>	<b>28,73</b>
	Pertanian Tanaman Pangan	30.239,55	22,51
	Pertanian Hortikultura	7.518,15	5,60
	Perikanan	831,83	0,62
<b>4</b>	<b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>	<b>880,10</b>	<b>0,66</b>

NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
	Pertambangan Mineral	880,10	0,66
<b>5</b>	<b>Kawasan Industri</b>	<b>3.077,71</b>	<b>2,29</b>
	Kawasan Industri	1.723,78	1,35
	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	8,24	0,01
	Industri	1.063,11	0,94
<b>6</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>40.303,86</b>	<b>30,00</b>
	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.704,62	10,43
	Kawasan Permukiman Perdesaan	23.667,17	19,57
<b>7</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>56,97</b>	<b>0,56</b>
<b>8</b>	<b>Kawasan Aerocity</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2,29</b>
<b>9</b>	<b>Kawasan Bandara BIJB</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1,34</b>
<b>10</b>	<b>Kawasan Aerotropolis</b>	<b>5.693,52</b>	<b>4,68</b>
<b>11</b>	<b>Jalan</b>	<b>325,27</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>134.650,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031.

Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

#### 4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terkait penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: (1) Kabupaten Subang; (2) Kabupaten Sumedang; (3) Kabupaten Indramayu; (4) Kabupaten Majalengka; (5) Kabupaten Cirebon; (6) Kota Cirebon; dan (7) Kabupaten Kuningan. Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kawasan Rebana menjadi salah satu dari 7 (tujuh) ekonomi baru di Jawa Barat yang menjadi solusi dari dinamika dan masalah pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan eruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan



kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industry berwawasan lingkungan.

Rencana aksi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi:

- a. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar,
- d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air;
- e. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur lainnya.





**Tabel 4.15**  
**Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka**

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
<b>A. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan</b>														<b>12.780.000</b>			
1.	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)	Kab Sumedang, Kab Majalengka											Kementerian PUPR	5.580.000			v
2.	Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu	Kab.Majalengka, Kab Indramayu											Kementerian PUPR	7.200.000			v
<b>B. Pembangunan dan Peningkatan Jalan</b>														<b>1.571.740</b>			
3.	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - BIJB	Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.500.000	v	v	v
4.	Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan)	Kab Kuningan, Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	
5.	Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung	Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	21.740	v	v	
<b>C. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>														<b>20.000.000</b>			
7.	Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka											Kementerian Perhubungan	20.000.000			v



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
<b>D. Sarana dan Prasarana Persampahan</b>														<b>25.000</b>				
8.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut	Kec.Kadipaten, Kab Majalengka												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	
<b>E. Sarana dan Prasarana Permukiman</b>														<b>5.200.000</b>				
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan sebagian konstruksi)	2.100.000	v	v	v
10.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	3.100.000	v	v	v
<b>F. Pembangunan Waduk/Bendungan</b>														<b>1.300.000</b>				
11.	Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik	Kab.Majalengka, Kab.Sumedang												Kementerian PUPR	1.300.000	v		
<b>G. Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir</b>														<b>305.300</b>				
12.	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang, Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneuh)	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka												Kementerian PUPR	150.000	v		
13.	Program Pengembangan Desa Konservasi	100 Desa di Kab.Subang, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan												a. Kementerian KLHK b. Pemerintah Daerah (Pemberdayaan Masyarakat) c. BUMN/BUMD/Swasta	155.300	v	v	v
<b>H. Sumber Daya Manusia</b>														<b>500.000</b>				



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB	
14.	Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II	Kec.Panyingkiran, Kab.Majalengka												a. Kementerian PUPR b. Kementrian Dikbud-Ristek c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v
<b>I. Daya Saing Kawasan</b>												<b>188.000</b>						
15.	Pembangunan Gedung <i>Creative Center</i>	Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan												a. Kementerian Parekraf (Sarana dan Prasarana) b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan Bangunan)	63.000	v	v	
16.	Pembangunan Gedung Pusat Budaya	Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang												Pemerintah Daerah	25.000		v	
17.	Pengembangan desa digital	Kab.Majalengka, Kab.Subang, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang												a. Kementerian Kominfo b. Kementerian Desa dan PDTT c. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v	
<b>J. Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>												<b>350.000</b>						
18.	Pembangunan Rumah Sakit Cideres Tipe B	Kab.Majalengka												a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) c. Swasta	350.000	v	v	V
<b>K. Infrastruktur Energi</b>												<b>3.930.000</b>						
19.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Kab.Kuningan, Kab.Majalengka												Kementerian ESDM	3.930.000	v		v



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB	
	(PLTP) Sangkahurip Ciremai																	
<b>L.</b>	<b>Pengembangan Kawasan Industri</b>														<b>2.280.000</b>			
20.	Pengembangan Kawasan Industri Kertajati	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka											Swasta	2.280.000			v	

Ket:

 Tahap Persiapan       Tahap Konstruksi  
Sumber : Perpres 87 Tahun 2021.



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 baik dari sisi nomenklatur maupun anggaran, khususnya akibat perubahan kondisi fiskal pemerintah daerah dan penanganan kondisi masyarakat serta pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19.

Penyesuaian tersebut terdiri dari penyempurnaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, penyesuaian, serta terjadi perubahan target pendapatan tahun 2023 yang menyebabkan perlunya penyesuaian baik dari struktur pendanaan, maupun pengurangan pada anggaran program dan kegiatan, serta beberapa kondisi yang akan disampaikan lebih lanjut pada bab ini. Sebagaimana penjelasan di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diantaranya:

1. Penyesuaian Pendapatan;
2. Penyesuaian Pembiayaan Tahun 2023;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pemenuhan Kegiatan Prioritas Kabupaten yang didanai melalui Bantuan Keuangan, DAK, dan DBHCHT;
5. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Pada tahun 2023, pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat dampak Pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian, ada beberapa hal yang mengakibatkan realisasi penganggaran tahun 2023 belum optimal serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian-penyempurnaan baik pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 3 (tiga) pergeseran atau Perubahan Parsial, sebagai berikut:

1. Perubahan Parsial I, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Parsial II, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Parsial III, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

### **5.1. Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2023**

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam perjalannya mengalami 3 (tiga) kali pergeseran atau Perubahan Parsial. Pergeseran tersebut tentunya didasari atas adanya regulasi baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara jelas kronologis pergeseran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Parsial I dilaksanakan Pada Tanggal, 24 Februari 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan, yaitu terbitnya terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial).

**Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.017.751.959.595,00** (*tiga triliun tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*). **Belanja Daerah** mengalami pengurangan sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.029.021.213.210,00** (*tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial I sebesar **Rp3.041.521.213.210,00** (*tiga triliun empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

- 2. Perubahan Parsial II** dilaksanakan **Pada Tanggal, 28 April 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial I) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor: 900.1014.3/1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial);

**Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.017.751.959.595,00** (*tiga triliun tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*). **Belanja Daerah** mengalami pengurangan sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.029.021.213.210,00** (*tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial II sebesar **Rp3.041.521.213.210,00** (**tiga triliun empat**



**puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah)**

- 3. Perubahan Parsial III** dilaksanakan **Pada Tanggal, 27 Juni 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial II) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-58/ PK/ 2023 Perihal Pemberitahuan Sisa DBH CHT s.d TA 2022, yang di dalamnya mensyaratkan bahwa surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT menjadi syarat penyaluran DBH CHT triwulan II Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023; (Perubahan Parsial);

**Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp355.120.699.216,00)** (*tiga ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.026.333.611.064,00** (*tiga triliun dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu enam puluh empat rupiah*). **Belanja Daerah** mengalami pengurangan sebesar **(Rp352.991.235.438,00)** (*tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.039.732.328.457,00** (*tiga triliun tiga puluh sembilan*

miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). **Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial III** sebesar **Rp3.052.232.328.457,00** (tiga triliun lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)

## **5.2. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 dalam Perubahan RKPD Tahun 2023**

Setelah melakukan Parsial I, II, dan III pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian belanja daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan target pendapatan tahun 2023 yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, dimana kondisi ini menyebabkan segala sendi kehidupan masyarakat menjadi terganggu;
2. Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi;
3. Pada kategori Belanja Hibah, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang belum dicairkan/belum dilaksanakan dan yang terkena efisiensi pada proses APBD murni.

Berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan tahun 2023, sedangkan rinciannya akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini.



Tabel 5.1

## Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
1.	Dinas Pendidikan	995.078.656.340	957.531.286.145	965.434.838.191	974.016.489.660	1.028.118.942.770
2.	Dinas Kesehatan	226.072.814.501	227.110.584.696	241.698.721.255	243.828.185.033	225.822.787.343
3.	Puskesmas Argapura	2.063.359.609	2.063.359.609	2.059.358.875	2.059.358.875	2.330.259.200
4.	Puskesmas Maja	3.843.973.508	3.843.973.508	3.848.093.975	3.848.093.975	4.037.779.966
5.	Puskesmas Sukahaji	2.132.764.780	2.132.764.780	2.134.065.375	2.134.065.375	2.250.150.788
6.	Puskesmas Talaga	4.083.177.326	4.083.177.326	4.083.176.875	4.083.176.875	4.798.741.008
7.	Puskesmas Sumberjaya	3.723.064.999	3.723.064.999	3.723.064.150	3.723.064.150	3.760.775.861
8.	Puskesmas Cikijing	4.764.904.061	4.764.904.061	4.795.573.539	4.795.573.539	4.900.285.732
9.	Puskesmas Cingambul	3.041.537.162	3.041.537.162	3.033.736.710	3.033.736.710	3.040.988.176
10.	Puskesmas Majalengka	2.315.245.869	2.315.245.869	2.312.155.603	2.312.155.603	2.356.020.120
11.	Puskesmas Kertajati	1.439.155.258	1.439.155.258	1.439.156.052	1.439.156.052	1.636.302.091
12.	Puskesmas Leuwimunding	3.325.762.966	3.325.762.966	3.348.267.595	3.348.267.595	3.678.905.742
13.	Puskesmas Ligung	4.087.518.315	4.087.518.315	4.086.013.692	4.086.013.692	4.285.025.833
14.	Puskesmas Kadipaten	2.596.059.385	2.596.059.385	2.596.114.798	2.596.114.798	3.202.745.075
15.	Puskesmas Jatiwangi	3.660.366.594	3.660.366.594	3.661.916.228	3.661.916.228	3.652.166.948
16.	Puskesmas Salagedang	1.211.280.285	1.211.280.285	1.213.581.506	1.213.581.506	1.243.645.784
17.	Puskesmas Munjul	1.846.381.506	1.846.381.506	1.846.380.519	1.846.380.519	1.890.094.936
18.	Puskesmas Lemahsugih	2.703.625.002	2.703.625.002	2.704.424.725	2.704.424.725	2.708.615.156
19.	Puskesmas Jatitujuh	2.398.755.924	2.398.755.924	2.400.255.625	2.400.255.625	2.408.519.586
20.	Puskesmas Banjaran	1.577.925.657	1.577.925.657	1.563.306.061	1.563.306.061	1.774.420.596
21.	Puskesmas Loji	2.028.499.341	2.028.499.341	2.028.719.093	2.028.719.093	2.352.738.013
22.	Puskesmas Rajagaluh	3.134.550.813	3.134.550.813	3.134.530.625	3.134.530.625	3.184.287.100
23.	Puskesmas Sindangwangi	2.217.042.922	2.217.042.922	2.205.948.000	2.205.948.000	2.220.448.000



No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
24.	Puskesmas Kasokandel	2.722.932.226	2.722.932.226	2.721.243.175	2.721.243.175	2.818.548.131
25.	Puskesmas Panyingkiran	1.938.890.579	1.938.890.579	1.933.849.675	1.933.849.675	2.103.239.886
26.	Puskesmas Malausma	3.272.773.393	3.272.773.393	3.271.673.100	3.271.673.100	3.278.475.731
27.	Puskesmas Margajaya	2.314.455.273	2.314.455.273	2.310.455.125	2.310.455.125	2.372.032.266
28.	Puskesmas Panongan	1.242.352.078	1.242.352.078	1.242.351.467	1.242.351.467	1.495.975.836
29.	Puskesmas Balida	2.271.488.785	2.271.488.785	2.268.954.645	2.268.954.645	2.280.157.991
30.	Puskesmas Waringin	2.735.136.653	2.735.136.653	2.735.136.375	2.735.136.375	2.739.652.851
31.	Puskesmas Sindang	1.284.980.888	1.284.980.888	1.280.981.813	1.280.981.813	1.508.210.784
32.	Puskesmas Bantarujeg	4.587.604.501	4.587.604.501	4.587.754.575	4.587.754.575	4.601.006.121
33.	Puskesmas Sukamulya	1.211.295.389	1.211.295.389	1.211.551.825	1.211.551.825	1.256.741.006
34.	Puskesmas Cigasong	2.408.354.777	2.408.354.777	2.403.854.125	2.403.854.125	2.460.275.172
35.	Labkesda Majalengka	940.044.942	940.044.942	940.044.942	940.044.942	940.044.942
36.	RSUD Majalengka	162.064.692.961	149.385.182.961	149.385.182.961	149.385.182.961	153.500.651.111
37.	RSUD Cideres	212.991.217.078	177.461.217.078	177.461.217.078	177.461.217.078	194.648.345.063
38.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	416.797.159.464	251.139.115.464	247.174.789.437	247.174.789.437	252.013.079.130
39.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.797.430.376	40.311.533.691	38.734.736.162	38.734.736.162	41.219.353.715
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.818.361.298	5.818.361.298	5.516.884.849	5.516.884.849	4.711.611.656
41.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	26.737.127.085	18.037.127.085	17.037.126.885	17.037.126.885	15.897.957.653
42.	Dinas Sosial	20.246.364.730	10.556.364.730	9.642.493.030	9.642.493.030	8.521.908.000
43.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.508.151.466	41.508.151.466	41.276.722.423	41.276.722.423	40.374.736.066
44.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	26.983.662.173	22.874.112.173	22.800.366.173	22.800.366.173	25.140.912.190



No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
45.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	56.254.931.135	56.254.931.135	55.358.570.719	55.358.570.719	60.764.339.404
46.	Dinas Lingkungan Hidup	22.402.870.698	27.367.370.698	26.009.796.498	26.009.796.498	26.283.077.388
47.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.904.807.090	9.568.807.090	9.147.555.490	9.147.555.490	8.257.337.800
48.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.383.104.614	27.383.104.614	26.298.104.414	26.298.104.414	26.246.182.400
49.	Dinas Perhubungan	54.862.178.990	42.782.428.990	40.905.027.985	40.905.027.985	42.280.685.382
50.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.859.013.519	6.859.013.519	6.605.132.305	6.605.132.305	6.026.562.966
51.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.606.978.229	6.606.978.229	6.503.627.229	6.503.627.229	5.491.946.646
52.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	26.979.357.715	24.528.257.715	23.376.317.915	23.376.317.915	22.787.204.464
53.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	38.348.104.237	6.890.704.237	6.790.647.037	6.790.647.037	5.379.667.045
54.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.926.464.948	7.926.464.948	7.542.464.948	7.542.464.948	6.655.845.983
55.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.999.310.288	10.199.310.288	9.691.774.743	9.691.774.743	8.692.303.406
56.	Sekretariat Daerah	65.328.864.098	65.328.864.098	64.663.003.798	65.074.003.798	62.349.855.853
57.	Sekretariat DPRD	71.065.662.857	71.065.662.857	67.864.790.858	67.864.790.858	66.776.499.823
58.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.394.475.459	11.394.475.459	11.194.471.259	11.194.471.259	10.541.139.058
59.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	522.728.977.951	509.548.977.951	504.541.963.002	502.430.963.002	499.413.871.539
60.	Badan Pendapatan Daerah	19.087.893.512	19.087.893.512	17.767.722.612	17.767.722.612	18.418.318.637
61.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.448.790.221	22.448.790.221	29.419.703.434	31.119.703.434	20.807.509.188



No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
62.	Inspektorat	12.394.284.603	12.394.284.603	12.394.284.603	12.394.284.603	11.271.594.500
63.	Kecamatan Majalengka	18.919.079.122	18.919.079.122	18.273.818.719	18.273.818.719	16.737.429.598
64.	Kecamatan Jatiwangi	3.781.516.843	3.781.516.843	3.678.387.343	3.678.387.343	3.803.311.400
65.	Kecamatan Palasah	2.732.593.137	2.732.593.137	2.667.127.441	2.667.127.441	2.140.456.200
66.	Kecamatan Sumberjaya	2.526.580.866	2.526.580.866	2.450.050.866	2.450.050.866	2.023.824.700
67.	Kecamatan Leuwimunding	2.742.599.833	2.742.599.833	2.676.508.313	2.676.508.313	2.214.969.280
68.	Kecamatan Rajagaluh	3.343.870.496	3.343.870.496	3.272.554.996	3.272.554.996	2.800.960.100
69.	Kecamatan Sindangwangi	2.999.605.735	2.999.605.735	2.924.885.735	2.924.885.735	2.704.103.000
70.	Kecamatan Sindang	2.827.266.208	2.827.266.208	2.773.793.272	2.773.793.272	2.332.509.113
71.	Kecamatan Sukahaji	3.068.240.994	3.068.240.994	2.993.076.194	2.993.076.194	2.689.561.400
72.	Kecamatan Maja	3.173.831.291	3.173.831.291	3.086.828.291	3.086.828.291	2.674.157.700
73.	Kecamatan Argapura	3.077.063.472	3.077.063.472	3.006.712.912	3.006.712.912	2.693.410.475
74.	Kecamatan Cigasong	7.781.791.745	7.781.791.745	7.522.372.745	7.522.372.745	6.781.355.700
75.	Kecamatan Malausma	2.807.364.120	2.807.364.120	2.732.476.020	2.732.476.020	2.295.745.500
76.	Kecamatan Talaga	3.091.420.635	3.091.420.635	3.018.920.335	3.018.920.335	2.396.819.400
77.	Kecamatan Dawuan	3.113.809.445	3.113.809.445	3.027.937.745	3.027.937.745	2.502.930.900
78.	Kecamatan Banjaran	2.730.051.594	2.730.051.594	2.672.881.594	2.672.881.594	2.387.403.100
79.	Kecamatan Bantarujeg	2.617.251.051	2.617.251.051	2.544.308.651	2.544.308.651	2.259.835.900
80.	Kecamatan Lemahsugih	2.198.704.080	2.198.704.080	2.123.404.080	2.123.404.080	2.145.621.600
81.	Kecamatan Cingambul	2.860.035.193	2.860.035.193	2.782.171.093	2.782.171.093	2.693.903.400
82.	Kecamatan Cikijing	2.664.646.937	2.664.646.937	2.599.674.337	2.599.674.337	2.254.278.000
83.	Kecamatan Panyingkiran	2.327.336.352	2.327.336.352	2.282.336.352	2.282.336.352	1.966.998.300
84.	Kecamatan Kadipaten	2.792.439.664	2.792.439.664	2.711.394.640	2.711.394.640	2.861.823.876
85.	Kecamatan Kasokandel	2.355.136.547	2.355.136.547	2.303.356.547	2.303.356.547	2.205.180.800
86.	Kecamatan Kertajati	3.029.325.088	3.029.325.088	2.938.095.188	2.938.095.188	2.688.108.100
87.	Kecamatan Jatitujuh	3.022.866.313	3.022.866.313	2.946.151.313	2.946.151.313	2.592.569.648



No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
88.	Kecamatan Ligung	3.481.773.988	3.481.773.988	3.387.865.988	3.387.865.988	2.947.313.200
89.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.460.394.744	8.460.394.744	8.260.394.744	8.260.394.744	7.736.331.313
<b>Jumlah</b>		<b>3.392.723.563.895</b>	<b>3.029.021.213.210</b>	<b>3.029.021.213.210</b>	<b>3.039.732.328.457</b>	<b>3.079.512.414.510</b>



## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang terjadi pada kurun waktu sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan percepatan pencapaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Pada Tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa bencana non alam Pandemi COVID-19 yang berpengaruh sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka berimplikasi terhadap menurunnya kinerja perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Majalengka secara umum. Pada tahun 2023 berangsur angsur kondisi perekonomian mulai membaik namun terdapat beberapa targetan pendapatan yang diprediksikan tidak akan tercapai sehingga pada kondisi perencanaan pembangunan tahun 2023 dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan merupakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD ini ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2023, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2023 berupa pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau





kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023, agar target pembangunan pada tahun 2023 dapat tercapai dan mendorong terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yaitu, “Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”